PEREKONOMIAN PEREMPUAN

di Pinggir Pantai

STRATEGI BERTAHAN UMKM PESISIR



PEREMPUAN BERDAYA | UMKM TANGGUH | PESISIR BERKELANJUTAN | EKONOMI BERKEMBANG

Dr. Hj. Haeranah Alwany, S.E., M.M.

PEREKONOMIAN PEREMPUAN

di Pinggir Pantai Strategi Bertahan UMKM Pesisir

Dr. Hj. Haeranah Alwany, S.E., M.M.

.

Mitra Ilmu
2026

PEREKONOMIAN PEREMPUAN
di Pinggir Pantai Strategi Bertahan UMKM Pesisir

Penulis :
Dr. Hj. Haeranah Alwany, S.E., M.M.

ISBN:

Desain Sampul dan Tata Letak:
Abu Syahla

Penerbit : Mitra Ilmu

Ukuran : 23 x 15 cm (Standar UNESCO)

Kantor:
Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang
Hp. 081340021801/ 0852-9947-3675/ 0821-9649-6667
Email : mitrailmua@gmail.com
Website : www.mitrailmumakassar.com
Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: Agustus 2026

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan anugerah-Nya sehingga buku yang berjudul ***Perekonomian Perempuan di Pinggir Pantai: Strategi Bertahan UMKM Pesisir*** dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya pada bidang ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Wilayah pesisir merupakan ruang kehidupan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang unik. Di balik potensi sumber daya kelautan yang melimpah, masyarakat pesisir masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pemasaran, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi ekonomi. Dalam kondisi tersebut, perempuan pesisir tampil sebagai aktor yang memegang peranan strategis dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga terlibat

aktif dalam berbagai kegiatan produktif, mulai dari pengolahan hasil perikanan, perdagangan, usaha mikro, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

Buku ini disusun dengan keyakinan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan pesisir memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, namun potensi tersebut sering kali belum diimbangi oleh akses yang memadai terhadap modal usaha, peningkatan kapasitas, inovasi teknologi, literasi keuangan, maupun jejaring pemasaran. Oleh karena itu, penguatan UMKM yang dikelola oleh perempuan tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir secara lebih luas.

Pembahasan dalam buku ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pemahaman mengenai karakteristik wilayah pesisir dan kehidupan masyarakatnya, peran strategis perempuan dalam ekonomi rumah tangga, potensi serta tantangan pengembangan UMKM pesisir, hingga berbagai strategi bertahan yang dilakukan perempuan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Selain itu, buku ini juga mengulas aspek penguatan kapasitas

kewirausahaan, pengelolaan keuangan, inovasi produk, strategi pemasaran konvensional dan digital, pengembangan jejaring kemitraan, transformasi UMKM menuju ekonomi berkelanjutan, serta penguatan ketahanan ekonomi keluarga pesisir. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika ekonomi perempuan di kawasan pesisir sekaligus menawarkan berbagai alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam praktik pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan buku ini didasarkan pada berbagai teori, hasil penelitian empiris, kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan sehingga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemberdayaan masyarakat, pendamping UMKM, pengambil kebijakan, organisasi masyarakat sipil, maupun seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai kajian, inovasi, dan kebijakan yang semakin memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup pembahasan maupun kedalaman analisis pada beberapa aspek tertentu. Oleh karena itu, kritik, masukan, dan saran

yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Harapan penulis, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga mampu menginspirasi lahirnya berbagai inisiatif pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi perempuan pesisir, memperkuat daya saing UMKM, serta mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang lebih adil, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu ikhtiar dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.

Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv
Daftar Isi vii

BAB 1. MEMAHAMI PEREKONOMIAN PEREMPUAN PESISIR 1
1.1 Karakteristik Wilayah Pesisir dan Kehidupan Masyarakat 1
1.2 Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga Pesisir 8
1.3 Potensi dan Karakteristik UMKM Pesisir 12
1.4 Tantangan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan 18
1.5 Kerangka Konseptual Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 22

BAB 2. DINAMIKA SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN DI WILAYAH PESISIR 26
2.1 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir 26
2.2 Pembagian Peran Gender dalam Aktivitas Ekonomi 36
2.3 Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan Keluarga . 41
2.4 Kemiskinan dan Kerentanan Rumah Tangga Pesisir 46
2.5 Modal Sosial sebagai Penyangga Kehidupan Ekonomi .. 48

BAB 3. KARAKTERISTIK DAN PERKEMBANGAN UMKM PESISIR 52
3.1 Ragam Usaha Mikro Perempuan Pesisir 52
3.2 Potensi Sumber Daya Lokal sebagai Basis Usaha 60
3.3 Model Produksi dan Rantai Nilai Produk Pesisir 64
3.4 Hambatan Pengembangan UMKM 68
3.5 Peluang Inovasi Produk Berbasis Potensi Lokal 71

BAB 4. STRATEGI BERTAHAN UMKM PEREMPUAN PESISIR 75
4.1 Strategi Adaptasi Menghadapi Krisis Ekonomi 75
4.2 Diversifikasi Produk dan Sumber Pendapatan 83
4.3 Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dan Usaha 87
4.4 Pemanfaatan Jaringan Sosial dalam Pengembangan Usaha 91
4.5 Ketahanan Usaha di Tengah Perubahan Iklim dan Musim 95

BAB 5. KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PESISIR 99
5.1 Jiwa Kewirausahaan Perempuan Pesisir 99
5.2 Kreativitas dan Inovasi Produk 105
5.3 Kepemimpinan Perempuan dalam Kelompok Usaha ... 109
5.4 Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku UMKM . 113
5.5 Membangun Keunggulan Bersaing 116

BAB 6. AKSES SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN USAHA 120
6.1 Akses terhadap Permodalan 120
6.2 Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM 127
6.3 Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Usaha 131
6.4 Penguatan Kemitraan dan Jejaring Bisnis 135
6.5 Peran Kelembagaan dalam Mendukung UMKM 138

BAB 7. PEMASARAN PRODUK UMKM PESISIR 142
7.1 Strategi Pemasaran Konvensional dan Digital 142
7.2 Branding Produk Berbasis Identitas Lokal 147
7.3 Pengemasan dan Standarisasi Produk 151
7.4 Perluasan Akses Pasar 155
7.5 Optimalisasi Media Sosial dan Marketplace 159

BAB 8. KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR 164
8.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM .. 164
8.2 Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir 170
8.3 Peran Perguruan Tinggi, LSM, dan Dunia Usaha 176
8.4 Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan UMKM 181
8.5 Evaluasi Efektivitas Program Pemberdayaan 184

BAB 9. PRAKTIK BAIK DAN MODEL KEBERHASILAN UMKM PESISIR 188
9.1 Studi Kasus UMKM Perempuan yang Berhasil 188
9.2 Faktor Penentu Keberhasilan Usaha 193
9.3 Inovasi Berbasis Kearifan Lokal 197
9.4 Replikasi Model Pengembangan UMKM 200
9.5 Pembelajaran bagi Wilayah Pesisir Lain 203

BAB 10. MASA DEPAN PEREKONOMIAN PEREMPUAN PESISIR 207
10.1 Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Berkelanjutan 207
10.2 Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pesisir 212
10.3 Strategi Menghadapi Tantangan Global 216
10.4 Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas 220
10.5 Rekomendasi Kebijakan dan Agenda Pengembangan UMKM Pesisir 224

Daftar Pustaka 229
GLOSARIUM 235
INDEKS 245

BAB 1
Memahami Perekonomian Perempuan Pesisir

1.1 Karakteristik Wilayah Pesisir dan Kehidupan Masyarakat

Wilayah pesisir merupakan kawasan transisi yang mempertemukan dua sistem ekologis utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem lautan, sehingga membentuk suatu ruang sosial-ekologis yang memiliki dinamika, karakteristik, dan kompleksitas yang berbeda dibandingkan kawasan daratan maupun lautan secara terpisah. Dalam perspektif pembangunan wilayah, kawasan pesisir tidak hanya dipandang sebagai batas geografis yang memisahkan darat dan laut, tetapi sebagai ruang interaksi multidimensional yang mempertemukan proses-proses ekologis, aktivitas ekonomi, hubungan sosial, nilai budaya, serta sistem kelembagaan yang saling memengaruhi secara dinamis. Karakteristik tersebut menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional karena menjadi pusat aktivitas perikanan, perdagangan, transportasi laut, pariwisata bahari, konservasi sumber daya alam, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi kelautan. Namun, pada saat yang sama, kawasan

pesisir juga menjadi wilayah yang paling rentan terhadap berbagai tekanan lingkungan, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor kelautan dan perikanan (Dahuri, Rais, Ginting, & Sitepu, 2013).

Karakteristik biofisik wilayah pesisir dibentuk oleh berbagai proses alam yang berlangsung secara simultan dan saling berkaitan, seperti pasang surut air laut, arus laut, sedimentasi, abrasi pantai, intrusi air laut ke daratan, dinamika gelombang, perubahan musim, hingga fenomena perubahan iklim global yang semakin meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem. Seluruh proses tersebut secara langsung memengaruhi produktivitas sumber daya pesisir serta menentukan pola adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Berbeda dengan masyarakat agraris yang memiliki pola produksi relatif lebih stabil, masyarakat pesisir hidup dalam sistem ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika alam sehingga keberhasilan aktivitas ekonomi mereka bergantung pada kondisi ekologi yang sering kali berada di luar kendali manusia. Fluktuasi hasil tangkapan ikan, perubahan musim penangkapan, meningkatnya intensitas gelombang tinggi, hingga penurunan kualitas ekosistem laut akibat pencemaran dan degradasi lingkungan

menyebabkan tingkat ketidakpastian ekonomi rumah tangga pesisir menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Food and Agriculture Organization (FAO, 2022) menegaskan bahwa sektor perikanan skala kecil merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sangat bergantung pada stabilitas ekosistem laut dan ketersediaan sumber daya perikanan.

Kompleksitas kehidupan masyarakat pesisir tidak hanya tercermin dari hubungan mereka dengan lingkungan alam, tetapi juga dari pola interaksi sosial yang berkembang di dalam komunitas. Kehidupan sosial masyarakat pesisir umumnya dibangun melalui jaringan kekerabatan yang kuat, budaya gotong royong, solidaritas sosial, serta tradisi maritim yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut membentuk modal sosial (*social capital*) yang berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam memperkuat ketahanan masyarakat ketika menghadapi berbagai tekanan ekonomi maupun bencana alam. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan seperangkat nilai, norma, kepercayaan, dan jaringan sosial yang mampu meningkatkan efektivitas kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan masyarakat pesisir, modal sosial tersebut tampak melalui berbagai praktik kolektif, seperti kerja sama dalam kegiatan melaut, saling berbagi informasi mengenai daerah penangkapan ikan,

pembentukan kelompok nelayan, koperasi perikanan, kelompok usaha perempuan, hingga mekanisme gotong royong dalam menghadapi bencana maupun kesulitan ekonomi. Kehadiran modal sosial tersebut menjadi aset yang tidak ternilai karena mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi.

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, masyarakat pesisir memiliki pola pembagian kerja yang bersifat komplementer dan saling melengkapi antaranggota keluarga. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertumpu pada pekerjaan laki-laki sebagai nelayan, tetapi juga melibatkan perempuan, anak, maupun anggota keluarga lainnya dalam berbagai aktivitas produktif yang membentuk rantai nilai (*value chain*) sektor perikanan. Laki-laki umumnya bertanggung jawab terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut, sedangkan perempuan menjalankan berbagai kegiatan pascapanen, seperti penyortiran, pembersihan, pengawetan, pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga. Pembagian kerja tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi pesisir merupakan sistem yang dibangun melalui kolaborasi keluarga, di mana setiap anggota memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Béné (2006) menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan tidak hanya ditentukan oleh

besarnya hasil tangkapan ikan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam melakukan diversifikasi usaha, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil laut, serta mengelola pendapatan secara efisien untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka relatif tertinggal dibandingkan masyarakat di sektor lain. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam menjadikan pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan musim, kenaikan harga bahan bakar minyak, penurunan stok ikan akibat praktik penangkapan berlebih (*overfishing*), pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, hingga perubahan kebijakan ekonomi yang memengaruhi distribusi hasil perikanan. Situasi tersebut menciptakan siklus kerentanan ekonomi yang berlangsung secara berulang sehingga rumah tangga nelayan sering mengalami kesulitan dalam membangun stabilitas pendapatan maupun meningkatkan akumulasi aset produktif. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan masih termasuk kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang relatif tinggi, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses

terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, teknologi, serta pembiayaan usaha.

Tantangan tersebut semakin diperberat oleh dampak perubahan iklim global yang dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah karakteristik lingkungan pesisir secara signifikan. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa kawasan pesisir merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap kenaikan muka air laut, peningkatan intensitas badai tropis, abrasi pantai, perubahan pola curah hujan, intrusi air laut ke lahan pertanian, serta degradasi ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dampak ekologis tersebut tidak hanya mengurangi produktivitas sumber daya perikanan, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan mata pencaharian, kerusakan permukiman, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta meningkatnya angka kemiskinan di kawasan pesisir. Oleh karena itu, pembangunan wilayah pesisir pada masa mendatang tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya semata, melainkan harus mengintegrasikan prinsip konservasi lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan sistem sosial-ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Di balik berbagai tantangan tersebut, wilayah pesisir sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola berdasarkan prinsip keberlanjutan. Selain sektor perikanan tangkap, kawasan pesisir memiliki peluang pengembangan budidaya perikanan, industri pengolahan hasil laut, ekonomi kreatif berbasis budaya maritim, ekowisata bahari, jasa lingkungan, konservasi pesisir, hingga berbagai bentuk usaha mikro yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan berbagai sektor tersebut memerlukan tata kelola yang mengedepankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, inovasi teknologi, kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Ostrom (1990) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan harus dibangun melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan inovasi ilmiah sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut dapat dipahami bahwa wilayah pesisir merupakan suatu sistem

sosial-ekologis yang memiliki kompleksitas tinggi karena mempertemukan berbagai dimensi lingkungan, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan teknologi dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi. Kompleksitas tersebut mengharuskan setiap kebijakan pembangunan wilayah pesisir disusun melalui pendekatan yang bersifat holistik, integratif, dan berorientasi jangka panjang, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan masyarakat, melestarikan ekosistem pesisir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan sosial, serta menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat pesisir. Sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembangunan kawasan pesisir pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan yang berkeadilan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (United Nations, 2015).

1.2 Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga Pesisir

Perempuan pesisir merupakan salah satu aktor pembangunan yang memiliki kontribusi sangat penting

dalam menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan. Meskipun demikian, dalam berbagai kajian maupun kebijakan pembangunan, kontribusi perempuan sering kali masih diposisikan sebagai pelengkap aktivitas ekonomi laki-laki, padahal kenyataannya perempuan memainkan peran yang jauh lebih luas daripada sekadar mengelola urusan domestik keluarga. Perempuan tidak hanya menjalankan fungsi reproduktif dalam rumah tangga, tetapi juga menjalankan fungsi produktif melalui berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga, sekaligus menjalankan fungsi sosial dalam membangun kohesi komunitas, menjaga keberlanjutan tradisi lokal, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat pesisir (FAO, 2022).

Dalam kehidupan masyarakat pesisir, perempuan terlibat hampir pada seluruh mata rantai ekonomi perikanan, dimulai dari kegiatan pascapanen seperti membersihkan, memilah, mengawetkan, mengolah, mengemas, hingga memasarkan hasil perikanan kepada konsumen. Bahkan dalam perkembangan ekonomi digital, perempuan semakin aktif mengembangkan usaha mikro berbasis hasil laut melalui pemasaran daring, promosi digital, serta pemanfaatan berbagai platform perdagangan elektronik. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa

perempuan bukan hanya berfungsi sebagai tenaga pendukung dalam kegiatan ekonomi keluarga, melainkan sebagai pencipta nilai tambah (value creator) yang mampu meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk perikanan lokal (Porter, 1985).

Kontribusi perempuan menjadi semakin penting ketika rumah tangga menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat perubahan musim penangkapan ikan maupun berbagai gangguan lingkungan yang memengaruhi produktivitas sektor kelautan. Dalam situasi demikian, perempuan sering kali menjadi sumber stabilitas ekonomi keluarga melalui aktivitas usaha mikro, perdagangan kecil, produksi makanan olahan, kerajinan tangan, maupun jasa berbasis komunitas. Diversifikasi sumber pendapatan yang dilakukan perempuan terbukti mampu mengurangi tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak, pelayanan kesehatan, hingga investasi usaha di masa mendatang. Sen (1999) menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperluas kapabilitas keluarga dalam mencapai kehidupan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Selain menjalankan aktivitas produktif, perempuan juga memiliki fungsi strategis sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Berbagai keputusan mengenai

pengalokasian pendapatan, pengelolaan tabungan, pemanfaatan modal usaha, pengendalian konsumsi, hingga strategi bertahan pada saat terjadi penurunan pendapatan umumnya berada dalam kendali perempuan. Kemampuan tersebut menjadikan perempuan sebagai pengelola risiko ekonomi keluarga yang berperan menjaga kesinambungan kehidupan rumah tangga dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi.

Meskipun memiliki kontribusi yang sangat besar, perempuan pesisir masih menghadapi berbagai hambatan struktural berupa rendahnya akses terhadap pendidikan, keterbatasan kepemilikan aset produktif, kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta masih kuatnya konstruksi sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan potensi ekonomi perempuan belum berkembang secara optimal, meskipun mereka memiliki pengalaman, keterampilan, dan jaringan sosial yang kuat dalam mengembangkan usaha berbasis komunitas. Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan merupakan proses transformasi yang memungkinkan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, memiliki kemampuan mengambil keputusan, serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas ekonomi perempuan pesisir menjadi salah satu strategi yang sangat penting karena dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan anak, memperbaiki status kesehatan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Oleh sebab itu, perempuan harus dipandang sebagai subjek utama pembangunan ekonomi pesisir yang memiliki kemampuan untuk menjadi inovator, wirausahawan, pengelola sumber daya, sekaligus agen perubahan sosial yang mampu mendorong terciptanya pembangunan wilayah pesisir yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.3 Potensi dan Karakteristik UMKM Pesisir

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi utama dalam struktur perekonomian Indonesia karena memiliki kemampuan yang relatif tinggi dalam menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan masyarakat secara lebih merata, serta menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika sektor-sektor formal mengalami perlambatan. Dalam konteks masyarakat pesisir, keberadaan UMKM tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi berskala kecil yang bertujuan menghasilkan keuntungan, melainkan juga

sebagai mekanisme adaptasi rumah tangga terhadap tingginya ketidakpastian pendapatan yang bersumber dari sektor perikanan tangkap. Bagi sebagian besar keluarga nelayan, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku usaha, UMKM berfungsi sebagai strategi diversifikasi mata pencaharian yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga ketika hasil tangkapan mengalami penurunan akibat perubahan musim, cuaca ekstrem, maupun fluktuasi harga komoditas perikanan. Tambunan (2019) menjelaskan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain menjadi penyedia lapangan kerja terbesar, sektor ini juga berperan dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah.

Karakteristik UMKM yang berkembang di kawasan pesisir menunjukkan kekhasan yang membedakannya dari usaha kecil pada sektor ekonomi lainnya. Sebagian besar usaha tersebut tumbuh secara organik berdasarkan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam pesisir, sehingga proses produksinya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, garam, maupun berbagai hasil laut lainnya. Ketergantungan terhadap sumber daya lokal tersebut mencerminkan adanya hubungan yang erat antara keberlanjutan lingkungan

pesisir dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, produktivitas UMKM pesisir tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pelaku usaha, tetapi juga oleh kondisi ekosistem laut yang menjadi sumber utama bahan baku produksi.

Di samping penggunaan bahan baku lokal, UMKM pesisir umumnya memiliki karakteristik berupa skala usaha yang relatif kecil, struktur organisasi yang sederhana, penggunaan teknologi produksi yang masih bersifat tradisional, serta keterlibatan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Model usaha seperti ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya operasional, namun pada saat yang sama membatasi kapasitas produksi, efisiensi usaha, dan kemampuan untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Sebagian besar keputusan usaha masih bergantung pada pengalaman empiris pelaku usaha, sementara penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti perencanaan bisnis, pengendalian mutu, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran, belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama UMKM pesisir bukan hanya terletak pada aspek permodalan, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan mengelola usaha secara profesional.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang baru bagi

transformasi UMKM pesisir melalui pemanfaatan ekosistem digital. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), media sosial, layanan pembayaran digital, hingga sistem logistik yang semakin berkembang memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran tanpa harus bergantung pada pasar tradisional atau jaringan distribusi konvensional. Digitalisasi juga membuka peluang bagi perempuan pesisir untuk membangun identitas merek, memperkenalkan produk khas daerah kepada konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi promosi dengan biaya yang relatif rendah. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar, penguatan sistem pemasaran, serta peningkatan efisiensi operasional usaha.

Potensi pengembangan UMKM pesisir sesungguhnya sangat besar apabila ditinjau dari keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia serta kekayaan sumber daya kelautan yang sangat beragam. Berbagai produk olahan berbasis hasil laut, seperti ikan asap, abon ikan, kerupuk ikan, terasi, makanan siap saji berbahan rumput laut, hingga produk kosmetik dan kesehatan berbasis biota laut menunjukkan peluang pasar yang terus

berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap produk pangan bernilai tambah. Selain itu, pemanfaatan limbah hasil perikanan sebagai bahan baku kerajinan, pupuk organik, maupun produk ekonomi kreatif mencerminkan berkembangnya paradigma ekonomi sirkular (*circular economy*) yang mengedepankan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengurangan limbah produksi. FAO (2022) menjelaskan bahwa pengembangan rantai nilai (*value chain*) pada sektor perikanan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Potensi lain yang semakin berkembang adalah integrasi antara UMKM dengan sektor pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman lokal mendorong berkembangnya berbagai usaha kuliner pesisir, kerajinan tradisional, homestay, wisata edukasi pengolahan hasil laut, hingga ekowisata mangrove yang dikelola langsung oleh masyarakat. Integrasi tersebut memperlihatkan bahwa UMKM pesisir tidak lagi hanya berorientasi pada produksi barang, tetapi mulai berkembang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang menghubungkan sektor perikanan, budaya lokal, jasa pariwisata, dan ekonomi digital secara simultan.

Meskipun memiliki prospek yang sangat menjanjikan, sebagian besar UMKM pesisir masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat peningkatan daya saing. Rendahnya kapasitas inovasi produk, keterbatasan penerapan standar mutu, belum optimalnya kepemilikan sertifikasi halal maupun izin edar, lemahnya legalitas usaha, sulitnya memperoleh pembiayaan formal, serta terbatasnya kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi persoalan yang masih banyak ditemukan pada berbagai wilayah pesisir di Indonesia. Di samping itu, tingginya ketergantungan terhadap bahan baku musiman menyebabkan kontinuitas produksi sering kali terganggu sehingga pelaku usaha kesulitan memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar maupun secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan UMKM pesisir memerlukan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan inovasi produk, penguatan kelembagaan koperasi, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan jejaring bisnis, serta transformasi digital harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah pesisir. Pendekatan tersebut akan memperbesar peluang UMKM untuk berkembang dari sekadar usaha subsisten menjadi usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan pendapatan rumah tangga, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi pesisir pada tingkat nasional maupun global.

1.4 Tantangan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Pembangunan ekonomi masyarakat pesisir berlangsung dalam konteks yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan yang saling berkaitan. Berbeda dengan sektor ekonomi lain yang relatif memiliki kepastian produksi, kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi sumber daya alam yang bersifat dinamis sehingga perubahan kecil pada lingkungan laut dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang besar bagi rumah tangga. Oleh sebab itu, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir tidak dapat dianalisis secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari suatu sistem yang memperlihatkan hubungan erat antara kemiskinan, kerentanan sosial, dan degradasi lingkungan.

Dari perspektif ekonomi, salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pesisir adalah tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan akibat karakteristik sektor perikanan yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, fluktuasi harga komoditas, biaya operasional, dan perubahan permintaan pasar. Ketergantungan yang tinggi terhadap hasil tangkapan menyebabkan sebagian besar

rumah tangga nelayan memiliki kapasitas yang terbatas dalam melakukan perencanaan ekonomi jangka panjang. Situasi tersebut sering kali diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sehingga masyarakat lebih banyak bergantung pada sistem pinjaman informal yang berpotensi menciptakan hubungan ekonomi yang tidak seimbang. Menurut Chambers (1983), kemiskinan pedesaan merupakan kondisi multidimensional yang ditandai oleh keterbatasan aset produktif, tingginya tingkat kerentanan, serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk guncangan ekonomi.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya dampak perubahan iklim yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu global paling penting bagi keberlanjutan kawasan pesisir. Kenaikan muka air laut, meningkatnya intensitas badai, abrasi pantai, intrusi air laut, perubahan pola arus, serta bergesernya musim penangkapan ikan menyebabkan produktivitas sektor perikanan mengalami penurunan di berbagai wilayah. Penurunan hasil tangkapan tersebut tidak hanya berdampak pada nelayan sebagai pelaku utama penangkapan, tetapi juga memengaruhi seluruh rantai nilai perikanan, termasuk perempuan yang menjalankan usaha pengolahan hasil laut karena berkurangnya pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi. Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menegaskan bahwa kawasan pesisir merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim global sehingga membutuhkan strategi adaptasi yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Dari dimensi sosial, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai persoalan berupa rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, lemahnya infrastruktur dasar, ketimpangan gender, serta sempitnya peluang kerja di luar sektor perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga memiliki pilihan ekonomi yang terbatas ketika sektor utama mengalami tekanan. Dalam situasi demikian, perempuan sering kali menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku ekonomi produktif melalui berbagai aktivitas usaha berskala mikro. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi, namun pada saat yang sama menghadapi beban kerja yang lebih besar dibandingkan anggota rumah tangga lainnya. Fakih (2013) menyatakan bahwa ketimpangan gender dalam pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kerja, tetapi juga menyangkut akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, serta posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selain tantangan sosial dan ekonomi, kerusakan lingkungan pesisir menjadi faktor yang semakin memperbesar tingkat kerentanan masyarakat. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali, pencemaran akibat limbah domestik dan industri, konversi hutan mangrove menjadi kawasan budidaya maupun permukiman, serta menurunnya kualitas ekosistem pesisir secara bertahap mengurangi kemampuan alam dalam menyediakan berbagai jasa lingkungan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Menurunnya produktivitas ekosistem laut tidak hanya berdampak terhadap hasil tangkapan, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha mikro yang bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan secara seimbang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan berlangsung secara berkelanjutan apabila dilakukan dengan mengorbankan kualitas ekosistem pesisir. Sebaliknya, konservasi lingkungan juga tidak akan berhasil tanpa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pembangunan pesisir harus diarahkan pada penguatan kapasitas adaptasi masyarakat, diversifikasi ekonomi, pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan, serta pengembangan kebijakan publik yang

mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

1.5 Kerangka Konseptual Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan suatu proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengakses, mengelola, dan mengendalikan berbagai sumber daya ekonomi sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan atau kepemilikan usaha, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas individu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses terhadap pendidikan, teknologi, pembiayaan, informasi pasar, serta peningkatan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan yang sesungguhnya adalah proses memperluas kebebasan manusia untuk menentukan pilihan hidupnya, sehingga pemberdayaan ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari perluasan kapasitas (*capability expansion*) yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), terutama tujuan mengenai kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengurangan ketimpangan sosial (United Nations, 2015). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kesetaraan gender, melainkan sebagai strategi pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir dalam kajian ini dibangun atas keterkaitan empat bentuk modal pembangunan, yaitu modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal kelembagaan (*institutional capital*). Keempat modal tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kapasitas perempuan untuk mengembangkan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Modal manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, keterampilan teknis, kemampuan kewirausahaan, literasi digital, serta kemampuan

berinovasi. Modal sosial tercermin dalam jaringan kerja sama, rasa saling percaya, partisipasi kelompok, dan keberadaan organisasi masyarakat yang memperkuat akses perempuan terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Modal ekonomi berkaitan dengan kepemilikan aset produktif, akses terhadap pembiayaan, tabungan, maupun kesempatan memperoleh modal usaha, sedangkan modal kelembagaan mencakup dukungan regulasi, kebijakan pemerintah, keberadaan koperasi, lembaga keuangan, serta sistem pendampingan usaha yang memungkinkan perempuan berkembang secara berkelanjutan. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan elemen penting dalam pembangunan karena jaringan, norma, dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat mampu meningkatkan efektivitas kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan antarkomponen tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas individu tidak akan menghasilkan perubahan yang optimal apabila tidak didukung oleh lingkungan kelembagaan yang kondusif. Perempuan yang memiliki keterampilan tinggi tetap akan menghadapi hambatan apabila akses terhadap pembiayaan terbatas, pasar tidak berkembang, kebijakan publik belum responsif terhadap kebutuhan perempuan, atau infrastruktur pendukung masih belum memadai. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang progresif juga tidak

akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan pendekatan sistemik yang menghubungkan berbagai aktor pembangunan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal dalam suatu ekosistem pembangunan yang saling mendukung.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir tidak semata-mata diukur melalui meningkatnya omzet usaha atau pendapatan keluarga, tetapi juga melalui perubahan yang lebih mendasar berupa meningkatnya kualitas hidup, bertambahnya kesempatan pendidikan bagi anggota keluarga, menguatnya posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, berkembangnya jaringan usaha, meningkatnya kapasitas adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan, serta terbentuknya sistem ekonomi pesisir yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan merupakan investasi sosial jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan pada masa mendatang.

BAB 2
Dinamika Sosial Ekonomi Perempuan Di Wilayah Pesisir

2.1 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan suatu entitas sosial yang terbentuk melalui proses interaksi historis yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang antara manusia dengan lingkungan pesisir dan laut, sehingga menghasilkan sistem kehidupan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat agraris maupun masyarakat perkotaan. Kedekatan geografis dengan laut menjadikan sumber daya kelautan sebagai basis utama kehidupan, sehingga pola pemanfaatan ruang, pembagian kerja, hubungan sosial, sistem pengetahuan lokal, hingga nilai-nilai budaya berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika lingkungan yang sarat dengan ketidakpastian. Dalam konteks tersebut, laut tidak hanya dipahami sebagai ruang produksi yang menyediakan sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk identitas kolektif, sistem kepercayaan, dan orientasi hidup masyarakat. Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat pesisir tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi, melainkan harus dipahami

sebagai hasil interaksi multidimensional antara kondisi ekologis, sejarah pemanfaatan sumber daya, kebudayaan lokal, kelembagaan masyarakat, dan relasi kekuasaan yang berkembang di dalam komunitas (Kusnadi, 2015).

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, struktur sosial menggambarkan pola hubungan yang relatif stabil antarkelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, serta distribusi peran dan status yang membentuk kehidupan masyarakat. Pada masyarakat pesisir, struktur tersebut bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan alam, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta kebijakan pembangunan yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut menyebabkan setiap perubahan ekologis, seperti fluktuasi hasil tangkapan, perubahan musim, cuaca ekstrem, degradasi ekosistem pesisir, maupun kenaikan muka air laut, secara langsung memengaruhi organisasi sosial, strategi bertahan hidup, hingga hubungan ekonomi di dalam komunitas. Kusnadi (2015) menegaskan bahwa masyarakat pesisir merupakan kelompok sosial yang memiliki karakter adaptif karena kehidupannya senantiasa dipengaruhi oleh dinamika pemanfaatan sumber daya kelautan, sehingga membentuk pola kerja, solidaritas sosial, dan mekanisme penghidupan yang khas dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Karakter adaptif tersebut menjadikan masyarakat pesisir memiliki kapasitas untuk membangun berbagai mekanisme sosial dalam menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian hasil tangkapan, perubahan harga komoditas perikanan, maupun risiko bencana alam mendorong masyarakat mengembangkan sistem kerja sama, pembagian risiko, dan pola hubungan sosial yang memungkinkan mereka mempertahankan keberlangsungan hidup. Dengan demikian, struktur sosial masyarakat pesisir sesungguhnya merupakan refleksi dari kemampuan komunitas dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terus berlangsung, baik yang berasal dari faktor alam maupun dari transformasi ekonomi dan politik pada tingkat regional, nasional, maupun global.

Salah satu unsur yang membentuk struktur sosial masyarakat pesisir adalah sistem stratifikasi sosial yang berkembang berdasarkan tingkat penguasaan terhadap sumber daya ekonomi dan alat-alat produksi. Dalam komunitas nelayan, kepemilikan kapal, perahu, alat tangkap, modal usaha, akses terhadap jaringan pemasaran, serta kemampuan memperoleh informasi mengenai pasar menjadi faktor-faktor yang menentukan posisi sosial seseorang di dalam masyarakat. Nelayan pemilik modal atau juragan umumnya menempati lapisan sosial yang lebih tinggi karena memiliki kendali terhadap sarana produksi sekaligus menentukan mekanisme distribusi hasil

tangkapan. Sebaliknya, nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK) berada pada posisi yang lebih rendah karena bergantung pada pemilik modal dalam memperoleh pekerjaan maupun pendapatan. Struktur sosial semacam ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya ekonomi berimplikasi langsung terhadap distribusi kekuasaan, pengaruh, dan kesempatan dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Stratifikasi sosial tersebut tidak hanya menciptakan perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, teknologi, pembiayaan, serta peluang mengembangkan usaha di luar sektor penangkapan ikan. Rumah tangga yang memiliki modal ekonomi relatif besar umumnya lebih mudah melakukan diversifikasi usaha melalui investasi pada kegiatan budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, perdagangan, maupun sektor jasa. Sebaliknya, kelompok nelayan kecil sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya produktif sehingga mobilitas sosial mereka berlangsung lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat pesisir masih diwarnai oleh ketimpangan distribusi aset produktif yang berimplikasi terhadap keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan ekonomi yang berkembang di dalam masyarakat pesisir pada banyak wilayah masih

memperlihatkan pola patron-klien yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hubungan tersebut terbentuk ketika pemilik modal menyediakan kapal, alat tangkap, modal operasional, maupun pinjaman konsumsi kepada nelayan kecil yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Sebagai konsekuensinya, nelayan berkewajiban menjual hasil tangkapan kepada patron atau bekerja secara berkelanjutan di bawah kendali pemilik modal tersebut. Scott (1976) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien berkembang sebagai bentuk mekanisme perlindungan sosial di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan lembaga formal. Patron tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pekerjaan, tetapi juga menjadi penyedia bantuan ketika keluarga nelayan menghadapi masa paceklik, gagal melaut, atau mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana.

Meskipun hubungan patron-klien memberikan rasa aman bagi kelompok nelayan kecil melalui adanya jaminan pekerjaan dan bantuan sosial, hubungan tersebut juga mengandung konsekuensi berupa ketergantungan ekonomi yang dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat. Ketergantungan terhadap modal, pasar, maupun pinjaman menyebabkan sebagian nelayan memiliki ruang yang terbatas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi atau mengembangkan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi yang

dikembangkan pemerintah dan lembaga masyarakat pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas nelayan agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap sistem patronase melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan formal, penguatan kelembagaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.

Selain faktor ekonomi, struktur sosial masyarakat pesisir juga dibangun oleh sistem kekerabatan yang relatif kuat. Hubungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai ikatan biologis, tetapi berkembang menjadi mekanisme distribusi sumber daya, transfer pengetahuan, pewarisan keterampilan, perlindungan sosial, hingga pengembangan usaha keluarga. Aktivitas penangkapan ikan, pengolahan hasil laut, pemasaran produk, maupun pengelolaan usaha rumah tangga sering kali dilakukan melalui kerja sama antaranggota keluarga sehingga menciptakan sistem produksi berbasis rumah tangga yang menjadi ciri khas ekonomi pesisir. Pola tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit sosial sekaligus unit ekonomi yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Kekuatan hubungan kekerabatan tersebut diperkuat oleh tingginya tingkat kepercayaan (*trust*) yang berkembang di dalam komunitas. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti transaksi perdagangan, kerja sama produksi, pembagian

hasil, maupun pengelolaan kelompok usaha bersama. Putnam (1993) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan salah satu elemen utama modal sosial yang memungkinkan masyarakat membangun koordinasi dan kerja sama secara lebih efektif. Tingginya tingkat kepercayaan di dalam masyarakat pesisir mengurangi biaya transaksi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama melalui mekanisme kolektif.

Karakteristik lain yang menonjol dalam struktur sosial masyarakat pesisir adalah berkembangnya solidaritas sosial yang tinggi sebagai konsekuensi dari kesamaan pengalaman menghadapi risiko kehidupan. Ketidakpastian cuaca, ancaman bencana, fluktuasi pendapatan, serta ketergantungan terhadap kondisi alam menumbuhkan kesadaran bahwa keberlangsungan hidup tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada dukungan komunitas. Kesadaran tersebut melahirkan berbagai bentuk kerja sama, seperti gotong royong membangun rumah, memperbaiki kapal, membantu keluarga yang mengalami musibah, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, maupun mengorganisasi kegiatan sosial lainnya. Émile Durkheim (1893) menyebut bentuk keterikatan tersebut sebagai solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang tumbuh karena adanya kesamaan

pengalaman hidup, nilai-nilai budaya, serta orientasi kehidupan yang dimiliki oleh anggota masyarakat.

Dalam konteks masyarakat pesisir Indonesia, solidaritas sosial juga tercermin melalui keberadaan berbagai kelembagaan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif. Di beberapa daerah berkembang aturan adat mengenai waktu penangkapan ikan, pembagian wilayah tangkap, larangan eksploitasi sumber daya tertentu, maupun mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan keteraturan sosial. Keberadaan kelembagaan lokal tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat pesisir tidak hanya dibangun oleh hubungan ekonomi, tetapi juga oleh norma budaya dan nilai-nilai lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan komunitas.

Namun demikian, struktur sosial masyarakat pesisir pada era kontemporer mengalami transformasi yang semakin kompleks sebagai dampak dari modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta penetrasi mekanisme pasar. Penggunaan teknologi penangkapan yang lebih modern, berkembangnya sistem perdagangan digital, meningkatnya investasi di sektor kelautan, serta terbukanya akses terhadap informasi menyebabkan pola hubungan sosial yang sebelumnya

sangat komunal mulai mengalami diferensiasi. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan mengakses teknologi, pendidikan, modal, dan jaringan pemasaran cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan lebih cepat dibandingkan kelompok yang masih mengandalkan metode produksi tradisional. Kondisi tersebut melahirkan bentuk-bentuk stratifikasi sosial baru yang tidak hanya didasarkan pada kepemilikan alat tangkap, tetapi juga pada penguasaan pengetahuan, teknologi, serta akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan.

Transformasi sosial tersebut diperkuat oleh meningkatnya akses pendidikan dan berkembangnya diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketergantungan rumah tangga terhadap aktivitas penangkapan ikan secara perlahan mulai berkurang seiring berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi alternatif, seperti budidaya perikanan, pengolahan hasil laut, perdagangan, jasa transportasi laut, pariwisata bahari berbasis masyarakat, hingga usaha mikro yang dikelola oleh perempuan. Diversifikasi tersebut meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengurangi risiko ekonomi akibat fluktuasi hasil tangkapan sekaligus menciptakan peluang munculnya kelompok sosial baru yang memperoleh status berdasarkan keberhasilan mengembangkan aktivitas ekonomi nonperikanan.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga mengubah pola interaksi masyarakat pesisir dengan pasar. Pelaku usaha kini memiliki kesempatan memasarkan produk secara langsung kepada konsumen melalui platform digital tanpa bergantung sepenuhnya pada jaringan perdagangan tradisional. Perubahan tersebut memberikan peluang peningkatan pendapatan, namun juga menuntut peningkatan kapasitas masyarakat dalam menguasai teknologi informasi, manajemen usaha, dan pemasaran digital. Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat pesisir saat ini tidak lagi dapat dipahami sebagai struktur yang bersifat homogen, melainkan sebagai sistem sosial yang semakin kompleks, ditandai oleh meningkatnya diferensiasi pekerjaan, berkembangnya bentuk-bentuk kelembagaan baru, serta semakin luasnya hubungan masyarakat dengan sistem ekonomi nasional maupun global.

Dengan demikian, struktur sosial masyarakat pesisir merupakan hasil dari proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara faktor ekologis, ekonomi, budaya, kelembagaan, dan perubahan sosial yang berkembang pada berbagai tingkatan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat pesisir senantiasa berada dalam proses adaptasi terhadap dinamika lingkungan sekaligus transformasi pembangunan yang berlangsung semakin cepat. Oleh karena itu, setiap

kebijakan pembangunan wilayah pesisir perlu mempertimbangkan karakteristik struktur sosial yang ada agar program pemberdayaan, pengembangan UMKM, maupun pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilaksanakan secara lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2 Pembagian Peran Gender dalam Aktivitas Ekonomi

Pembagian peran gender dalam masyarakat pesisir merupakan fenomena sosial yang terbentuk melalui proses konstruksi budaya yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, laki-laki secara umum ditempatkan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas penangkapan ikan di laut, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan domestik yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Pola pembagian kerja tersebut sering kali dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak dapat diubah, padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh sistem nilai dan norma budaya yang berkembang dalam masyarakat. Fakih (2013) menegaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya bukan semata-mata ditentukan oleh faktor

biologis, melainkan merupakan produk sosial yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat pesisir, batas antara peran domestik dan peran produktif sesungguhnya tidak selalu tegas. Perempuan pesisir telah lama memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, meskipun kontribusi tersebut sering kali tidak terlihat secara formal dan kurang memperoleh pengakuan yang memadai. Keterlibatan perempuan dapat ditemukan hampir di seluruh rantai nilai sektor perikanan, mulai dari proses penanganan hasil tangkapan setelah pendaratan ikan, kegiatan pengolahan produk perikanan menjadi barang bernilai tambah, pemasaran hasil produksi, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi aktor utama yang memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh keluarga dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pendidikan anak, kesehatan, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya.

Peran ekonomi perempuan menjadi semakin penting ketika rumah tangga nelayan menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian hasil tangkapan. Karakteristik pekerjaan nelayan yang sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan pendapatan

keluarga sering mengalami fluktuasi yang tajam. Pada saat musim paceklik, cuaca buruk, atau terjadi penurunan hasil tangkapan akibat kerusakan lingkungan pesisir, perempuan sering kali mengambil inisiatif untuk mencari sumber pendapatan tambahan melalui berbagai kegiatan ekonomi berskala kecil. Mereka mengembangkan usaha pengolahan ikan asin, kerupuk ikan, abon ikan, terasi, makanan laut olahan, perdagangan kebutuhan pokok, hingga usaha mikro lainnya yang dapat dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai strategi utama rumah tangga dalam mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah berbagai ketidakpastian yang dihadapi.

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi melahirkan fenomena yang oleh Moser (1993) disebut sebagai *multiple roles* atau peran ganda, yaitu kondisi ketika perempuan harus menjalankan fungsi reproduktif, produktif, dan sosial secara bersamaan. Di satu sisi, perempuan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik yang meliputi pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta pemeliharaan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, mereka juga dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi guna menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu,

perempuan sering kali aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kelompok arisan, organisasi keagamaan, kelompok usaha bersama, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akumulasi berbagai tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam masyarakat pesisir sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang selama ini tercermin dalam statistik ekonomi formal.

Meskipun kontribusi ekonomi perempuan terus meningkat, relasi gender dalam masyarakat pesisir belum sepenuhnya mengalami transformasi yang seimbang. Dalam banyak rumah tangga, keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan kepemilikan aset produktif, investasi usaha, pembelian alat tangkap, maupun penggunaan pendapatan keluarga masih didominasi oleh laki-laki. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan tidak selalu diikuti oleh peningkatan posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan. Sen (1999) menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup diukur melalui peningkatan pendapatan semata, melainkan harus dilihat dari kemampuan perempuan untuk menentukan pilihan hidup, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, isu kesetaraan gender menjadi semakin penting karena perempuan terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga dan komunitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memperoleh akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, dan sumber pembiayaan, maka produktivitas ekonomi rumah tangga cenderung meningkat. Oleh sebab itu, berbagai program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi internasional diarahkan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam bidang kewirausahaan, pengolahan hasil perikanan, manajemen usaha, literasi keuangan, dan akses pasar.

Kehadiran berbagai program tersebut secara bertahap telah mengubah posisi perempuan dalam masyarakat pesisir dari sekadar pekerja keluarga yang tidak terlihat menjadi pelaku ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal. Perempuan pesisir kini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan ekonomi komunitas, dan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran gender dalam masyarakat pesisir tidak

dapat lagi ditempatkan dalam kerangka domestik semata, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari dinamika pembangunan sosial-ekonomi yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

2.3 Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan Keluarga

Kontribusi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga di kawasan pesisir merupakan salah satu fenomena sosial-ekonomi yang semakin memperoleh perhatian dalam berbagai kajian pembangunan karena menunjukkan adanya perubahan struktur peran dalam keluarga nelayan yang selama ini cenderung didominasi oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga oleh semakin tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut menjadikan pendapatan keluarga sangat sensitif terhadap berbagai faktor eksternal, seperti perubahan musim, cuaca ekstrem, degradasi ekosistem pesisir, fluktuasi harga hasil perikanan, hingga dinamika pasar yang semakin kompetitif. Dalam situasi yang demikian, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk pekerjaan tambahan (*supplementary income*), melainkan telah berkembang menjadi salah satu strategi adaptasi ekonomi

yang menentukan keberlangsungan hidup rumah tangga nelayan.

Transformasi peran perempuan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian kerja dalam keluarga pesisir mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya perempuan lebih banyak menjalankan fungsi domestik sebagai pengelola rumah tangga, saat ini mereka juga berperan sebagai pelaku ekonomi produktif yang secara aktif menciptakan sumber-sumber pendapatan baru melalui berbagai jenis usaha mikro berbasis potensi lokal. Aktivitas ekonomi yang dijalankan sangat beragam, mulai dari pengolahan ikan asin, pembuatan abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, ikan asap, terasi, hingga pengolahan rumput laut dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan menjual hasil tangkapan dalam bentuk segar. Melalui proses pengolahan tersebut, perempuan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan, tetapi juga memperpanjang umur simpan produk, mengurangi risiko kerugian akibat pembusukan, serta memperluas peluang pemasaran ke wilayah yang lebih luas.

Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, aktivitas produktif yang dilakukan perempuan memberikan kontribusi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar penambahan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut menjadi instrumen penting dalam

menjaga kesinambungan konsumsi rumah tangga ketika hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan akibat faktor musim atau cuaca. Dengan adanya sumber pendapatan alternatif, keluarga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, pelayanan kesehatan, pembayaran biaya transportasi, maupun kebutuhan sosial lainnya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan menjalankan fungsi sebagai *economic stabilizer*, yaitu aktor yang membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga ketika terjadi tekanan eksternal terhadap mata pencaharian utama.

Peran perempuan dalam rantai nilai sektor perikanan juga memiliki dimensi yang sangat luas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menegaskan bahwa perempuan merupakan aktor utama pada tahapan pascapanen, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan, sehingga kontribusinya sangat menentukan keberhasilan sistem perikanan secara keseluruhan. FAO (2022) menyebutkan bahwa perempuan menyumbang proporsi tenaga kerja yang sangat besar dalam sektor pascapanen perikanan dan memiliki peranan strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kehilangan hasil produksi, serta memperkuat ekonomi keluarga nelayan. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari sistem produksi perikanan.

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga juga harus dipahami melalui perspektif pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam banyak keluarga nelayan, perempuan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur alokasi pengeluaran, menentukan prioritas kebutuhan, mengelola tabungan, serta memastikan bahwa sumber daya ekonomi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien. Kemampuan perempuan dalam melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga sering kali menjadi faktor yang membedakan tingkat ketahanan ekonomi antar rumah tangga pesisir. Ketika pendapatan keluarga mengalami penurunan, perempuan umumnya melakukan berbagai bentuk penyesuaian konsumsi, mengurangi pengeluaran yang bersifat non-prioritas, sekaligus mempertahankan kebutuhan dasar agar kesejahteraan anggota keluarga tetap terjaga. Menurut Becker (1981), keputusan ekonomi dalam rumah tangga merupakan hasil dari proses alokasi sumber daya yang mempertimbangkan efisiensi sekaligus kesejahteraan seluruh anggota keluarga, sehingga pengelolaan ekonomi domestik memiliki

pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup rumah tangga.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi juga berfungsi sebagai strategi diversifikasi mata pencaharian yang memperkuat resiliensi ekonomi keluarga. Rumah tangga yang hanya mengandalkan satu sumber pendapatan cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk guncangan ekonomi dibandingkan rumah tangga yang memiliki beberapa sumber penghasilan. Béné (2006) menjelaskan bahwa diversifikasi mata pencaharian merupakan mekanisme adaptasi yang umum dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat ketidakpastian sumber daya perikanan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan dapat dipandang sebagai bentuk investasi sosial yang meningkatkan kapasitas adaptasi keluarga terhadap perubahan lingkungan maupun gejolak ekonomi.

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga pada akhirnya memiliki implikasi yang melampaui aspek ekonomi semata. Peningkatan pendapatan rumah tangga memberikan peluang yang lebih besar bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak, memperbaiki status kesehatan, memperluas akses terhadap layanan publik, serta mengurangi risiko kemiskinan antargenerasi.

Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut perluasan kemampuan (*capabilities*) individu dalam menentukan pilihan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi perempuan di kawasan pesisir harus dipahami sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara lebih luas.

2.4 Kemiskinan dan Kerentanan Rumah Tangga Pesisir

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir merupakan fenomena yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kemiskinan pada wilayah perkotaan maupun pedesaan secara umum. Paradoks yang sering ditemukan adalah bahwa masyarakat yang hidup di wilayah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah justru masih menghadapi tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan potensi sumber daya kelautan tidak secara otomatis mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila tidak diimbangi dengan akses yang memadai terhadap modal usaha, teknologi produksi, infrastruktur, pendidikan, jaringan pemasaran, dan kebijakan publik yang mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan masyarakat pesisir tidak dapat dipahami hanya berdasarkan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi harus dianalisis sebagai persoalan multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Chambers (1983) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang ditandai oleh adanya keterbatasan aset produktif, tingginya tingkat kerentanan terhadap risiko, rendahnya daya tawar sosial, serta keterisolasian dari berbagai peluang pembangunan. Dengan demikian, rumah tangga nelayan sering kali menghadapi lingkaran kemiskinan yang sulit diputus karena berbagai keterbatasan tersebut saling memperkuat satu sama lain.

Tingkat kerentanan ekonomi masyarakat pesisir semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim global yang memengaruhi produktivitas sektor perikanan. Cuaca ekstrem, peningkatan tinggi gelombang, perubahan pola migrasi ikan, serta kerusakan ekosistem pesisir menyebabkan aktivitas penangkapan menjadi semakin tidak menentu sehingga pendapatan nelayan mengalami fluktuasi yang tinggi. Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan yang besar terhadap sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. IPCC (2023) menegaskan bahwa masyarakat pesisir termasuk kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim

karena memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang sensitif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam situasi tersebut, perempuan sering kali menghadapi beban yang lebih berat dibandingkan anggota keluarga lainnya. Selain menjalankan fungsi reproduktif melalui pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak, perempuan juga dituntut untuk mencari alternatif sumber pendapatan guna mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya *double burden*, yaitu beban domestik dan produktif yang dijalankan secara bersamaan. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi melalui pengembangan usaha mikro, diversifikasi mata pencaharian, penguatan jaringan sosial, serta pengelolaan keuangan rumah tangga secara lebih efisien (UN Women, 2021). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

2.5 Modal Sosial sebagai Penyangga Kehidupan Ekonomi

Dalam berbagai kajian pembangunan masyarakat, modal sosial dipandang sebagai salah satu sumber daya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan aktivitas ekonomi, khususnya pada komunitas yang

memiliki keterbatasan modal finansial dan akses terhadap lembaga formal. Berbeda dengan modal fisik yang berbentuk aset material maupun modal manusia yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan individu, modal sosial bertumpu pada kualitas hubungan sosial yang terbentuk melalui kepercayaan, norma, jaringan kerja sama, dan nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam suatu komunitas. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan hubungan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang mempermudah koordinasi serta kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pada masyarakat pesisir, modal sosial berkembang melalui berbagai bentuk kelembagaan lokal seperti kelompok nelayan, koperasi, kelompok pengolah hasil perikanan, arisan, kegiatan gotong royong, organisasi perempuan, maupun forum keagamaan yang secara tidak langsung menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan solidaritas sosial. Hubungan yang terjalin di dalam jaringan tersebut memungkinkan anggota masyarakat memperoleh bantuan tenaga kerja, akses terhadap informasi pasar, peluang memperoleh modal usaha, hingga dukungan sosial ketika menghadapi berbagai bentuk krisis ekonomi maupun bencana alam.

Bagi perempuan pesisir, modal sosial memiliki arti yang jauh lebih strategis karena mampu mengatasi berbagai keterbatasan struktural yang selama ini menghambat

pengembangan usaha. Melalui kelompok usaha bersama maupun koperasi perempuan, anggota memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan, pengembangan teknologi pengolahan hasil laut, peningkatan kualitas produk, hingga akses terhadap lembaga pembiayaan mikro yang sebelumnya sulit dijangkau secara individual. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya memperluas jaringan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas perempuan dalam membangun usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Keberadaan modal sosial juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi. Ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan, bencana pesisir, atau fluktuasi harga komoditas, hubungan sosial yang kuat memungkinkan berlangsungnya mekanisme saling membantu melalui pinjaman informal, pertukaran tenaga kerja, berbagi informasi pasar, maupun dukungan moral yang mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Woolcock (1998) menegaskan bahwa modal sosial merupakan fondasi pembangunan ekonomi karena menghubungkan individu dengan sumber daya, peluang, dan institusi yang tidak dapat diakses melalui kemampuan individu semata.

Lebih jauh, Coleman (1988) menjelaskan bahwa modal sosial menghasilkan manfaat kolektif melalui terbentuknya kepercayaan dan norma yang mendorong tindakan

kooperatif. Dalam konteks masyarakat pesisir, kepercayaan yang tinggi antarpelaku usaha mampu menurunkan biaya transaksi, memperlancar kerja sama produksi dan pemasaran, serta memperkuat kemampuan komunitas dalam mengelola risiko ekonomi secara bersama-sama. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi pesisir tidak hanya membutuhkan investasi pada infrastruktur dan modal finansial, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan lokal yang mampu menjaga kohesi sosial, meningkatkan partisipasi perempuan, serta memperluas jejaring ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, modal sosial menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan pesisir yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB 3
Karakteristik dan Perkembangan UMKM Pesisir

3.1 Ragam Usaha Mikro Perempuan Pesisir

Usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan di kawasan pesisir merupakan salah satu bentuk nyata dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan strategi adaptasi ekonomi terhadap berbagai ketidakpastian yang melekat pada kehidupan pesisir, sekaligus menjadi cerminan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Kehadiran berbagai usaha mikro tersebut tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan menambah pendapatan rumah tangga, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam mengelola sumber daya lokal, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, aktivitas ekonomi perempuan berkembang melalui interaksi yang erat antara kondisi ekologis, struktur sosial, budaya lokal, dinamika pasar, serta kebijakan pembangunan yang memengaruhi pola pemanfaatan

sumber daya pesisir. Oleh sebab itu, usaha mikro perempuan pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi lokal yang berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sistem pangan dan perikanan dunia, terutama melalui keterlibatan mereka pada kegiatan pascapanen, pengolahan hasil perikanan, perdagangan, serta penguatan ketahanan pangan rumah tangga (FAO, 2022).

Perkembangan usaha mikro perempuan pesisir memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan memiliki posisi yang semakin strategis dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan. Karakteristik sektor perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim, perubahan iklim, cuaca ekstrem, degradasi sumber daya laut, serta fluktuasi harga hasil tangkapan menyebabkan pendapatan keluarga nelayan cenderung tidak stabil. Dalam kondisi demikian, usaha mikro yang dikelola oleh perempuan berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif yang mampu menjaga keberlangsungan konsumsi rumah tangga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, membiayai layanan

kesehatan, serta mengurangi kerentanan ekonomi keluarga ketika hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan. Dengan demikian, kontribusi ekonomi perempuan tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas pelengkap atau pekerjaan sampingan, melainkan telah menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga menegaskan bahwa pengembangan usaha mikro berbasis hasil perikanan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah produk, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir (KKP, 2023).

Ragam usaha mikro yang berkembang di kalangan perempuan pesisir pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, karakteristik budaya lokal, tingkat perkembangan ekonomi daerah, serta akses terhadap pasar. Pada wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang melimpah, perempuan umumnya mengembangkan usaha berbasis pengolahan hasil laut sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan. Berbagai jenis usaha tersebut meliputi produksi ikan asin, ikan asap, abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, nugget ikan, otak-otak, pindang, terasi, sambal berbahan hasil laut, aneka makanan siap saji berbasis seafood, hingga berbagai produk olahan lain yang memiliki daya simpan

lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi dibandingkan produk dalam bentuk segar. Aktivitas pengolahan tersebut menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam menciptakan *value added* melalui proses transformasi bahan baku menjadi produk yang lebih bernilai sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memperluas peluang pemasaran. Porter (1985) menjelaskan bahwa penciptaan nilai tambah merupakan strategi utama dalam membangun keunggulan kompetitif karena melalui proses tersebut suatu produk memperoleh diferensiasi yang mampu meningkatkan daya saing dan keuntungan usaha.

Selain usaha pengolahan hasil laut, perempuan pesisir juga banyak mengembangkan usaha perdagangan skala mikro yang melayani kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan. Bentuk usaha tersebut antara lain warung kebutuhan sehari-hari, kios hasil laut segar, usaha kuliner berbasis makanan laut, perdagangan hasil olahan perikanan, jasa katering, hingga usaha penjualan makanan ringan khas pesisir. Keberadaan usaha perdagangan tersebut memiliki fungsi ekonomi yang penting karena tidak hanya memperlancar distribusi produk lokal, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat komunitas. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi penghubung antara produsen dan konsumen melalui aktivitas pemasaran yang dilakukan secara langsung di pasar

tradisional maupun melalui jaringan sosial yang telah terbentuk di lingkungan masyarakat.

Perkembangan sektor pariwisata bahari juga membuka peluang lahirnya berbagai bentuk usaha mikro baru yang dikelola oleh perempuan pesisir. Di berbagai kawasan wisata pantai, perempuan memanfaatkan potensi budaya lokal dan kekayaan sumber daya pesisir untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif berupa produksi kerajinan tangan dari cangkang kerang, anyaman berbahan alami, aksesori berbasis limbah laut, batik motif pesisir, tenun dengan ornamen kelautan, serta berbagai jenis suvenir yang merepresentasikan identitas budaya masyarakat pesisir. Di samping itu, berkembang pula usaha kuliner tradisional berbasis hasil laut yang dikemas secara lebih modern sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Diversifikasi usaha tersebut menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam membaca perubahan tren pasar serta memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemampuan mengidentifikasi peluang dan menciptakan kombinasi baru dari sumber daya yang tersedia merupakan inti dari aktivitas kewirausahaan sebagaimana dikemukakan oleh Schumpeter (1934), yang menempatkan inovasi sebagai motor utama perubahan ekonomi.

Di beberapa wilayah pesisir yang memiliki potensi budidaya perikanan dan kelautan, perempuan juga mulai mengembangkan usaha berbasis akuakultur dan pemanfaatan hasil budidaya. Berbagai kegiatan seperti pengolahan rumput laut menjadi makanan, minuman, tepung, maupun produk kosmetik sederhana, budidaya kepiting, pengelolaan tambak skala rumah tangga, serta pengembangan produk olahan berbahan baku rumput laut menunjukkan semakin luasnya ruang partisipasi perempuan dalam rantai nilai ekonomi kelautan. Diversifikasi usaha tersebut menjadi strategi penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap perikanan tangkap sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perempuan pesisir juga mulai memasuki sektor ekonomi digital melalui pemanfaatan media sosial, *marketplace*, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform perdagangan elektronik sebagai sarana promosi serta pemasaran produk. Transformasi digital telah mengubah pola pemasaran yang sebelumnya hanya mengandalkan pasar tradisional menjadi sistem pemasaran yang mampu menjangkau konsumen dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi

transaksi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta membuka peluang bagi perempuan untuk membangun identitas merek (*branding*) yang lebih profesional. Perubahan ini menunjukkan bahwa usaha mikro perempuan pesisir telah berkembang mengikuti dinamika ekonomi digital yang menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen.

Keberadaan usaha mikro perempuan pesisir juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena sebagian besar usaha berkembang melalui hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, gotong royong, solidaritas, dan kerja sama antarmasyarakat. Banyak usaha lahir dan berkembang melalui kelompok perempuan, kelompok usaha bersama (KUB), koperasi nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun organisasi masyarakat lainnya yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, pertukaran pengalaman, penguatan kapasitas, serta perluasan jaringan pemasaran. Dalam situasi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, modal sosial berupa kepercayaan, norma bersama, jaringan sosial, dan budaya saling membantu menjadi sumber daya yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan aset kolektif yang mampu meningkatkan efektivitas kerja sama masyarakat sehingga tujuan ekonomi dapat dicapai

secara lebih efisien melalui tindakan kolektif dibandingkan apabila setiap individu bekerja secara terpisah.

Walaupun memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi lokal, sebagian besar usaha mikro perempuan pesisir masih menghadapi berbagai kendala yang membatasi peluang pertumbuhan usaha. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan modal kerja, rendahnya tingkat pendidikan formal dan literasi keuangan, minimnya penguasaan teknologi produksi, terbatasnya akses terhadap inovasi, lemahnya kemampuan manajerial, rendahnya kualitas pengemasan produk, belum optimalnya sertifikasi keamanan pangan dan legalitas usaha, serta terbatasnya akses terhadap jaringan pemasaran modern. Selain itu, perubahan menuju ekonomi digital menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan akan literasi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, serta penguasaan strategi pemasaran berbasis platform digital. Apabila tantangan tersebut tidak direspons secara tepat, usaha mikro perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.

Oleh karena itu, pengembangan usaha mikro perempuan pesisir memerlukan strategi pemberdayaan yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas kewirausahaan, perluasan akses

pembiayaan, pengembangan inovasi produk, peningkatan literasi digital, fasilitasi sertifikasi usaha, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pendampingan yang berkesinambungan. Hisrich, Peters, dan Shepherd (2020) menegaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam memulai bisnis, tetapi juga oleh proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus, kemampuan membangun jaringan, pengembangan kompetensi manajerial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, keberlanjutan usaha mikro perempuan pesisir sangat ditentukan oleh sinergi antara kapasitas internal pelaku usaha dan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing. Pada akhirnya, semakin berkembangnya ragam usaha mikro yang dikelola perempuan pesisir akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, serta pembangunan ekonomi wilayah pesisir yang tangguh dan berkelanjutan.

3.2 Potensi Sumber Daya Lokal sebagai Basis Usaha

Potensi sumber daya lokal merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi pesisir karena menjadi sumber utama yang menentukan arah

pengembangan usaha, jenis komoditas yang dapat diproduksi, serta peluang penciptaan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, sumber daya lokal tidak hanya dipahami sebagai kekayaan alam yang tersedia secara fisik, tetapi juga mencakup pengetahuan tradisional, budaya lokal, keterampilan masyarakat, jaringan sosial, serta berbagai bentuk kearifan lokal yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi lokal sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir yang sangat melimpah dan beragam, mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, garam, terumbu karang, mangrove, hingga berbagai jenis biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kekayaan sumber daya tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya perempuan pesisir, untuk mengembangkan berbagai bentuk usaha yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap

pembangunan ekonomi nasional sekaligus menyediakan ruang yang luas bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pesisir.

Pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan usaha tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi komoditas alam, melainkan harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui proses inovasi, pengolahan, dan diversifikasi produk. Pendekatan ini menjadi penting karena produk yang dipasarkan dalam bentuk bahan mentah umumnya memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan produk yang telah mengalami proses pengolahan. Dengan demikian, pengembangan industri pengolahan berbasis masyarakat menjadi strategi yang sangat relevan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi lokal yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat untuk mengendalikan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar (Blakely & Leigh, 2017).

Selain potensi sumber daya alam, masyarakat pesisir juga memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Berbagai teknik tradisional pengolahan ikan, metode pengawetan alami menggunakan rempah-rempah

lokal, pola produksi berbasis kearifan lingkungan, hingga berbagai simbol budaya yang tercermin dalam desain kemasan dan identitas produk merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya. Dalam era ekonomi kreatif dan globalisasi pasar saat ini, konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan fungsi utilitasnya, tetapi juga berdasarkan nilai cerita, identitas budaya, dan keunikan yang melekat pada produk tersebut. Oleh karena itu, integrasi antara sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal dapat menjadi strategi efektif dalam membangun diferensiasi produk yang sulit ditiru oleh pesaing.

Namun demikian, besarnya potensi sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat pesisir belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang optimal. Pada banyak daerah, berbagai komoditas unggulan masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku tanpa proses pengolahan yang memadai sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di luar wilayah produksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dengan kapasitas masyarakat dalam mengelolanya secara produktif. Rendahnya akses terhadap teknologi, keterbatasan modal investasi, lemahnya jaringan pemasaran, serta minimnya dukungan kelembagaan

menjadi faktor yang menyebabkan potensi ekonomi lokal belum berkembang secara maksimal.

Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber daya lokal sebagai basis usaha perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dengan menghubungkan aspek produksi, pengolahan, pemasaran, inovasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap teknologi tepat guna, perluasan jejaring kemitraan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan daya saing usaha berbasis sumber daya lokal. Dengan pendekatan tersebut, potensi pesisir tidak hanya menjadi sumber penghidupan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi juga dapat berkembang menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh.

3.3 Model Produksi dan Rantai Nilai Produk Pesisir

Model produksi yang berkembang pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan pesisir pada umumnya masih bercirikan sistem produksi rumah tangga (*home industry*), yaitu suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya lokal, teknologi sederhana, modal yang relatif terbatas, serta tenaga kerja

yang sebagian besar berasal dari anggota keluarga. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada penciptaan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi rumah tangga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pola produksi semacam ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain fleksibilitas dalam pengelolaan usaha, kemampuan menyesuaikan volume produksi dengan ketersediaan bahan baku, serta biaya operasional yang relatif rendah karena tidak memerlukan investasi teknologi yang besar. Namun demikian, di balik keunggulan tersebut terdapat berbagai keterbatasan yang menghambat peningkatan skala usaha, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, kualitas produk yang belum seragam, kapasitas produksi yang terbatas, serta lemahnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi sistem produksi menjadi lebih modern merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari apabila UMKM pesisir ingin meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif (Todaro & Smith, 2021).

Dalam perspektif manajemen strategis, proses penciptaan nilai suatu produk tidak hanya ditentukan oleh aktivitas produksi, melainkan oleh keseluruhan rangkaian

kegiatan yang saling berkaitan sejak pengadaan bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen akhir. Konsep tersebut dikenal sebagai rantai nilai (*value chain*), yaitu suatu pendekatan yang memandang setiap aktivitas usaha sebagai bagian dari proses yang memiliki potensi menghasilkan nilai tambah apabila dikelola secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Porter (1985) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan dibangun melalui kemampuan mengelola aktivitas primer seperti logistik, operasi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan, serta aktivitas pendukung yang meliputi pengembangan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan bahan baku, dan infrastruktur organisasi. Dengan demikian, keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk akhir, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarproses yang membentuk keseluruhan sistem produksi dan pemasaran.

Dalam konteks UMKM perempuan pesisir, rantai nilai produk perikanan maupun hasil olahan sumber daya laut masih menunjukkan struktur yang belum sepenuhnya menguntungkan bagi produsen. Sebagian besar pelaku usaha perempuan masih berperan pada tahapan pengolahan primer, seperti pembersihan bahan baku, pengeringan, pengasapan, pengolahan makanan laut, maupun pengemasan sederhana. Sementara itu, aktivitas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, seperti distribusi

skala besar, pemasaran modern, pengembangan merek (*branding*), hingga ekspor, umumnya dikuasai oleh pedagang pengumpul, distributor, atau perusahaan yang memiliki modal, jaringan bisnis, dan akses informasi pasar yang lebih kuat. Akibatnya, nilai tambah yang tercipta sepanjang rantai pasok lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha yang berada pada hilir, sedangkan produsen utama hanya memperoleh margin keuntungan yang relatif kecil meskipun mereka menjadi aktor utama dalam proses produksi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi nilai dalam rantai pasok yang perlu diperbaiki melalui penguatan posisi tawar produsen, pengembangan kelembagaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pasar yang lebih luas (Kaplinsky & Morris, 2001).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan yang sangat signifikan terhadap pola pengelolaan rantai nilai produk pesisir. Transformasi digital memungkinkan produsen untuk mengurangi ketergantungan terhadap perantara melalui pemanfaatan berbagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), media sosial, aplikasi pemasaran digital, serta sistem pembayaran elektronik yang mempercepat proses transaksi antara produsen dan konsumen. Digitalisasi rantai nilai tersebut tidak hanya mampu memperpendek jalur distribusi, tetapi juga

meningkatkan transparansi harga, memperluas akses informasi pasar, mempercepat komunikasi dengan konsumen, serta membuka peluang ekspansi pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional. Menurut OECD (2021), transformasi digital memberikan peluang yang sangat besar bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat inovasi, dan memperluas akses pasar apabila didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang memadai. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai produk pesisir tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi semata, tetapi juga harus diiringi dengan transformasi kelembagaan, digitalisasi proses bisnis, serta pengembangan kolaborasi antarpelaku ekonomi sehingga tercipta sistem produksi yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing tinggi.

3.4 Hambatan Pengembangan UMKM

Meskipun UMKM perempuan pesisir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penguatan ekonomi lokal, perkembangan sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berkaitan dengan kebijakan,

kelembagaan, akses terhadap sumber daya, serta struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perempuan pesisir perlu dipahami sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan kelembagaan yang saling berkaitan satu sama lain.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku UMKM perempuan belum memiliki aset yang dapat dijadikan agunan, belum menyusun laporan keuangan secara sistematis, serta belum memiliki legalitas usaha yang memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami kesulitan memperoleh kredit produktif sehingga lebih bergantung pada modal sendiri atau pinjaman informal yang memiliki tingkat bunga relatif tinggi dan risiko yang lebih besar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), rendahnya akses pembiayaan formal pada UMKM di Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya tingkat literasi keuangan, lemahnya tata kelola usaha, dan terbatasnya inklusi keuangan masyarakat.

Selain keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup kompleks. Tingkat pendidikan yang relatif rendah, minimnya akses terhadap pelatihan kewirausahaan, rendahnya kemampuan manajerial, serta keterbatasan literasi digital menyebabkan

banyak pelaku usaha belum mampu mengembangkan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan melakukan inovasi produk, pengembangan desain kemasan, pembangunan identitas merek, maupun penerapan strategi pemasaran digital yang saat ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Schumpeter (1934) menegaskan bahwa inovasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan pelaku usaha menciptakan kombinasi baru yang menghasilkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di kawasan pesisir. Kualitas jaringan transportasi yang belum memadai, terbatasnya fasilitas penyimpanan dingin (*cold storage*), akses listrik yang belum stabil di beberapa wilayah, serta kesenjangan akses internet menyebabkan biaya produksi dan distribusi menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki infrastruktur lebih baik. Dalam perspektif pembangunan wilayah, infrastruktur merupakan prasyarat utama yang menentukan efisiensi ekonomi karena berfungsi memperlancar arus barang, jasa, informasi, dan mobilitas tenaga kerja (World Bank, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya berdampak

pada produktivitas usaha, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah.

Di samping berbagai hambatan ekonomi tersebut, perempuan pesisir juga menghadapi tantangan sosial yang berkaitan dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga. Sebagian besar perempuan menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku usaha, sehingga waktu, tenaga, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, memperluas jaringan bisnis, maupun mengembangkan inovasi menjadi sangat terbatas. Beban kerja domestik yang tinggi sering kali mengurangi fleksibilitas perempuan dalam mengembangkan kapasitas kewirausahaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moser (1993), perempuan pada umumnya menjalankan tiga peran sekaligus, yaitu peran reproduktif, produktif, dan sosial kemasyarakatan, sehingga kebijakan pemberdayaan ekonomi perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan, pembiayaan, teknologi, serta perlindungan sosial.

3.5 Peluang Inovasi Produk Berbasis Potensi Lokal

Di tengah meningkatnya dinamika persaingan global dan perubahan preferensi konsumen, inovasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan pesisir. Inovasi tidak lagi

dipahami secara sempit sebagai penciptaan produk baru berbasis teknologi tinggi, melainkan mencakup seluruh proses pembaruan yang mampu meningkatkan nilai tambah suatu produk, baik melalui penyempurnaan proses produksi, pengembangan desain, peningkatan kualitas kemasan, diversifikasi pasar, penguatan identitas merek, maupun pengelolaan pengalaman konsumen. Dengan demikian, inovasi merupakan proses berkelanjutan yang memungkinkan UMKM beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing (Drucker, 1985).

Kawasan pesisir Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam dan berpotensi menjadi basis pengembangan produk inovatif yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai komoditas seperti ikan, udang, rumput laut, kerang, kepiting, garam, hingga limbah hasil perikanan dapat diolah menjadi produk pangan, kosmetik alami, kerajinan, maupun produk kesehatan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan menjual bahan mentah. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep ekonomi berbasis sumber daya lokal (*local resource-based development*), yaitu strategi pembangunan yang mengoptimalkan potensi wilayah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Barca, McCann, & Rodríguez-Pose, 2012).

Perubahan perilaku konsumen global yang semakin memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keaslian produk memberikan peluang yang sangat besar bagi UMKM pesisir untuk mengembangkan produk yang memiliki karakteristik unik. Produk olahan ikan tanpa bahan pengawet, makanan berbasis rumput laut, kosmetik berbahan bioaktif laut, maupun kerajinan yang memanfaatkan limbah cangkang merupakan contoh inovasi yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber daya baru. Menurut FAO (2022), inovasi berbasis sumber daya lokal merupakan strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat proses inovasi melalui kemudahan memperoleh informasi pasar, melakukan riset tren konsumen, membangun komunikasi dengan pelanggan, serta memperluas promosi melalui berbagai platform digital. Kehadiran media sosial, *marketplace*, dan sistem pembayaran digital memungkinkan pelaku UMKM membangun identitas merek yang lebih kuat, menciptakan narasi (*storytelling*) mengenai asal-usul produk, serta menjangkau konsumen lintas wilayah dengan biaya pemasaran yang relatif lebih efisien. Dalam konteks

tersebut, inovasi tidak lagi dipahami hanya sebagai perubahan pada produk, melainkan sebagai transformasi menyeluruh terhadap model bisnis, proses produksi, strategi pemasaran, serta tata kelola usaha yang mampu meningkatkan daya saing secara berkelanjutan (OECD, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan UMKM perempuan pesisir memerlukan pendekatan yang bersifat holistik melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat. Kolaborasi multipihak tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan, memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, serta membangun ekosistem usaha yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan rantai nilai nasional maupun global. Dengan terciptanya ekosistem yang kondusif, potensi ekonomi lokal tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga berkembang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB 4
Strategi Bertahan UMKM Perempuan Pesisir

4.1 Strategi Adaptasi Menghadapi Krisis Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan di kawasan pesisir berkembang dalam suatu lingkungan ekonomi yang dicirikan oleh tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi sebagai konsekuensi dari ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, kondisi pasar, dan berbagai perubahan kebijakan ekonomi. Karakteristik tersebut menjadikan keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas pelaku usaha dalam mengantisipasi, merespons, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Dibandingkan dengan pelaku usaha pada sektor formal yang umumnya memiliki akses lebih baik terhadap lembaga keuangan, teknologi produksi, sistem informasi pasar, perlindungan hukum, maupun jaringan distribusi yang lebih luas, perempuan pelaku UMKM di wilayah pesisir masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural yang menyebabkan tingkat

kerentanan usahanya menjadi lebih tinggi. Ketidakpastian hasil tangkapan ikan, perubahan pola musim akibat perubahan iklim, meningkatnya harga bahan baku, inflasi, terganggunya rantai pasok, fluktuasi permintaan pasar, hingga krisis ekonomi nasional maupun global merupakan faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi kesinambungan proses produksi, stabilitas pendapatan usaha, dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, strategi adaptasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai respons sesaat terhadap tekanan ekonomi, tetapi sebagai proses dinamis yang memungkinkan individu dan komunitas mempertahankan fungsi sosial-ekonomi sekaligus membangun kapasitas baru untuk menghadapi perubahan yang semakin kompleks (Folke, 2006).

Dalam perspektif teori adaptasi sosial-ekologi, kemampuan masyarakat dalam menghadapi krisis tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimiliki, melainkan juga oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya tersebut secara fleksibel sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Folke (2006) menjelaskan bahwa adaptasi merupakan bagian integral dari konsep *resilience*, yaitu kemampuan suatu sistem untuk menyerap gangguan, mempertahankan fungsi dasarnya, serta melakukan reorganisasi tanpa kehilangan identitas utama sistem tersebut. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam

memahami perilaku ekonomi perempuan pesisir karena sebagian besar keputusan ekonomi yang mereka ambil tidak hanya bertujuan mempertahankan usaha dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang. Dengan kata lain, strategi adaptasi yang dilakukan perempuan merupakan manifestasi dari kapasitas resiliensi yang berkembang melalui pengalaman hidup, pembelajaran sosial, serta interaksi dengan lingkungan ekonomi yang terus berubah.

Pada tataran praktik, strategi adaptasi yang dijalankan perempuan pelaku UMKM memperlihatkan kemampuan yang tinggi dalam melakukan reorganisasi terhadap proses produksi dan pengelolaan usaha. Ketika terjadi lonjakan harga bahan baku atau penurunan daya beli masyarakat, mereka tidak serta-merta menghentikan kegiatan ekonomi, melainkan melakukan berbagai bentuk penyesuaian yang bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan keberlangsungan produksi. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui pengurangan volume produksi sesuai dengan tingkat permintaan pasar, pemanfaatan bahan baku alternatif yang tetap memenuhi standar kualitas, pengendalian biaya operasional, pengurangan pemborosan selama proses produksi, hingga penyusunan kembali skala prioritas penggunaan modal usaha. Keputusan-keputusan tersebut menunjukkan bahwa

perempuan tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengelola risiko (*risk manager*) yang secara aktif melakukan evaluasi terhadap berbagai kemungkinan dampak ekonomi sebelum menentukan strategi yang akan ditempuh. Dalam perspektif manajemen risiko, kemampuan mengidentifikasi ancaman, mengurangi potensi kerugian, dan memanfaatkan peluang baru merupakan karakteristik utama organisasi maupun individu yang memiliki kapasitas adaptif tinggi (Hillson, 2009).

Strategi adaptasi juga tercermin melalui kemampuan perempuan dalam melakukan diversifikasi terhadap aktivitas ekonomi sebagai mekanisme untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada satu jenis sumber pendapatan. Ketika usaha utama mengalami penurunan akibat berkurangnya pasokan bahan baku atau melemahnya permintaan pasar, sebagian perempuan mengembangkan usaha alternatif yang masih memanfaatkan sumber daya lokal, seperti produksi makanan olahan, perdagangan kebutuhan pokok, jasa kuliner rumahan, maupun usaha berbasis kerajinan. Diversifikasi tersebut bukan sekadar upaya menambah pendapatan, tetapi merupakan strategi mitigasi risiko yang memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga terhadap berbagai bentuk guncangan eksternal. Ellis (2000) menyatakan bahwa diversifikasi mata pencaharian merupakan strategi adaptasi yang umum

dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan pesisir untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi maupun perubahan lingkungan. Semakin beragam sumber pendapatan yang dimiliki suatu rumah tangga, semakin besar pula kapasitasnya dalam mempertahankan kesejahteraan ketika salah satu sektor mengalami penurunan.

Kemampuan perempuan dalam memanfaatkan sumber daya lokal juga menjadi salah satu indikator penting dari kapasitas adaptasi yang berkembang di masyarakat pesisir. Keterbatasan modal finansial sering kali mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi lokal melalui pemanfaatan bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Berbagai jenis hasil laut yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk segar kemudian diolah menjadi ikan asap, abon, kerupuk, terasi, bakso ikan, maupun produk olahan lainnya yang memiliki umur simpan lebih panjang dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa adaptasi tidak hanya berlangsung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek teknologi dan kreativitas dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) terhadap sumber daya lokal. Schumpeter (1934) menjelaskan bahwa inovasi merupakan faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi karena memungkinkan terciptanya kombinasi baru dalam proses

produksi, pemasaran, maupun organisasi usaha yang menghasilkan keunggulan dibandingkan praktik sebelumnya.

Di samping memanfaatkan sumber daya fisik, perempuan pesisir juga mengoptimalkan modal sosial sebagai instrumen adaptasi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hubungan sosial yang terbangun melalui kelompok usaha, koperasi, arisan, organisasi perempuan, maupun komunitas lokal menjadi sumber informasi, dukungan moral, bantuan tenaga kerja, akses terhadap bahan baku, hingga peluang pemasaran yang sangat penting ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan. Keberadaan jaringan tersebut memungkinkan perempuan memperoleh solusi secara kolektif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga risiko ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing individu. Putnam (1993) menegaskan bahwa modal sosial yang diwujudkan melalui jaringan, norma, dan kepercayaan merupakan aset kolektif yang mampu meningkatkan efektivitas kerja sama sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dalam konteks masyarakat pesisir, modal sosial menjadi fondasi yang memungkinkan terbentuknya solidaritas ekonomi sehingga kemampuan adaptasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan komunitas.

Perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai oleh percepatan digitalisasi juga mendorong munculnya bentuk-bentuk adaptasi baru dalam strategi pemasaran UMKM perempuan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas dan menurunnya aktivitas perdagangan konvensional memaksa pelaku usaha untuk mencari alternatif pemasaran yang lebih fleksibel. Banyak perempuan mulai memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan sistem pembayaran digital sebagai instrumen untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Digitalisasi bukan hanya mengubah cara menjual produk, tetapi juga mengubah pola komunikasi, pelayanan pelanggan, promosi, hingga pengelolaan transaksi keuangan. Menurut OECD (2021), transformasi digital telah menjadi faktor strategis yang menentukan daya saing UMKM karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, serta mempercepat proses inovasi bisnis. Dengan demikian, kemampuan perempuan mengadopsi teknologi digital merupakan indikator penting dari kapasitas adaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin terdigitalisasi.

Strategi adaptasi perempuan pesisir juga memperlihatkan dimensi psikologis yang sering kali kurang memperoleh perhatian dalam berbagai kajian

ekonomi. Ketidakpastian pendapatan, tekanan ekonomi keluarga, dan risiko kegagalan usaha menuntut adanya kemampuan mengelola stres, mempertahankan motivasi, serta membangun optimisme dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Ketahanan psikologis tersebut menjadi modal yang memungkinkan perempuan tetap mampu mengambil keputusan ekonomi secara rasional meskipun berada dalam kondisi penuh tekanan. Bandura (1997) menjelaskan bahwa *self-efficacy* atau keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan seseorang dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan mempertahankan usaha ketika menghadapi kegagalan. Oleh karena itu, strategi adaptasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis yang memperkuat kemampuan perempuan untuk terus bertahan dan berkembang.

Pada akhirnya, strategi adaptasi yang dilakukan oleh perempuan pelaku UMKM di kawasan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mempertahankan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi proses transformasi yang membangun ketahanan ekonomi rumah tangga dan komunitas secara berkelanjutan. Setiap pengalaman menghadapi krisis menjadi sumber pembelajaran yang memperkaya kapasitas individu dalam

mengembangkan inovasi, memperluas jaringan sosial, meningkatkan efisiensi usaha, serta membangun kemampuan untuk merespons perubahan yang bersifat struktural. Ketika strategi adaptasi tersebut didukung oleh kebijakan publik yang inklusif, akses terhadap pembiayaan, peningkatan literasi digital, pendidikan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan lokal, perempuan pesisir tidak hanya berperan sebagai kelompok yang mampu bertahan dari berbagai krisis, tetapi juga menjadi aktor strategis yang mendorong transformasi ekonomi wilayah pesisir menuju sistem yang lebih tangguh, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

4.2 Diversifikasi Produk dan Sumber Pendapatan

Diversifikasi produk dan sumber pendapatan merupakan salah satu strategi ekonomi yang paling banyak diterapkan oleh perempuan pelaku UMKM pesisir sebagai respons terhadap tingginya tingkat ketidakpastian yang melekat pada aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Ketergantungan terhadap satu jenis komoditas atau satu sumber pendapatan menyebabkan rumah tangga menjadi sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di luar kendali mereka, seperti penurunan hasil tangkapan ikan, perubahan harga pasar, gangguan distribusi, hingga pergeseran preferensi konsumen. Oleh karena itu, diversifikasi tidak hanya dipahami sebagai

strategi bisnis untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko kehilangan sumber penghidupan ketika terjadi gangguan pada sektor usaha utama. Dalam konteks masyarakat pesisir, diversifikasi menjadi salah satu bentuk adaptasi yang memungkinkan rumah tangga mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus memperluas peluang peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (Ellis, 2000).

Penerapan strategi diversifikasi oleh perempuan pesisir umumnya dilakukan melalui pengembangan berbagai produk olahan berbahan dasar sumber daya laut yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan produk mentah. Hasil tangkapan ikan yang sebelumnya dijual secara langsung diolah menjadi berbagai produk seperti abon ikan, kerupuk ikan, bakso ikan, nugget ikan, ikan asap, sambal berbahan hasil laut, maupun berbagai jenis makanan ringan yang memiliki daya simpan lebih lama dan nilai jual yang lebih tinggi. Transformasi komoditas primer menjadi produk olahan tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitar. Dalam perspektif ekonomi nilai tambah, proses pengolahan menjadi instrumen penting yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh

manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya lokal yang tersedia.

Selain melakukan diversifikasi produk, banyak perempuan pesisir juga mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendapatan melalui kombinasi berbagai jenis usaha yang saling mendukung. Tidak sedikit rumah tangga pesisir yang menjalankan usaha pengolahan hasil laut sekaligus mengelola usaha perdagangan kecil, jasa katering, warung sembako, usaha kuliner rumahan, atau aktivitas ekonomi berbasis jasa lainnya. Keberagaman sumber pendapatan tersebut menciptakan sistem ekonomi rumah tangga yang lebih fleksibel karena ketergantungan terhadap satu sektor usaha dapat dikurangi. Ketika salah satu usaha mengalami penurunan akibat faktor eksternal, sumber pendapatan lain dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi sehingga keberlangsungan kebutuhan rumah tangga tetap terjaga. Strategi semacam ini menunjukkan adanya kemampuan perempuan dalam mengelola risiko ekonomi melalui pendekatan yang bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang.

Diversifikasi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing usaha karena memungkinkan pelaku UMKM menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis menuntut pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi agar produk yang dihasilkan tetap relevan dengan

kebutuhan pasar. Kotler dan Keller (2016) menegaskan bahwa inovasi produk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Semakin beragam produk yang mampu dihasilkan, semakin besar pula peluang pelaku usaha untuk menjangkau kelompok konsumen yang berbeda, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan loyalitas pelanggan melalui variasi pilihan yang ditawarkan.

Dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, diversifikasi produk dan sumber pendapatan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan. Keberagaman aktivitas ekonomi menciptakan peluang munculnya rantai nilai baru yang melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari penyedia bahan baku, produsen, pengemas, distributor, hingga pelaku pemasaran digital. Proses tersebut menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas terhadap berbagai bentuk guncangan eksternal. Dengan demikian, strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perempuan pesisir tidak hanya memiliki manfaat pada tingkat individu atau rumah

tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, diversifikasi produk dan sumber pendapatan dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan aspek inovasi, pengelolaan risiko, peningkatan nilai tambah, dan penguatan kapasitas adaptif masyarakat. Melalui diversifikasi, perempuan pesisir tidak hanya berupaya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh bagi keluarga dan komunitasnya. Oleh karena itu, dukungan terhadap pengembangan diversifikasi usaha melalui pelatihan, akses permodalan, pendampingan teknologi, dan perluasan akses pasar menjadi sangat penting agar potensi ekonomi perempuan pesisir dapat berkembang secara optimal serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3 Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dan Usaha

Keberlanjutan suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal awal, tingginya volume penjualan, atau luasnya pangsa pasar yang berhasil dijangkau, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara terencana, disiplin, dan akuntabel. Dalam konteks UMKM yang

dikelola oleh perempuan di wilayah pesisir, pengelolaan keuangan memiliki karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan dengan usaha formal karena aktivitas ekonomi umumnya berlangsung dalam lingkup rumah tangga sehingga batas antara keuangan keluarga dan keuangan usaha sering kali menjadi tidak jelas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan transaksi, penghitungan laba, pengendalian biaya operasional, hingga penyusunan rencana investasi usaha menjadi sulit dilakukan secara sistematis.

Fenomena pencampuran keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha merupakan persoalan yang masih banyak ditemukan pada UMKM berskala mikro, terutama pada usaha yang berkembang dari aktivitas ekonomi keluarga. Pendapatan hasil penjualan sering kali langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari tanpa melalui mekanisme pencatatan ataupun pengalokasian dana berdasarkan prioritas usaha. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, menghitung keuntungan bersih, mengevaluasi efisiensi produksi, maupun menentukan kebutuhan modal kerja pada periode berikutnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola arus kas dan mengambil keputusan

ekonomi yang tepat sehingga berdampak pada rendahnya keberlanjutan usaha.

Seiring dengan meningkatnya pengalaman berwirausaha serta bertambahnya akses terhadap berbagai program pelatihan dan pendampingan, sebagian perempuan pelaku UMKM pesisir mulai menunjukkan perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan. Mereka tidak lagi sekadar mengandalkan ingatan dalam mencatat transaksi, tetapi mulai menerapkan pembukuan sederhana, memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi, menyusun anggaran produksi, serta menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan maupun modal pengembangan usaha. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan bukan hanya berkaitan dengan kemampuan memahami konsep-konsep finansial, melainkan juga berkaitan dengan terbentuknya perilaku ekonomi yang lebih rasional, disiplin, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Pengelolaan keuangan yang baik juga tercermin dalam kemampuan perempuan pesisir mengalokasikan sumber daya secara proporsional antara kebutuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan pengembangan usaha. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, seperti ketika musim paceklik, penurunan hasil tangkapan ikan, atau meningkatnya harga bahan baku, perempuan umumnya melakukan penyesuaian terhadap pola

konsumsi keluarga dengan mengurangi pengeluaran yang bersifat sekunder tanpa mengorbankan kebutuhan pokok maupun modal kerja usaha. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai manajer keuangan rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kemampuan melakukan perencanaan keuangan juga berkaitan erat dengan kesiapan menghadapi berbagai bentuk risiko usaha yang bersifat tidak terduga. UMKM yang memiliki dana cadangan, pencatatan keuangan yang baik, serta kemampuan mengelola arus kas secara efisien cenderung lebih mampu bertahan ketika menghadapi penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, ataupun gangguan pasokan bahan baku. Brigham dan Houston (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif ditandai oleh kemampuan melakukan perencanaan, penyusunan anggaran, pengendalian arus kas, evaluasi kinerja keuangan, serta pengelolaan risiko melalui penyediaan dana darurat dan investasi yang terukur.

Dalam era transformasi digital, penguatan literasi keuangan juga mulai didukung oleh pemanfaatan berbagai aplikasi pencatatan keuangan berbasis telepon pintar yang memungkinkan pelaku UMKM melakukan pembukuan

secara lebih sederhana, akurat, dan mudah dipantau. Digitalisasi pengelolaan keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi usaha, tetapi juga memperbesar peluang pelaku UMKM memperoleh akses terhadap pembiayaan formal karena lembaga keuangan pada umumnya mensyaratkan adanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi keuangan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap penguatan daya saing, keberlanjutan usaha, serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga perempuan pesisir.

4.4 Pemanfaatan Jaringan Sosial dalam Pengembangan Usaha

Pengembangan UMKM pada masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada kepemilikan modal finansial maupun kemampuan teknis dalam menghasilkan produk, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial yang dibangun oleh pelaku usaha dengan berbagai individu, kelompok, maupun lembaga yang berada di dalam maupun di luar komunitasnya. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, hubungan sosial tersebut dikenal sebagai modal sosial (*social capital*), yaitu seperangkat jaringan, norma, nilai, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat melakukan kerja sama secara

efektif untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan modal ekonomi yang bersifat material, modal sosial berkembang melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga menjadi salah satu aset yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha masyarakat pesisir.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan pesisir membangun jaringan sosial melalui berbagai bentuk organisasi formal maupun informal, seperti kelompok usaha bersama, koperasi, kelompok pengolah hasil perikanan, organisasi perempuan, kelompok arisan, majelis taklim, hingga berbagai komunitas berbasis wilayah. Keikutsertaan dalam berbagai kelompok tersebut memberikan manfaat yang jauh melampaui fungsi sosial semata karena menjadi ruang bagi pertukaran informasi mengenai harga bahan baku, peluang pemasaran, akses terhadap bantuan pemerintah, teknologi pengolahan, hingga peluang kerja sama dengan berbagai mitra usaha. Interaksi yang berlangsung secara berulang dalam komunitas tersebut menciptakan rasa saling percaya (*trust*) yang pada akhirnya memperkuat kemampuan kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang lahir dari jaringan hubungan sosial, norma bersama, dan tingkat kepercayaan yang

berkembang di dalam masyarakat sehingga mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks UMKM perempuan pesisir, modal sosial memungkinkan pelaku usaha memperoleh berbagai bentuk dukungan yang sulit diperoleh apabila hanya mengandalkan kemampuan individu, seperti akses terhadap informasi pasar, rekomendasi pemasok bahan baku, peluang mengikuti pelatihan, hingga kemudahan memperoleh pinjaman berbasis kelompok.

Selain memperkuat akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan sosial juga memiliki fungsi sebagai mekanisme perlindungan ketika pelaku usaha menghadapi berbagai situasi yang tidak menguntungkan. Dalam kondisi penurunan produksi, kelangkaan bahan baku, atau melemahnya permintaan pasar, hubungan yang baik antarpelaku usaha memungkinkan terjadinya kerja sama dalam bentuk berbagi informasi, saling meminjamkan bahan baku, melakukan pemasaran bersama, maupun mengembangkan strategi kolektif untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Woolcock (1998) menegaskan bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang yang sebelumnya sulit diakses melalui jaringan individu.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan bentuk jaringan sosial yang dimiliki oleh perempuan pelaku UMKM pesisir. Jika pada masa sebelumnya hubungan sosial lebih banyak dibangun melalui interaksi tatap muka dalam komunitas lokal, saat ini media sosial, aplikasi pesan instan, serta berbagai platform perdagangan digital telah berkembang menjadi ruang baru bagi terbentuknya jejaring bisnis yang jauh lebih luas. Melalui platform digital, perempuan tidak hanya berkomunikasi dengan konsumen dari berbagai daerah, tetapi juga membangun kemitraan dengan distributor, memperoleh informasi mengenai tren pasar, mengikuti pelatihan daring, hingga mempromosikan produk secara berkelanjutan kepada khalayak yang lebih luas.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial pada era digital mengalami perluasan makna dari sekadar hubungan interpersonal menjadi jaringan ekonomi berbasis teknologi yang mampu memperkuat daya saing UMKM. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas perempuan pesisir dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan media digital merupakan bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi karena memungkinkan mereka memperluas akses pasar, meningkatkan inovasi, serta memperkuat posisi usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin terbuka.

4.5 Ketahanan Usaha di Tengah Perubahan Iklim dan Musim

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi masyarakat pesisir karena secara langsung memengaruhi keberlanjutan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya kelautan. Berbeda dengan sektor ekonomi yang memiliki tingkat kepastian produksi relatif tinggi, usaha yang berkembang di kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan laut sehingga perubahan kecil pada kondisi iklim dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga maupun keberlangsungan UMKM. Ketergantungan terhadap hasil tangkapan ikan sebagai bahan baku utama menjadikan perempuan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan ekologis yang terjadi secara global maupun lokal.

Fenomena perubahan pola musim, meningkatnya intensitas gelombang tinggi, curah hujan yang semakin tidak menentu, kenaikan suhu permukaan laut, serta frekuensi cuaca ekstrem menyebabkan aktivitas penangkapan ikan mengalami penurunan pada berbagai wilayah pesisir. Berkurangnya hasil tangkapan berdampak langsung terhadap ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi sehingga kapasitas

usaha menjadi menurun, biaya produksi meningkat, dan kontinuitas pasokan kepada konsumen menjadi terganggu. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menegaskan bahwa kawasan pesisir termasuk wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat tingginya eksposur terhadap kenaikan muka air laut, perubahan ekosistem laut, serta meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem.

Menghadapi kondisi tersebut, perempuan pelaku UMKM menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi melalui berbagai strategi pengelolaan usaha yang bersifat fleksibel. Salah satu bentuk adaptasi yang banyak dilakukan adalah menyimpan stok bahan baku ketika musim panen ikan berlangsung agar proses produksi tetap dapat berjalan pada saat pasokan mengalami penurunan. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawetan seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, maupun pengemasan modern memungkinkan bahan baku memiliki umur simpan yang lebih panjang sehingga risiko kerugian akibat kelangkaan pasokan dapat dikurangi. Beberapa pelaku usaha juga melakukan diversifikasi pemasok dengan menjalin kerja sama dengan nelayan atau distributor dari wilayah lain agar ketergantungan terhadap satu sumber bahan baku dapat diminimalkan.

Strategi adaptasi tidak hanya dilakukan pada aspek produksi, tetapi juga melalui diversifikasi jenis usaha dan

inovasi produk. Sebagian perempuan mulai mengembangkan produk yang tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan harian, seperti makanan olahan dengan bahan baku yang memiliki daya simpan lebih lama, produk berbasis rumput laut, kerajinan hasil laut, maupun usaha kuliner yang memanfaatkan berbagai sumber daya lokal lainnya. Diversifikasi tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan produksi, tetapi juga oleh kapasitas pelaku usaha dalam melakukan inovasi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan dinamika pasar.

Ketahanan usaha juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan perencanaan jangka panjang, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperkuat akses terhadap konsumen. FAO (2018) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim merupakan strategi yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Selain kapasitas individu, keberhasilan membangun ketahanan usaha juga memerlukan dukungan kelembagaan

yang kuat melalui kebijakan pemerintah, akses terhadap informasi iklim, fasilitas pembiayaan yang adaptif, pengembangan sistem peringatan dini, serta program pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai risiko lingkungan. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam membangun sistem ekonomi pesisir yang mampu bertahan menghadapi perubahan iklim yang diperkirakan akan semakin kompleks pada masa mendatang.

Dengan demikian, ketahanan usaha perempuan pesisir tidak hanya mencerminkan kemampuan mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah berbagai tekanan eksternal, tetapi juga menggambarkan tingkat resiliensi sosial-ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Semakin tinggi kapasitas adaptasi yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar pula peluang masyarakat pesisir untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga, memperkuat stabilitas ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB 5
Kewirausahaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Pesisir

5.1 Jiwa Kewirausahaan Perempuan Pesisir

Jiwa kewirausahaan perempuan pesisir merupakan salah satu modal sosial dan ekonomi yang semakin memperoleh perhatian dalam kajian pembangunan wilayah pesisir karena keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga merefleksikan proses transformasi sosial yang mengubah posisi perempuan dari aktor domestik menjadi pelaku pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang usaha, mengelola sumber daya lokal, memperluas jaringan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan komunitas secara berkelanjutan. Transformasi tersebut berlangsung secara bertahap seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat pesisir, meningkatnya akses terhadap pendidikan dan informasi, berkembangnya teknologi digital, serta hadirnya berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, kewirausahaan perempuan pesisir tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya memperoleh tambahan pendapatan keluarga, melainkan sebagai

manifestasi dari proses pemberdayaan yang memungkinkan perempuan memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal sekaligus memperkuat posisi sosialnya di dalam keluarga maupun masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kewirausahaan merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi peluang, mengombinasikan berbagai sumber daya yang tersedia, menciptakan inovasi, mengelola ketidakpastian, serta menghasilkan nilai tambah melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Schumpeter (1934) menjelaskan bahwa wirausahawan merupakan agen perubahan (*agent of change*) yang berperan menciptakan kombinasi-kombinasi baru (*new combinations*) melalui inovasi produk, inovasi proses produksi, pembukaan pasar baru, pemanfaatan bahan baku baru, maupun pembentukan organisasi usaha yang lebih efisien. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kewirausahaan lebih ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pembaruan daripada sekadar kepemilikan modal finansial. Dalam konteks masyarakat pesisir, perempuan yang mampu mengembangkan produk berbasis sumber daya laut, memperluas akses pasar, dan memanfaatkan teknologi digital sesungguhnya sedang menjalankan fungsi kewirausahaan sebagaimana dimaksud

oleh Schumpeter, yaitu menciptakan perubahan ekonomi melalui inovasi.

Karakteristik wilayah pesisir yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat berada dalam tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Perubahan musim, gelombang laut, cuaca ekstrem, fluktuasi hasil tangkapan, perubahan harga komoditas perikanan, serta meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan merupakan berbagai faktor yang secara langsung memengaruhi stabilitas pendapatan rumah tangga nelayan. Dalam situasi demikian, perempuan dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Kemampuan tersebut tercermin dalam kecakapan membaca peluang usaha baru, memanfaatkan sumber daya lokal secara kreatif, mengelola keuangan rumah tangga secara efisien, serta mengembangkan berbagai strategi diversifikasi pendapatan sehingga keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan suami.

Kemampuan adaptif tersebut menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan perempuan pesisir berkembang bukan hanya karena adanya motivasi ekonomi, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan struktural yang dihadapi rumah tangga nelayan. Ketika sektor perikanan tangkap mengalami penurunan produktivitas akibat perubahan iklim atau degradasi sumber daya pesisir, perempuan

sering kali menjadi pihak yang pertama kali mencari alternatif usaha dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Mereka mengolah ikan menjadi berbagai produk bernilai tambah, mengembangkan usaha perdagangan kecil, memanfaatkan hasil budidaya rumput laut, memproduksi makanan khas pesisir, hingga mengembangkan kerajinan berbahan baku hasil laut. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa kewirausahaan perempuan merupakan strategi adaptasi ekonomi yang tidak hanya menjaga keberlangsungan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir secara lebih luas.

Kemampuan perempuan dalam membangun usaha berbasis sumber daya lokal juga mencerminkan penerapan prinsip pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (*community-based economic development*), yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, sumber daya pesisir tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja di tingkat lokal. Chambers (1997) menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat harus memberikan ruang

bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan kapasitas, pengetahuan, dan kreativitasnya sehingga mampu menjadi subjek utama dalam proses pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Perkembangan jiwa kewirausahaan perempuan pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman usaha, motivasi berprestasi, kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta keberanian menghadapi risiko. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan keluarga, jaringan sosial, akses terhadap lembaga keuangan, kebijakan pemerintah, keberadaan kelompok usaha bersama, pelatihan kewirausahaan, hingga perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang pemasaran secara lebih luas. Hisrich, Peters, dan Shepherd (2020) menjelaskan bahwa karakter kewirausahaan tidak bersifat bawaan sejak lahir, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga kompetensi kewirausahaan dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman praktis, dan interaksi sosial.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas kewirausahaan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup penguatan pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan manajerial, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi

digital, serta pengembangan jejaring bisnis. Bantuan modal tanpa disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia sering kali hanya menghasilkan keberhasilan yang bersifat sementara karena pelaku usaha belum memiliki kemampuan mengelola risiko, mengembangkan inovasi, maupun memperluas pasar. Oleh sebab itu, pembangunan kewirausahaan perempuan pesisir memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta agar tercipta ekosistem kewirausahaan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha perempuan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, jiwa kewirausahaan perempuan pesisir bukan sekadar cerminan kemampuan menjalankan usaha, melainkan juga representasi dari proses transformasi sosial yang memperlihatkan meningkatnya kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan ekonomi, membangun kemandirian, mengelola sumber daya secara produktif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi wilayah pesisir. Dengan berkembangnya kewirausahaan perempuan, ketahanan ekonomi keluarga menjadi lebih kuat, kesempatan kerja lokal semakin luas, nilai tambah sumber daya pesisir meningkat, dan pembangunan wilayah pesisir memiliki fondasi sosial-ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

5.2 Kreativitas dan Inovasi Produk

Kreativitas dan inovasi merupakan dua unsur fundamental yang menentukan keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan pesisir dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompleks pada era globalisasi dan digitalisasi. Perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya kompetisi antarproduk, serta terbukanya akses pasar yang lebih luas mengharuskan setiap pelaku usaha untuk tidak hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga mampu menciptakan produk yang memiliki keunikan, kualitas, identitas lokal, serta nilai tambah yang dapat membedakannya dari produk sejenis. Dalam konteks tersebut, kreativitas menjadi landasan utama yang memungkinkan perempuan pesisir mengembangkan berbagai gagasan baru dalam memanfaatkan sumber daya lokal, sedangkan inovasi merupakan proses nyata yang mengubah gagasan tersebut menjadi produk, layanan, maupun strategi bisnis yang memberikan manfaat ekonomi.

Drucker (1985) menegaskan bahwa inovasi merupakan instrumen utama kewirausahaan karena melalui inovasi seorang pelaku usaha mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Inovasi tidak hanya dipahami sebagai penciptaan produk yang benar-benar baru, tetapi juga mencakup

penyempurnaan kualitas produk, peningkatan efisiensi proses produksi, pengembangan desain kemasan, diversifikasi produk, penerapan teknologi tepat guna, hingga pembentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan demikian, kemampuan berinovasi menjadi faktor utama yang menentukan daya saing usaha, terutama bagi UMKM perempuan pesisir yang umumnya memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap pasar.

Kreativitas perempuan pesisir pada umumnya berkembang melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang melimpah di lingkungan sekitarnya. Berbagai komoditas hasil laut, seperti ikan, udang, kepiting, kerang, cumi-cumi, rumput laut, maupun hasil samping perikanan lainnya, diolah menjadi produk pangan maupun produk nonpangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan apabila dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Berbagai inovasi tersebut meliputi produksi abon ikan, nugget ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, ikan asap, sambal berbahan hasil laut, makanan siap saji berbasis seafood, olahan rumput laut menjadi minuman, makanan ringan, tepung, hingga kosmetik sederhana, serta pemanfaatan limbah cangkang kerang menjadi kerajinan tangan bernilai artistik. Diversifikasi produk semacam ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi limbah serta mendukung prinsip

ekonomi sirkular yang semakin berkembang dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, inovasi yang dilakukan perempuan pesisir tidak hanya terbatas pada aspek produk, tetapi juga mencakup inovasi dalam proses produksi. Penggunaan teknologi sederhana yang lebih efisien, penerapan standar sanitasi dan keamanan pangan, pengembangan sistem pengemasan modern, serta penerapan teknik pengawetan yang mampu memperpanjang umur simpan produk merupakan bentuk inovasi proses yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing produk. Menurut Porter (1990), keunggulan kompetitif suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi yang rendah, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan produk yang memiliki diferensiasi sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi konsumen.

Selain inovasi pada aspek produksi, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang sangat besar bagi perempuan pesisir untuk memperluas jaringan pemasaran. Pemanfaatan media sosial, *marketplace*, pembayaran digital, layanan logistik, pemasaran berbasis konten visual, serta strategi *digital branding* memungkinkan produk-produk lokal menjangkau konsumen pada skala regional, nasional, bahkan internasional. Transformasi digital tersebut mengubah pola pemasaran yang sebelumnya hanya bergantung pada pasar tradisional

menjadi sistem pemasaran yang lebih luas, cepat, dan efisien. Dalam era ekonomi digital, kreativitas tidak lagi hanya berkaitan dengan kemampuan menciptakan produk, tetapi juga mencakup kemampuan membangun identitas merek, menciptakan cerita produk (*product storytelling*), membangun hubungan dengan pelanggan, serta memanfaatkan analisis pasar berbasis data untuk memahami kebutuhan konsumen.

Meskipun demikian, kemampuan berinovasi perempuan pesisir masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, minimnya fasilitas produksi, keterbatasan modal usaha, lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual, serta belum optimalnya akses terhadap pasar modern. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas dan inovasi memerlukan dukungan yang berkelanjutan melalui pelatihan desain produk, pendampingan bisnis, penguatan kapasitas digital, fasilitasi sertifikasi produk, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut akan menciptakan ekosistem inovasi yang memungkinkan perempuan pesisir terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas daya saing usahanya.

Dengan demikian, kreativitas dan inovasi produk bukan sekadar strategi bisnis untuk meningkatkan

keuntungan ekonomi, melainkan merupakan instrumen penting dalam proses pemberdayaan perempuan pesisir. Kemampuan menciptakan produk yang inovatif, berkualitas, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal akan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, meningkatkan nilai tambah sumber daya pesisir, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan, perempuan yang kreatif dan inovatif bukan hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan transformasi ekonomi masyarakat pesisir menuju kondisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing.

5.3 Kepemimpinan Perempuan dalam Kelompok Usaha

Kepemimpinan perempuan dalam kelompok usaha merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan keberhasilan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir karena keberadaan seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang mampu mengarahkan potensi individu menjadi kekuatan kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kelompok usaha perempuan, kepemimpinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan formal dalam mengatur

organisasi, melainkan sebagai proses membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang efektif, partisipasi anggota, serta kemampuan menciptakan iklim kerja sama yang mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan kelompok usaha, terutama ketika organisasi menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, perubahan pasar, maupun dinamika sosial yang berkembang di dalam komunitas pesisir.

Perempuan yang dipercaya menjadi pemimpin kelompok usaha umumnya menjalankan berbagai fungsi strategis secara bersamaan. Selain bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan produksi, pemimpin juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan anggota kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta yang memiliki program pemberdayaan ekonomi. Posisi tersebut menjadikan pemimpin sebagai simpul penghubung (*bridging actor*) yang membuka akses terhadap informasi, teknologi, pelatihan, bantuan permodalan, maupun peluang pemasaran yang sebelumnya sulit dijangkau oleh anggota kelompok secara individual. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan tidak

hanya diukur dari kemampuan mengatur aktivitas internal organisasi, tetapi juga dari kapasitas membangun jejaring kemitraan yang mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh anggota kelompok.

Dalam praktiknya, kepemimpinan perempuan di kelompok usaha cenderung berkembang melalui pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan pola kepemimpinan yang bersifat hierarkis. Pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anggota kelompok sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun ikut menentukan arah pengembangan usaha. Pola kepemimpinan seperti ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan organisasi sekaligus memperkuat komitmen anggota dalam melaksanakan berbagai keputusan yang telah disepakati. Northouse (2022) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui interaksi yang memungkinkan terbentuknya hubungan saling percaya antara pemimpin dan pengikut. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, pendekatan kepemimpinan partisipatif menjadi lebih relevan karena mampu meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap organisasi.

Keberhasilan seorang pemimpin juga sangat dipengaruhi oleh kualitas modal sosial yang berkembang di dalam komunitas. Kepercayaan antaranggota, solidaritas, budaya gotong royong, dan norma saling membantu merupakan fondasi yang memungkinkan kelompok usaha bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ketika hubungan sosial dibangun di atas rasa saling percaya, koordinasi kegiatan usaha menjadi lebih mudah dilakukan, biaya transaksi sosial menjadi lebih rendah, dan penyelesaian konflik dapat berlangsung secara lebih konstruktif. Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial yang diwujudkan melalui jaringan sosial, norma bersama, dan kepercayaan kolektif mampu meningkatkan efektivitas tindakan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan membangun dan memelihara modal sosial sebagai kekuatan utama organisasi.

Selain kemampuan teknis dalam mengelola organisasi, pemimpin kelompok usaha juga dituntut memiliki kecakapan komunikasi, kemampuan melakukan negosiasi, menyelesaikan konflik, memotivasi anggota, serta membangun budaya belajar yang mendorong inovasi secara berkelanjutan. Tantangan ekonomi yang semakin kompleks mengharuskan pemimpin mampu merespons perubahan secara cepat, mengidentifikasi peluang usaha baru, serta mengambil keputusan yang adaptif tanpa

mengabaikan kepentingan seluruh anggota kelompok. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting mengingat UMKM perempuan pesisir tidak hanya berhadapan dengan persaingan pasar, tetapi juga dengan perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, serta dinamika kebijakan ekonomi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan keterampilan manajerial, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

5.4 Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku UMKM

Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM perempuan merupakan salah satu prasyarat utama dalam membangun usaha yang tangguh, adaptif, dan mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat. Dalam lingkungan bisnis yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, meningkatnya standar kualitas produk, serta persaingan yang semakin terbuka, kemampuan teknis semata tidak lagi cukup untuk menjamin keberhasilan suatu usaha. Pelaku UMKM dituntut memiliki kapasitas yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta kecakapan

dalam memanfaatkan berbagai peluang yang muncul akibat perubahan lingkungan bisnis.

Kapasitas pelaku usaha pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai bentuk kompetensi yang memungkinkan individu menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan mengelola produksi, menyusun perencanaan usaha, melakukan pencatatan keuangan, mengendalikan biaya operasional, mengembangkan strategi pemasaran, memanfaatkan teknologi informasi, hingga membangun hubungan dengan pelanggan dan mitra usaha. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar pula peluang usaha tersebut untuk bertahan, berkembang, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), keunggulan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan modal finansial atau aset fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Barney (1991) menjelaskan bahwa sumber daya yang mampu menciptakan keunggulan bersaing adalah sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan. Kompetensi kewirausahaan, kreativitas, pengalaman, kemampuan berinovasi, serta jaringan sosial yang dimiliki pelaku UMKM merupakan bagian dari sumber daya strategis yang mampu membedakan suatu

usaha dari para pesaingnya. Dengan demikian, investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi perkembangan UMKM.

Penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi, seperti pelatihan teknis, pendampingan usaha, inkubasi bisnis, sertifikasi produk, penguatan literasi digital, peningkatan kemampuan pemasaran, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Namun demikian, efektivitas berbagai program tersebut sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir. Program pelatihan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil pelaku usaha sering kali menghasilkan dampak yang terbatas karena tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi di lapangan. Oleh sebab itu, proses peningkatan kapasitas harus disusun berdasarkan pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku usaha sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program.

Di samping peningkatan keterampilan teknis, pembentukan pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*) menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pola pikir tersebut ditandai oleh kemampuan melihat peluang di

tengah keterbatasan, keberanian mengambil risiko yang terukur, kesiapan untuk terus belajar, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan usaha. Drucker (1985) menegaskan bahwa kewirausahaan pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan peluang melalui inovasi, bukan sekadar mendirikan usaha baru. Oleh karena itu, pelaku UMKM perempuan perlu didorong untuk mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat agar mampu menghasilkan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing usahanya secara berkelanjutan.

5.5 Membangun Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing merupakan kemampuan suatu usaha dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan pesaing sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Bagi UMKM perempuan di kawasan pesisir, konsep keunggulan bersaing tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga menyangkut kemampuan menghadirkan produk yang memiliki keunikan, kualitas, serta identitas lokal yang mampu memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen. Dalam era persaingan global yang semakin terbuka, keberhasilan usaha tidak lagi hanya ditentukan oleh harga yang murah, melainkan oleh kemampuan

membangun nilai tambah yang sulit ditiru oleh pelaku usaha lain.

Keunikan produk yang dihasilkan perempuan pesisir sebenarnya merupakan modal strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber keunggulan bersaing. Pemanfaatan bahan baku lokal, penggunaan resep tradisional, teknik pengolahan yang diwariskan secara turun-temurun, serta keterkaitan produk dengan budaya masyarakat pesisir merupakan karakteristik yang memberikan identitas kuat terhadap produk. Nilai-nilai lokal tersebut dapat dikembangkan melalui inovasi desain kemasan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi keamanan pangan, hingga pembangunan narasi (*storytelling*) mengenai asal-usul produk sebagai bagian dari strategi pemasaran modern. Konsumen saat ini semakin menghargai produk yang memiliki cerita, nilai budaya, dan dampak sosial yang positif sehingga diferensiasi berbasis identitas lokal menjadi salah satu strategi yang sangat potensial.

Porter (1985) menjelaskan bahwa keunggulan bersaing dapat dibangun melalui tiga strategi utama, yaitu kepemimpinan biaya (*cost leadership*), diferensiasi (*differentiation*), dan fokus (*focus strategy*). Dalam konteks UMKM perempuan pesisir, strategi diferensiasi lebih sesuai karena usaha skala kecil umumnya memiliki keterbatasan dalam mencapai efisiensi biaya seperti perusahaan besar,

tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk yang unik dan bernilai budaya. Diferensiasi tersebut memungkinkan pelaku usaha menciptakan segmen pasar yang lebih spesifik serta mengurangi tekanan persaingan yang hanya bertumpu pada harga.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas peluang UMKM dalam membangun keunggulan bersaing. Kehadiran media sosial, platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), sistem pembayaran digital, hingga teknologi analisis perilaku konsumen memungkinkan pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang relatif rendah. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku UMKM membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui komunikasi dua arah, pelayanan yang lebih cepat, serta promosi yang lebih tepat sasaran. Menurut Kotler dan Keller (2016), kemampuan memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai yang relevan merupakan inti dari strategi pemasaran modern yang berorientasi pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Di sisi lain, keunggulan bersaing tidak akan mampu dipertahankan tanpa didukung oleh inovasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Schumpeter (1934) menyatakan bahwa inovasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi karena menciptakan kombinasi-

kombinasi baru dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran. Bagi UMKM perempuan pesisir, inovasi dapat diwujudkan melalui pengembangan varian produk baru, peningkatan kualitas layanan, penggunaan teknologi pengolahan yang lebih efisien, maupun eksplorasi pasar baru yang memiliki potensi permintaan lebih tinggi. Dengan demikian, inovasi tidak hanya dipahami sebagai penciptaan produk baru, tetapi juga sebagai kemampuan memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Pada akhirnya, pembangunan keunggulan bersaing bagi UMKM perempuan pesisir harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, inovasi yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan jejaring kemitraan, serta penerapan tata kelola usaha yang profesional. Sinergi berbagai aspek tersebut akan memperkuat posisi UMKM perempuan dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi wilayah pesisir yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

BAB 6
Akses Sumber Daya dan Pengembangan Usaha

6.1 Akses terhadap Permodalan

Permodalan merupakan salah satu sumber daya strategis yang memiliki peranan fundamental dalam menentukan keberlangsungan, pertumbuhan, dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam teori pembangunan ekonomi, modal tidak hanya dipahami sebagai sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas produksi, tetapi juga sebagai faktor produksi yang memungkinkan pelaku usaha melakukan akumulasi aset produktif, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas kapasitas usaha, mendorong inovasi, serta memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan pelaku UMKM melakukan investasi pada peralatan produksi, teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga diversifikasi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan modal menyebabkan usaha sulit berkembang karena pelaku usaha cenderung hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional

jangka pendek tanpa memiliki kemampuan melakukan investasi yang mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi pembangunan, akses terhadap permodalan dipandang sebagai salah satu prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Todaro & Smith, 2021).

Bagi pelaku UMKM perempuan, khususnya yang berada di kawasan pesisir, persoalan akses terhadap permodalan memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan pelaku usaha pada sektor formal maupun perusahaan berskala besar. Sebagian besar usaha yang dikelola perempuan masih berbentuk usaha rumah tangga (*home industry*) dengan skala produksi yang relatif kecil, tingkat produktivitas yang terbatas, serta pengelolaan administrasi yang masih sederhana. Karakteristik tersebut menyebabkan posisi UMKM perempuan sering kali berada pada kelompok *unbankable*, yaitu kelompok usaha yang memiliki potensi ekonomi tetapi belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal. Hambatan tersebut muncul karena sebagian besar pelaku usaha belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan kredit, belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, serta memiliki rekam jejak

pembiayaan yang masih terbatas. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan dan minimnya pemahaman mengenai prosedur administrasi pembiayaan menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa enggan atau bahkan tidak percaya diri untuk mengakses layanan keuangan formal. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan modal masih dipenuhi melalui tabungan pribadi, pinjaman keluarga, kelompok arisan, atau lembaga pembiayaan informal yang umumnya mengenakan biaya pinjaman lebih tinggi sehingga berpotensi mengurangi keuntungan usaha dan meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga (Bank Indonesia, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya akses pembiayaan UMKM bukan semata-mata disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan dana di sektor keuangan, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya kesenjangan informasi antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha. Dalam perspektif teori *information asymmetry*, Stiglitz dan Weiss (1981) menjelaskan bahwa lembaga keuangan sering kali menghadapi keterbatasan informasi mengenai kapasitas usaha, tingkat risiko, dan kemampuan pengembalian pinjaman dari calon debitur. Kondisi tersebut mendorong lembaga pembiayaan menerapkan persyaratan yang lebih ketat sebagai bentuk mitigasi risiko, seperti kewajiban menyediakan agunan, laporan keuangan, atau rekam jejak usaha yang baik. Di sisi lain, sebagian

besar pelaku UMKM belum memiliki kapasitas administratif maupun kelembagaan yang mampu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga meskipun memiliki prospek usaha yang baik, mereka tetap mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan formal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan akses modal tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan informasi, kapasitas kelembagaan, dan tingkat literasi ekonomi antara penyedia dana dan pelaku usaha.

Selain dipengaruhi oleh aspek kelembagaan keuangan, akses terhadap permodalan juga berkaitan erat dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal secara mudah, terjangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Menurut Demirgüç-Kunt et al. (2022), peningkatan inklusi keuangan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha karena memperluas akses masyarakat terhadap tabungan, pembiayaan, asuransi, maupun layanan pembayaran digital yang mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Dalam konteks UMKM perempuan pesisir, perluasan inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan kemampuan memperoleh modal usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi

rumah tangga melalui akses terhadap berbagai instrumen keuangan yang lebih aman dibandingkan mekanisme pembiayaan informal.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sektor UMKM, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan pembiayaan yang bertujuan memperluas akses modal sekaligus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta berbagai skema pembiayaan melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengurangi berbagai hambatan akses modal yang selama ini dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Berbagai program tersebut tidak hanya menawarkan pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan komersial, tetapi juga diintegrasikan dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, konsultasi bisnis, serta penguatan kapasitas kelembagaan sehingga pembiayaan yang diterima benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengelola modal secara produktif melalui perencanaan usaha yang baik, pencatatan

keuangan yang tertib, inovasi produk, dan orientasi terhadap pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital turut menghadirkan paradigma baru dalam sistem pembiayaan UMKM melalui lahirnya berbagai inovasi pada sektor teknologi finansial (*financial technology*). Kehadiran layanan *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dompet digital, *embedded finance*, hingga berbagai platform pembiayaan berbasis teknologi telah memperluas pilihan sumber modal bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan perbankan konvensional. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses analisis kelayakan kredit dilakukan secara lebih cepat melalui penggunaan data digital (*alternative credit scoring*), sehingga memperpendek waktu pencairan dana sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada kelompok usaha mikro yang berada di wilayah terpencil. World Bank (2022) menjelaskan bahwa inovasi digital pada sektor keuangan mampu mempercepat inklusi keuangan karena mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diikuti dengan berbagai tantangan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, risiko gagal bayar, serta meningkatnya potensi penyalahgunaan layanan pinjaman

daring ilegal. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi finansial harus disertai dengan peningkatan literasi digital, literasi keuangan, serta penguatan regulasi agar manfaat inovasi keuangan digital dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan risiko baru bagi pelaku UMKM.

Lebih jauh lagi, akses terhadap permodalan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekosistem kewirausahaan (*entrepreneurial ecosystem*) yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha secara berkelanjutan. Stam (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu ekosistem kewirausahaan ditentukan oleh interaksi yang harmonis antara berbagai elemen, seperti kebijakan pemerintah, sistem pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, budaya kewirausahaan, dukungan teknologi, jaringan bisnis, pasar, serta keberadaan institusi pendukung. Dengan demikian, penyediaan modal usaha semata tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak diiringi oleh peningkatan kapasitas kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, pengembangan inovasi, akses terhadap teknologi, serta terbentuknya jejaring kemitraan yang mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akses terhadap permodalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan UMKM yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi

masyarakat. Modal harus dipandang sebagai instrumen pemberdayaan yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan inovasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan akses permodalan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha itu sendiri sehingga tercipta ekosistem pembiayaan yang inklusif, adaptif, berkelanjutan, serta mampu mendorong transformasi UMKM menjadi usaha yang lebih produktif, inovatif, tangguh, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun global.

6.2 Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM

Literasi keuangan merupakan salah satu kompetensi mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, karena kemampuan memahami konsep-konsep keuangan, mengelola sumber daya finansial secara efektif, serta mengambil keputusan ekonomi yang rasional menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Dalam konteks UMKM, literasi keuangan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan melakukan pencatatan transaksi atau menghitung

keuntungan, tetapi juga mencakup kemampuan menyusun perencanaan keuangan, mengelola arus kas, melakukan analisis biaya dan manfaat, mengendalikan risiko usaha, memahami berbagai produk jasa keuangan, hingga menyusun strategi investasi yang mampu mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, tingkat literasi keuangan yang baik akan mendorong lahirnya keputusan bisnis yang lebih objektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha (OECD, 2020).

Pada kenyataannya, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan usaha. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah belum adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga seluruh transaksi keuangan bercampur dalam satu sistem pengelolaan yang sulit dievaluasi secara objektif. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui tingkat keuntungan yang sebenarnya, mengukur efisiensi operasional, menyusun perencanaan investasi, maupun menentukan strategi pengembangan usaha berdasarkan kondisi keuangan yang riil. Selain itu, ketiadaan laporan keuangan yang sistematis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM mengalami hambatan ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan formal, karena laporan keuangan merupakan salah satu

indikator utama dalam proses penilaian kelayakan usaha oleh pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap pembiayaan sering kali bukan hanya disebabkan oleh terbatasnya modal yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara profesional. Dalam perspektif manajemen keuangan, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian yang memungkinkan pelaku usaha melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis, mengidentifikasi berbagai sumber pemborosan, mengukur tingkat profitabilitas, serta merancang strategi pengembangan usaha secara lebih terencana. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan daya saing UMKM secara menyeluruh.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat inklusi keuangan nasional, karena masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu memilih produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, menghindari praktik investasi ilegal maupun pinjaman daring yang merugikan,

serta memanfaatkan berbagai layanan keuangan formal secara lebih produktif. Dalam konteks UMKM, peningkatan literasi keuangan juga akan memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai fasilitas pembiayaan pemerintah maupun lembaga keuangan sehingga modal yang diperoleh dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang penguatan literasi keuangan melalui pemanfaatan berbagai aplikasi pencatatan keuangan, perangkat lunak akuntansi berbasis *cloud*, sistem pembayaran digital, hingga aplikasi pengelolaan kas yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kehadiran teknologi tersebut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan secara lebih akurat, melakukan pemantauan arus kas secara real time, serta memperoleh informasi keuangan yang lebih cepat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut tetap sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, sehingga penguatan literasi digital perlu berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan.

Lebih jauh lagi, literasi keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketahanan dan keberlanjutan usaha. OECD (2020) menegaskan bahwa pelaku usaha yang

memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai risiko ekonomi, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, inflasi, gangguan rantai pasok, maupun krisis ekonomi yang bersifat global. Kemampuan menyusun dana cadangan, mengelola arus kas secara disiplin, melakukan diversifikasi sumber pendapatan, serta mengambil keputusan investasi berdasarkan analisis yang rasional menjadi faktor yang menentukan kemampuan suatu usaha untuk bertahan dalam berbagai kondisi yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan tidak hanya merupakan upaya memperbaiki aspek administrasi usaha, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun UMKM yang tangguh, adaptif, profesional, dan memiliki daya saing yang berkelanjutan.

6.3 Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Usaha

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis, mulai dari proses produksi, pengelolaan sumber daya, pemasaran, hingga interaksi dengan konsumen. Transformasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari model bisnis konvensional menuju model bisnis berbasis digital yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika pasar. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

digitalisasi bukan lagi dipandang sebagai pilihan yang bersifat pelengkap (*optional*), melainkan telah berkembang menjadi kebutuhan strategis yang menentukan kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi digital. Konsumen modern tidak hanya menginginkan produk yang berkualitas, tetapi juga menuntut kemudahan memperoleh informasi, kecepatan layanan, fleksibilitas transaksi, serta pengalaman berbelanja yang praktis melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, kemampuan pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital menjadi salah satu indikator penting yang menentukan daya saing dan keberlanjutan usaha pada era ekonomi digital (OECD, 2021).

Transformasi digital pada UMKM dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk inovasi teknologi yang mendukung efisiensi operasional maupun efektivitas pemasaran. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi memungkinkan pelaku usaha membangun komunikasi yang lebih intensif dengan konsumen sekaligus memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Selain itu, penggunaan *marketplace* memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produk kepada konsumen nasional maupun internasional tanpa

harus memiliki toko fisik dengan biaya operasional yang tinggi. Digitalisasi juga mencakup penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis *cloud*, sistem pembayaran elektronik (*cashless payment*), teknologi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), aplikasi manajemen persediaan, hingga pemanfaatan analisis data (*data analytics*) yang memungkinkan pelaku usaha memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2022), digitalisasi UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional karena mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain memberikan kemudahan dalam proses pemasaran, pemanfaatan teknologi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses bisnis secara menyeluruh. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan keuangan, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui sistem layanan berbasis digital. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi karena

berbagai aktivitas operasional dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan berbasis data sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih efektif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung aktivitas usaha, tetapi telah berkembang menjadi sumber keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

Meskipun demikian, proses transformasi digital pada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital pelaku usaha, terutama pada kelompok UMKM tradisional yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan perangkat digital, rendahnya pemahaman mengenai pemasaran digital, serta kurangnya kemampuan mengelola data usaha menyebabkan pemanfaatan teknologi belum memberikan hasil yang optimal. Di samping itu, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, biaya investasi teknologi yang dianggap cukup tinggi, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital dan perlindungan data konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih memandang digitalisasi sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai

investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha.

Bank Indonesia (2022) menegaskan bahwa digitalisasi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan efisiensi sistem pembayaran, perluasan inklusi keuangan, peningkatan produktivitas usaha, serta percepatan integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Oleh sebab itu, transformasi digital perlu didukung melalui berbagai kebijakan yang komprehensif, antara lain peningkatan literasi digital, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, penguatan keamanan siber, perluasan akses internet berkualitas, serta pendampingan berkelanjutan dalam penggunaan berbagai platform digital. Dengan adanya dukungan tersebut, digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional UMKM, tetapi juga memperkuat kemampuan inovasi, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia pada pasar domestik maupun global.

6.4 Penguatan Kemitraan dan Jejaring Bisnis

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, keberhasilan suatu usaha tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan kolaborasi yang

dibangun dengan berbagai pihak dalam ekosistem bisnis. Oleh karena itu, kemitraan usaha (*business partnership*) berkembang menjadi salah satu strategi penting yang memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau apabila hanya mengandalkan kapasitas internal perusahaan. Melalui kemitraan yang dibangun secara saling menguntungkan, pelaku UMKM dapat memperoleh akses terhadap teknologi, informasi pasar, sumber pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, hingga perluasan jaringan distribusi. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kemitraan dipandang sebagai mekanisme kolaboratif yang mampu memperkuat struktur ekonomi melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha kecil sebagai aktor utama pembangunan ekonomi lokal (OECD, 2023).

Jejaring bisnis (*business networking*) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan peluang keberhasilan usaha karena memungkinkan pelaku UMKM memperoleh berbagai informasi yang relevan mengenai perkembangan pasar, perubahan preferensi konsumen, peluang investasi, inovasi teknologi, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas. Semakin luas jaringan bisnis yang dimiliki, semakin besar pula peluang pelaku usaha untuk

membangun kolaborasi, memperluas pangsa pasar, memperoleh mitra strategis, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selain memberikan manfaat ekonomi, jejaring bisnis juga menjadi media pembelajaran kolektif melalui pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik (*best practices*), serta penyebaran pengetahuan yang dapat mempercepat proses inovasi dan peningkatan kapasitas usaha. Menurut Granovetter (1973), hubungan sosial yang luas melalui jaringan bisnis memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi karena informasi yang diperoleh dari jejaring sering kali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan bisnis.

Dalam perspektif rantai nilai (*value chain*), kemitraan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi. Porter (1998) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal dalam menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas hubungan dengan pemasok, distributor, konsumen, serta berbagai pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses penciptaan nilai. Oleh karena itu, penguatan kemitraan menjadi strategi yang sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperluas akses pemasaran, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi

harga, serta meningkatkan kemampuan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar modern. Bentuk kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama pemasaran, pengembangan produk bersama, kemitraan dengan industri besar, kolaborasi dalam kegiatan promosi, hingga kerja sama penelitian dan pengembangan produk inovatif.

Pemerintah Indonesia juga telah mendorong pengembangan kemitraan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta berbagai komunitas kewirausahaan. Pendekatan kolaboratif tersebut bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai pasok nasional maupun global. Dengan demikian, penguatan kemitraan dan jejaring bisnis bukan sekadar memperluas hubungan antarpelaku usaha, tetapi juga menjadi strategi pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

6.5 Peran Kelembagaan dalam Mendukung UMKM

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada hakikatnya merupakan proses pembangunan

ekonomi yang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi. Kelembagaan berfungsi sebagai seperangkat aturan, norma, organisasi, dan mekanisme koordinasi yang mengatur interaksi antarpelaku ekonomi sehingga tercipta lingkungan usaha yang kondusif, stabil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan UMKM, kelembagaan mencakup pemerintah, lembaga keuangan, koperasi, asosiasi usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, hingga komunitas bisnis yang secara bersama-sama menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pendampingan, fasilitasi pembiayaan, pengembangan kapasitas, serta penyediaan akses terhadap berbagai sumber daya produktif. Keberadaan kelembagaan yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu mendukung lahirnya usaha-usaha yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi (North, 1990).

Pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan, penyediaan akses pembiayaan, pengembangan

infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitasi promosi produk, hingga perlindungan terhadap usaha kecil dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka. Kebijakan yang dirancang secara konsisten dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha akan menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM untuk melakukan investasi, memperluas usaha, dan melakukan inovasi secara berkelanjutan. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), institusi yang inklusif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi untuk berkembang.

Selain pemerintah, koperasi dan asosiasi usaha memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat posisi tawar UMKM melalui penyediaan berbagai layanan yang sulit diperoleh apabila pelaku usaha bergerak secara individual. Melalui kelembagaan tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh pelatihan kewirausahaan, akses terhadap informasi pasar, pendampingan hukum, sertifikasi produk, penguatan kapasitas manajemen, hingga peluang membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kelembagaan ekonomi juga berfungsi sebagai media koordinasi yang memungkinkan pelaku usaha melakukan kerja sama dalam pengadaan bahan baku, pemasaran bersama, maupun pengembangan inovasi sehingga tercipta

efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. North (1990) menegaskan bahwa institusi formal maupun informal berperan dalam mengurangi ketidakpastian transaksi ekonomi, memperkuat koordinasi antaraktor, serta meningkatkan efisiensi sistem ekonomi secara keseluruhan.

Perguruan tinggi memiliki kontribusi yang tidak kalah penting melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan seperti inkubasi bisnis, pelatihan kewirausahaan, pendampingan digitalisasi usaha, pengembangan desain produk, penelitian pasar, hingga transfer teknologi merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat sejalan dengan konsep *Quadruple Helix*, yang menempatkan inovasi sebagai hasil interaksi berbagai aktor pembangunan (Carayannis & Campbell, 2009). Melalui sinergi kelembagaan yang berjalan secara efektif, pengembangan UMKM tidak hanya menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 7
Pemasaran Produk UMKM Pesisir

7.1 Strategi Pemasaran Konvensional dan Digital

Pemasaran merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena keberhasilan suatu usaha pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan nilai (value), membangun hubungan dengan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta mempertahankan keberlanjutan permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Dalam konteks UMKM pesisir, fungsi pemasaran menjadi semakin penting mengingat sebagian besar produk yang dipasarkan berasal dari komoditas kelautan dan perikanan yang memiliki karakteristik khusus, seperti ketergantungan terhadap musim produksi, sifat produk yang mudah rusak (*perishable goods*), fluktuasi ketersediaan bahan baku, serta persaingan yang semakin terbuka akibat perkembangan perdagangan digital. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang diterapkan oleh pelaku UMKM pesisir tidak dapat hanya berorientasi pada aktivitas penjualan semata, tetapi harus dirancang sebagai suatu sistem yang mampu mengintegrasikan aspek produksi, komunikasi, distribusi,

pelayanan konsumen, inovasi, dan pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Kotler, Keller, & Chernev, 2022).

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat pesisir, pemasaran konvensional masih menjadi pola yang paling banyak digunakan karena telah terbentuk melalui hubungan sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Penjualan secara langsung di pasar tradisional, kios desa, tempat pelelangan ikan, koperasi nelayan, maupun melalui jaringan pengepul lokal merupakan mekanisme distribusi yang telah lama menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat pesisir. Pola pemasaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi media interaksi sosial yang memperkuat hubungan kepercayaan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Kepercayaan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena mampu mengurangi biaya transaksi, memperlancar proses negosiasi, serta menciptakan loyalitas pelanggan yang dibangun melalui hubungan personal dan kedekatan sosial. Dalam perspektif modal sosial, hubungan berbasis kepercayaan menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Putnam, 1993).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, pemasaran konvensional juga menghadapi berbagai keterbatasan yang semakin nyata seiring berkembangnya globalisasi dan

digitalisasi ekonomi. Jangkauan pemasaran yang terbatas pada wilayah tertentu menyebabkan peluang peningkatan penjualan menjadi relatif kecil, sementara ketergantungan terhadap perantara atau pengepul sering kali mengurangi nilai tambah yang diterima oleh produsen. Selain itu, tingginya biaya distribusi, keterbatasan informasi mengenai kebutuhan pasar, rendahnya akses terhadap promosi, serta ketidakmampuan menjangkau konsumen di luar daerah menjadi hambatan yang menyebabkan daya saing UMKM pesisir sulit berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasaran tradisional perlu diperkuat melalui pendekatan baru yang mampu memperluas akses pasar tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat pesisir.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap paradigma pemasaran modern. Digitalisasi tidak hanya mengubah media yang digunakan dalam memasarkan produk, tetapi juga mengubah perilaku konsumen, pola interaksi antara produsen dan pelanggan, serta mekanisme terbentuknya keputusan pembelian. Konsumen saat ini cenderung melakukan pencarian informasi, membandingkan harga, membaca ulasan pelanggan, hingga melakukan transaksi melalui berbagai platform digital sebelum memutuskan untuk membeli

suatu produk. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM pesisir untuk mulai memanfaatkan berbagai teknologi digital, seperti media sosial, situs web, *marketplace*, aplikasi pesan instan, sistem pembayaran elektronik, hingga layanan logistik berbasis digital sebagai bagian dari strategi pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan perilaku pasar. Menurut Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022), pemasaran digital merupakan proses strategis yang mengintegrasikan teknologi digital dengan seluruh aktivitas pemasaran guna menciptakan komunikasi yang lebih interaktif, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta membangun hubungan jangka panjang yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumen.

Bagi perempuan pelaku UMKM pesisir, transformasi menuju pemasaran digital juga memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perluasan saluran penjualan. Pemanfaatan teknologi digital memberikan kesempatan untuk mengurangi hambatan geografis, memperluas jejaring bisnis, memperoleh informasi mengenai tren pasar, melakukan promosi dengan biaya yang relatif rendah, serta meningkatkan daya tawar terhadap perantara perdagangan. Melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik, produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal oleh masyarakat sekitar kini memiliki peluang untuk dipasarkan kepada konsumen di

tingkat nasional bahkan internasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah membuka ruang demokratisasi pasar, di mana pelaku usaha berskala mikro memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing berdasarkan kualitas produk, inovasi, dan kemampuan membangun komunikasi dengan konsumen, bukan semata-mata berdasarkan besarnya modal usaha.

Namun demikian, keberhasilan transformasi pemasaran digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi tersebut secara produktif. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses internet di sebagian wilayah pesisir, minimnya kemampuan menghasilkan konten promosi yang menarik, serta rendahnya pemahaman mengenai analisis perilaku konsumen masih menjadi tantangan yang dihadapi banyak pelaku UMKM. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas digital melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. OECD (2021) menegaskan bahwa transformasi digital UMKM hanya akan menghasilkan peningkatan produktivitas apabila diikuti oleh peningkatan kompetensi digital pelaku usaha serta tersedianya ekosistem pendukung yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa strategi pemasaran yang paling efektif bagi UMKM pesisir bukanlah memilih antara pemasaran konvensional atau digital, melainkan membangun integrasi yang saling melengkapi di antara keduanya. Hubungan sosial yang telah terbangun melalui pemasaran konvensional tetap menjadi modal penting dalam menjaga loyalitas pelanggan lokal, sementara pemasaran digital memberikan peluang ekspansi pasar yang jauh lebih luas. Sinergi kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan sistem pemasaran yang lebih adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM pesisir di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

7.2 Branding Produk Berbasis Identitas Lokal

Persaingan usaha yang semakin kompetitif pada era globalisasi dan digitalisasi telah mengubah orientasi pemasaran dari sekadar menjual produk menjadi membangun makna, pengalaman, dan identitas yang mampu menciptakan hubungan emosional antara produk dengan konsumennya. Dalam konteks tersebut, merek (*brand*) tidak lagi dipahami hanya sebagai nama dagang, logo, warna, atau simbol visual yang membedakan suatu produk dari produk lain, melainkan sebagai representasi keseluruhan nilai, reputasi, kualitas, pengalaman, dan

kepercayaan yang terbentuk dalam persepsi konsumen terhadap suatu produk maupun produsen. Aaker (1996) menjelaskan bahwa merek merupakan aset strategis yang memiliki kemampuan menciptakan nilai ekonomi melalui pembentukan loyalitas pelanggan, diferensiasi produk, serta peningkatan persepsi kualitas yang sulit ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, pembangunan merek harus dipahami sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.

Dalam konteks UMKM pesisir, pembangunan merek memiliki dimensi yang lebih luas karena produk yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya, sejarah lokal, serta karakteristik lingkungan pesisir tempat produk tersebut berasal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman budaya maritim, teknik pengolahan hasil laut, tradisi kuliner, serta kearifan lokal yang sangat kaya dan berbeda pada setiap wilayah pesisir. Kekayaan tersebut merupakan sumber keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh produk-produk industri berskala massal. Oleh sebab itu, identitas lokal seharusnya tidak dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pemasaran, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun keunikan merek yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi

sekaligus memperkuat posisi produk di pasar yang semakin kompetitif.

Branding berbasis identitas lokal dapat diwujudkan melalui berbagai elemen yang saling terintegrasi, mulai dari penggunaan nama produk yang mencerminkan daerah asal, desain kemasan yang mengangkat motif budaya pesisir, narasi mengenai sejarah produk, proses produksi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, hingga komitmen terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut. Strategi tersebut memungkinkan konsumen memperoleh pengalaman yang lebih bermakna karena mereka tidak hanya membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga membeli cerita, nilai budaya, serta identitas yang melekat pada produk tersebut. Keller (2013) menjelaskan bahwa kekuatan suatu merek terbentuk melalui asosiasi positif yang berkembang dalam ingatan konsumen sehingga mampu menciptakan loyalitas jangka panjang dan meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian ulang.

Perubahan perilaku konsumen global menunjukkan bahwa keputusan pembelian semakin dipengaruhi oleh aspek emosional, autentisitas, keberlanjutan, dan nilai budaya yang terkandung dalam suatu produk. Konsumen modern cenderung memberikan apresiasi lebih tinggi terhadap produk yang memiliki cerita asal-usul yang jelas,

diproduksi secara bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, branding berbasis identitas lokal menjadi strategi yang sangat relevan bagi UMKM pesisir karena mampu menghubungkan produk dengan tren konsumsi yang semakin mengutamakan pengalaman (*experiential value*) dibandingkan sekadar fungsi utilitas produk. Dalam perspektif pemasaran kontemporer, nilai simbolik dan emosional yang melekat pada suatu merek sering kali menjadi faktor pembeda yang lebih kuat dibandingkan keunggulan teknis produk itu sendiri (Kotler, Keller, & Chernev, 2022).

Selain memberikan manfaat ekonomi, branding berbasis identitas lokal juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang sangat penting bagi pembangunan wilayah pesisir. Ketika produk lokal diposisikan sebagai representasi budaya masyarakat pesisir, maka proses pemasaran secara tidak langsung turut berperan dalam melestarikan pengetahuan tradisional, memperkuat identitas komunitas, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap potensi daerahnya. Produk UMKM kemudian tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi media diplomasi budaya, promosi pariwisata, dan penguatan citra wilayah yang mampu menarik perhatian pasar yang lebih luas. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, integrasi antara

aktivitas ekonomi dan pelestarian budaya merupakan strategi yang mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan tanpa menghilangkan karakter lokal yang menjadi sumber keunggulan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, pembangunan merek berbasis identitas lokal harus dipahami sebagai proses strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan ke dalam keseluruhan pengalaman yang diterima oleh konsumen. Semakin kuat identitas lokal yang mampu dikomunikasikan melalui suatu merek, semakin besar pula peluang produk UMKM pesisir untuk membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian budaya maritim dan pembangunan ekonomi wilayah pesisir yang inklusif serta berkelanjutan.

7.3 Pengemasan dan Standarisasi Produk

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, pengemasan (*packaging*) telah mengalami perubahan fungsi yang sangat signifikan. Jika pada masa lalu kemasan dipahami terutama sebagai sarana untuk melindungi produk dari kerusakan fisik selama proses penyimpanan dan distribusi, maka dalam perkembangan ekonomi modern kemasan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan fungsi perlindungan, komunikasi pemasaran, pembentukan identitas merek,

penyampaian informasi kepada konsumen, serta penciptaan nilai tambah terhadap suatu produk. Oleh karena itu, kualitas kemasan tidak lagi dipandang sebagai elemen pelengkap, tetapi menjadi salah satu faktor yang menentukan persepsi konsumen terhadap mutu, keamanan, dan profesionalisme suatu usaha. Kotler dan Keller (2022) menjelaskan bahwa kemasan merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang memiliki kemampuan memengaruhi persepsi konsumen bahkan sebelum mereka melakukan penilaian terhadap kualitas produk yang sesungguhnya.

Bagi UMKM yang berkembang di kawasan pesisir, aspek pengemasan memiliki arti yang jauh lebih penting karena sebagian besar produk yang dihasilkan berupa komoditas pangan berbasis hasil perikanan yang memiliki karakteristik mudah mengalami penurunan mutu apabila tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Produk seperti ikan asap, abon ikan, kerupuk ikan, ikan asin, terasi, maupun berbagai olahan hasil laut lainnya sangat rentan terhadap kelembapan, paparan cahaya, oksidasi, kontaminasi mikroorganisme, serta perubahan suhu selama proses penyimpanan dan distribusi. Oleh sebab itu, pemilihan jenis bahan kemasan, desain struktur kemasan, hingga teknik pengemasan yang sesuai dengan karakteristik produk menjadi faktor yang sangat

menentukan keberhasilan usaha dalam menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen.

Selain menjalankan fungsi proteksi, kemasan juga berperan sebagai media komunikasi yang memberikan berbagai informasi penting kepada konsumen mengenai karakteristik produk yang akan dibeli. Informasi mengenai komposisi bahan baku, kandungan gizi, tanggal produksi, batas kedaluwarsa, nomor izin edar, sertifikasi halal, identitas produsen, petunjuk penyimpanan, hingga kode produksi merupakan bagian dari tanggung jawab produsen dalam memberikan kepastian informasi kepada konsumen sekaligus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Kejelasan informasi tersebut bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme pelaku usaha dalam mengelola produk secara bertanggung jawab.

Di samping fungsi informatif, desain visual kemasan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun citra merek (*brand image*) dan diferensiasi produk di tengah persaingan pasar. Penggunaan kombinasi warna, ilustrasi, tipografi, logo, serta identitas visual yang konsisten mampu memperkuat daya tarik produk sekaligus membangun asosiasi tertentu di benak konsumen. Dalam konteks UMKM pesisir, kemasan juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan identitas budaya lokal melalui penggunaan motif tradisional, cerita mengenai asal-

usul produk, maupun narasi mengenai praktik pengolahan yang berbasis kearifan lokal. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai estetika produk, tetapi juga memberikan pengalaman emosional kepada konsumen sehingga produk memiliki posisi yang lebih kuat di pasar.

Pengemasan yang berkualitas harus berjalan seiring dengan penerapan standarisasi produk yang konsisten. Standarisasi merupakan proses penetapan spesifikasi mutu yang menjadi acuan dalam setiap tahapan produksi sehingga kualitas produk tetap terjaga meskipun diproduksi dalam jumlah yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Konsistensi mutu menjadi aspek yang sangat penting karena kepercayaan konsumen tidak hanya dibangun melalui pengalaman pembelian pertama, tetapi juga melalui kepastian bahwa kualitas produk akan tetap sama pada setiap pembelian berikutnya. Menurut International Organization for Standardization (ISO, 2021), penerapan standar mutu memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi proses produksi, pengurangan kesalahan operasional, peningkatan konsistensi kualitas, serta memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk maupun organisasi.

Bagi UMKM pesisir yang ingin memperluas jangkauan pemasaran menuju pasar modern, supermarket, jaringan ritel nasional, hotel, restoran, bahkan pasar ekspor, penerapan standar mutu bukan lagi menjadi pilihan,

melainkan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Berbagai sertifikasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), izin BPOM untuk produk tertentu, sertifikasi halal, hingga penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) menjadi instrumen yang memperkuat legitimasi usaha sekaligus membuka peluang akses ke pasar yang memiliki persyaratan kualitas lebih tinggi.

Dengan demikian, investasi pada pengemasan dan standarisasi produk tidak dapat dipandang sebagai tambahan biaya produksi semata, melainkan sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Produk yang memiliki kemasan menarik, informasi yang lengkap, standar mutu yang konsisten, serta identitas merek yang kuat akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, mampu membangun loyalitas konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas peluang memasuki pasar yang lebih kompetitif baik pada tingkat nasional maupun internasional.

7.4 Perluasan Akses Pasar

Keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam membangun dan

memperluas akses terhadap pasar yang menjadi tujuan distribusi produk tersebut. Dalam konteks ekonomi pesisir, perluasan akses pasar merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan keberlanjutan usaha karena pertumbuhan produksi tanpa diikuti oleh peningkatan kapasitas pemasaran akan menyebabkan terjadinya penumpukan produk, keterbatasan perputaran modal, dan rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, pengembangan pasar harus dipahami sebagai proses yang berlangsung secara berkesinambungan melalui perluasan jaringan konsumen, peningkatan daya saing produk, serta penguatan hubungan kemitraan dengan berbagai pelaku dalam rantai nilai.

Sebagian besar UMKM pesisir pada awalnya memasarkan produknya dalam lingkup yang relatif terbatas, yaitu kepada masyarakat sekitar, pasar tradisional, atau melalui jaringan pelanggan tetap yang terbentuk berdasarkan hubungan sosial di lingkungan setempat. Meskipun pola pemasaran tersebut memiliki keunggulan berupa kedekatan dengan konsumen, skala pasar yang terbatas menyebabkan peluang peningkatan pendapatan menjadi relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha memerlukan strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen baru tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada pelanggan yang telah ada.

Perluasan akses pasar pada era globalisasi memerlukan dukungan berbagai komponen yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan kualitas produk, penguatan identitas merek, penerapan standar mutu, pengembangan sistem distribusi, hingga kemampuan pelaku usaha dalam memahami perubahan perilaku konsumen. Produk yang memiliki kualitas baik tetapi tidak didukung oleh strategi pemasaran yang tepat akan mengalami kesulitan bersaing dengan produk lain yang lebih dikenal oleh masyarakat. Sebaliknya, strategi promosi yang intensif tanpa diikuti oleh kualitas produk yang konsisten juga akan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Peran pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta menjadi sangat penting dalam memperkuat kapasitas UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Berbagai program fasilitasi seperti pameran produk, promosi dagang, pelatihan pemasaran, sertifikasi produk, pendampingan ekspor, hingga kemitraan dengan jaringan ritel modern merupakan bentuk intervensi yang mampu memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha berskala kecil. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa pengembangan ekosistem UMKM harus diarahkan pada peningkatan akses pasar

melalui integrasi antara transformasi digital, peningkatan kualitas produk, dan penguatan jejaring kemitraan.

Perubahan pola konsumsi masyarakat juga membuka peluang baru bagi UMKM pesisir untuk mengembangkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Konsumen modern tidak lagi hanya mempertimbangkan harga sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, keaslian produk lokal, serta cerita di balik proses produksinya. Produk yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek tersebut akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan produk yang hanya bersaing melalui harga.

Porter (1985) menjelaskan bahwa keunggulan bersaing (*competitive advantage*) tidak hanya diperoleh melalui efisiensi biaya produksi, tetapi juga melalui kemampuan perusahaan menciptakan nilai yang berbeda (*differentiation*) sehingga konsumen memiliki alasan yang kuat untuk memilih produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Dalam konteks UMKM pesisir, diferensiasi dapat diwujudkan melalui inovasi produk, penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas, desain kemasan yang menarik, sertifikasi mutu, maupun penguatan identitas budaya lokal sebagai bagian dari strategi pemasaran.

Dengan demikian, perluasan akses pasar bukan sekadar upaya meningkatkan volume penjualan, tetapi

merupakan proses strategis yang menghubungkan peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan usaha, pembangunan jaringan kemitraan, serta adaptasi terhadap dinamika kebutuhan konsumen. Semakin luas akses pasar yang dimiliki UMKM, semakin besar pula peluang usaha tersebut untuk berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.

7.5 Optimalisasi Media Sosial dan Marketplace

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap pola komunikasi, perilaku konsumen, serta sistem pemasaran produk pada berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM yang berkembang di kawasan pesisir. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi mengenai suatu produk, tetapi juga mengubah proses interaksi antara produsen dan konsumen, mekanisme transaksi, sistem pembayaran, hingga strategi membangun loyalitas pelanggan. Dalam kondisi tersebut, media sosial dan *marketplace* berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemasaran modern karena keduanya mampu mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara lebih cepat, luas, dan efisien dibandingkan pendekatan pemasaran konvensional.

Media sosial memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen sehingga hubungan yang dibangun tidak lagi bersifat satu arah sebagaimana iklan tradisional. Melalui berbagai platform digital, pelaku UMKM dapat menyampaikan informasi mengenai produk, memperlihatkan proses produksi, membagikan cerita mengenai asal-usul usaha, memperkenalkan nilai budaya lokal, serta merespons pertanyaan maupun keluhan pelanggan secara langsung. Aktivitas tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan, memperkuat kedekatan emosional dengan konsumen, sekaligus menciptakan komunitas pelanggan yang memiliki keterikatan terhadap merek yang dikembangkan.

Kaplan dan Haenlein (2010) menjelaskan bahwa media sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna menciptakan, berbagi, serta bertukar berbagai bentuk konten sehingga proses komunikasi tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh produsen, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif konsumen. Dalam konteks pemasaran UMKM pesisir, kondisi tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan pelaku usaha untuk membangun citra produk melalui penyajian konten visual yang menarik, testimoni pelanggan, video edukasi, maupun narasi

mengenai proses pengolahan hasil laut yang higienis dan berkelanjutan.

Selain media sosial, perkembangan *marketplace* telah menciptakan ekosistem perdagangan digital yang mendukung seluruh proses bisnis secara terintegrasi, mulai dari promosi produk, pengelolaan katalog, transaksi pembayaran, pengiriman barang, hingga sistem penilaian kepuasan pelanggan. Keberadaan *marketplace* memungkinkan UMKM pesisir memasarkan produknya kepada konsumen dari berbagai daerah tanpa harus membuka toko fisik maupun membangun jaringan distribusi secara mandiri. Kemudahan tersebut secara signifikan menurunkan hambatan masuk ke pasar (*market entry barrier*) yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi usaha berskala mikro.

Meskipun demikian, keberhasilan pemasaran melalui *marketplace* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan toko digital, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kualitas layanan secara konsisten. Kecepatan merespons pesanan, ketepatan pengiriman, kualitas kemasan, kesesuaian produk dengan deskripsi, pengelolaan ulasan pelanggan, hingga kemampuan menjaga reputasi toko merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. Oleh karena itu, penguasaan teknologi digital harus diimbangi dengan

peningkatan kapasitas manajemen usaha agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara optimal.

Optimalisasi media sosial dan *marketplace* juga perlu didukung oleh kemampuan menghasilkan konten pemasaran yang berkualitas. Foto produk dengan pencahayaan yang baik, video pendek mengenai proses produksi, cerita tentang pemberdayaan perempuan pesisir, informasi mengenai manfaat produk, hingga penyampaian identitas budaya lokal merupakan bentuk *content marketing* yang mampu meningkatkan keterlibatan (*engagement*) konsumen sekaligus membangun diferensiasi produk di tengah persaingan pasar digital. Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022) menyatakan bahwa pemasaran digital yang efektif merupakan kombinasi antara pemanfaatan teknologi, penyusunan strategi komunikasi yang tepat, analisis perilaku konsumen, serta pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Dengan demikian, pemanfaatan media sosial dan *marketplace* seharusnya tidak dipahami hanya sebagai sarana meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari transformasi model bisnis menuju usaha yang lebih inovatif, adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Ketika teknologi digital mampu diintegrasikan dengan kualitas produk, pelayanan yang profesional, serta strategi komunikasi yang efektif, UMKM pesisir akan memiliki

peluang yang jauh lebih besar untuk memperluas pasar, memperkuat daya saing, dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

BAB 8
Kebijakan dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir

8.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kemampuan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi, terutama ketika perekonomian menghadapi berbagai tekanan akibat krisis maupun perubahan kondisi global. Dalam konteks wilayah pesisir, keberadaan UMKM memiliki makna yang lebih strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga menjadi mekanisme adaptasi rumah tangga nelayan terhadap tingginya ketidakpastian pendapatan yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Fluktuasi musim, perubahan iklim, cuaca ekstrem, menurunnya hasil tangkapan, serta ketidakstabilan harga komoditas perikanan menyebabkan masyarakat pesisir membutuhkan sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu instrumen kebijakan publik

yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kebijakan pemerintah mengenai pengembangan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen, antara lain penyediaan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, pengembangan inovasi, perluasan akses pasar, fasilitasi legalitas usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang bersifat komprehensif tersebut diperlukan karena tantangan yang dihadapi UMKM, khususnya di kawasan pesisir, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal usaha, tetapi juga menyangkut rendahnya literasi bisnis, lemahnya kemampuan manajerial, terbatasnya penguasaan teknologi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta minimnya integrasi dengan rantai nilai industri yang lebih luas. Tambunan (2019) menegaskan bahwa pengembangan UMKM memerlukan kebijakan yang terintegrasi karena

hambatan yang dihadapi pelaku usaha kecil bersifat multidimensional dan saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan kebijakan saja.

Perhatian pemerintah terhadap pengembangan UMKM semakin kuat setelah diterbitkannya berbagai regulasi yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Salah satu regulasi penting adalah **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, yang menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan melalui peningkatan kemampuan usaha, penciptaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diperkuat melalui **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang memberikan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan proses legalitas, penguatan akses pembiayaan, dan peningkatan dukungan terhadap digitalisasi UMKM. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks masyarakat pesisir, kebijakan pengembangan UMKM memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan upaya diversifikasi mata pencaharian masyarakat nelayan. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor penangkapan ikan menyebabkan rumah tangga pesisir sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan pasar. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berkembangnya berbagai usaha berbasis hasil laut, seperti pengolahan ikan, budidaya perikanan, usaha kuliner, kerajinan pesisir, wisata bahari, hingga perdagangan produk olahan berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi usaha tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut, serta memperkuat ketahanan ekonomi wilayah pesisir dalam jangka panjang.

Kebijakan pemerintah juga semakin menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal. Paradigma pembangunan yang sebelumnya berorientasi pada peningkatan produksi kini bergeser menuju pendekatan pemberdayaan (*empowerment*), yaitu pendekatan yang berupaya meningkatkan kemampuan individu agar mampu mengembangkan potensinya secara mandiri. Dalam kerangka tersebut, perempuan pesisir tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki

kapasitas untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berbagai program pelatihan kewirausahaan, bantuan peralatan produksi, fasilitasi sertifikasi halal, pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelatihan pemasaran digital, hingga akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk intervensi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan sebagai pelaku UMKM.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Sen (1999), yang menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan proses memperluas kebebasan (*expansion of freedom*), yaitu memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kemampuan, menentukan pilihan hidup, serta memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas hidupnya. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengembangan UMKM tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah unit usaha atau besarnya omzet penjualan, tetapi juga melalui meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri, memperluas jaringan ekonomi, mengakses teknologi, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan secara lebih aktif.

Di samping itu, efektivitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kemampuan berbagai institusi dalam membangun koordinasi lintas sektor. Pengembangan UMKM perempuan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan perikanan, pengelolaan wilayah pesisir, pendidikan vokasi, pengembangan koperasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transformasi digital. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ekosistem kewirausahaan yang sehat. Tanpa koordinasi yang efektif, berbagai program pemberdayaan cenderung berjalan secara parsial, tumpang tindih, dan kurang mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain koordinasi kelembagaan, aspek monitoring dan evaluasi juga merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah mengidentifikasi keberhasilan program, mengukur dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, serta menemukan berbagai hambatan yang masih dihadapi pelaku usaha. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan sehingga program yang

dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang terus mengalami perubahan akibat dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan tantangan lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi ekonomi, serta menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

8.2 Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Pemberdayaan perempuan pesisir merupakan salah satu strategi pembangunan yang memiliki arti penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Konsep pemberdayaan tidak lagi dipahami sebagai pemberian bantuan atau santunan kepada kelompok masyarakat yang dianggap lemah, melainkan sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengembangkan potensi, mengakses sumber daya, memperkuat posisi tawar, serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan menjadi semakin penting karena perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, mengelola sumber daya lokal, mengembangkan usaha produktif, serta mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.

Secara konseptual, pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, keterampilan, teknologi, informasi, modal usaha, jaringan sosial, serta kesempatan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap aset ekonomi dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga melalui meningkatnya kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan hidup, memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat posisi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Perspektif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan memiliki dimensi ekonomi, sosial, politik, dan psikologis yang saling berkaitan sehingga pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang bersifat holistik.

Berbagai program pemberdayaan perempuan pesisir telah dikembangkan oleh pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta melalui

pendekatan yang semakin beragam. Program tersebut meliputi pelatihan pengolahan hasil perikanan, penguatan kompetensi kewirausahaan, pengembangan koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi akses pembiayaan, literasi keuangan, peningkatan kemampuan digital, pendampingan pemasaran berbasis media sosial dan *marketplace*, penguatan manajemen usaha, hingga pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia usaha. Kehadiran berbagai program tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus memperluas kapasitas manajerial yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Dalam perspektif gender dan pembangunan, keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai peran yang dijalankan perempuan. Moser (1993) menjelaskan bahwa perempuan pada umumnya menjalankan tiga fungsi utama (*triple roles*), yaitu fungsi reproduktif sebagai pengelola rumah tangga, fungsi produktif sebagai pelaku ekonomi, dan fungsi sosial sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan komunitas. Oleh karena itu, desain program pemberdayaan perlu mempertimbangkan beban kerja perempuan agar kegiatan pelatihan, pendampingan,

maupun pengembangan usaha tidak justru menambah tekanan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan pesisir juga sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain program dengan karakteristik lokal masyarakat. Setiap kawasan pesisir memiliki kondisi geografis, budaya, struktur sosial, potensi sumber daya, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan yang bersifat seragam sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, proses identifikasi kebutuhan, pemetaan potensi lokal, pelibatan masyarakat dalam penyusunan program, serta penghargaan terhadap pengetahuan lokal menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan. Chambers (1997) menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada masyarakat harus menempatkan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat lokal sebagai dasar dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan.

Selain memperhatikan aspek lokalitas, pemberdayaan perempuan pesisir juga perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pembentukan kelompok usaha bersama, koperasi perempuan, komunitas pemasaran digital, maupun jaringan kemitraan antarpelaku usaha menjadi sarana penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat posisi tawar, memperluas

akses pasar, serta mempermudah akses terhadap berbagai program pemerintah dan lembaga keuangan. Melalui kelembagaan yang kuat, perempuan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi secara individual, tetapi juga mampu membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kapasitas kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan usaha.

Meskipun berbagai program pemberdayaan telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dan pendapatan perempuan pesisir, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pendampingan pascaprogram, rendahnya akses terhadap pasar modern, minimnya inovasi produk, terbatasnya literasi digital, lemahnya kemampuan manajerial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Tidak sedikit program yang berhenti setelah bantuan diberikan sehingga kelompok sasaran mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan jangka pendek, melainkan sebagai proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan pemberdayaan perlu diarahkan pada pembangunan

ekosistem yang mendukung keberlanjutan usaha perempuan pesisir melalui integrasi pelatihan, pendampingan, pembiayaan, inovasi teknologi, penguatan jaringan pemasaran, serta pengembangan kemitraan lintas sektor. Pendekatan ini memungkinkan perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang dimiliki dalam lingkungan usaha yang kondusif. Dengan demikian, pemberdayaan akan menghasilkan perubahan yang lebih permanen karena perempuan memiliki kapasitas untuk terus beradaptasi terhadap perubahan pasar, perkembangan teknologi, maupun dinamika sosial ekonomi yang terus berlangsung.

Pada akhirnya, program pemberdayaan perempuan pesisir merupakan investasi sosial yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan wilayah pesisir. Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan wilayah pesisir pada masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan perempuan sebagai mitra

strategis dalam setiap proses pembangunan ekonomi dan sosial.

8.3 Peran Perguruan Tinggi, LSM, dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ekonomi perempuan di kawasan pesisir merupakan proses pembangunan yang bersifat multidimensional sehingga tidak mungkin dilaksanakan secara optimal apabila hanya bertumpu pada intervensi pemerintah sebagai aktor tunggal. Kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, rendahnya kapasitas kewirausahaan, lemahnya akses permodalan, terbatasnya jaringan pemasaran, hingga tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim, memerlukan pendekatan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multi-stakeholder approach*). Setiap aktor memiliki sumber daya, kewenangan, pengalaman, dan kapasitas yang berbeda sehingga kolaborasi antarlembaga menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha perlu diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang mampu memperkuat kapasitas perempuan pesisir sebagai pelaku utama pembangunan lokal.

Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pemberdayaan karena menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui fungsi pendidikan, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan literasi keuangan, pengembangan keterampilan digital, serta peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM perempuan. Sementara itu, kegiatan penelitian menghasilkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha berbasis potensi pesisir, seperti teknologi pengolahan hasil perikanan, desain kemasan yang lebih kompetitif, sistem pemasaran digital, hingga model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hasil penelitian tersebut kemudian ditransformasikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang bersifat aplikatif sehingga ilmu pengetahuan tidak berhenti pada ranah akademik, tetapi menjadi solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), perguruan tinggi pada era ekonomi berbasis pengetahuan tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan inovasi dan mempercepat pembangunan ekonomi melalui kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha.

Peran strategis perguruan tinggi juga terlihat dalam pengembangan model pendampingan usaha yang bersifat berkelanjutan. Berbeda dengan pelatihan yang umumnya berlangsung dalam waktu singkat, proses pendampingan memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan secara bertahap melalui interaksi langsung antara akademisi dengan pelaku usaha. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perempuan pesisir untuk memperoleh solusi yang sesuai dengan karakteristik usaha, kondisi sosial, dan potensi lokal yang mereka miliki. Selain meningkatkan keterampilan teknis, pendampingan juga membantu membangun pola pikir kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*) yang mendorong lahirnya inovasi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki kontribusi yang sangat penting sebagai aktor yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun sektor swasta. Keunggulan utama LSM terletak pada kedekatannya dengan komunitas lokal sehingga mampu memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat secara lebih mendalam dibandingkan pendekatan birokrasi yang bersifat formal. Melalui pendekatan partisipatif, LSM memfasilitasi pembentukan kelompok usaha, memperkuat kapasitas organisasi perempuan, meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak

ekonomi dan sosial, serta mendorong tumbuhnya kepemimpinan lokal yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri. Korten (1990) menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu menciptakan proses pemberdayaan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pendekatan yang diterapkan oleh LSM pada umumnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah ekonomi, tetapi juga berupaya membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan masyarakat, pelatihan kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan lokal, LSM membantu perempuan pesisir meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses berbagai peluang ekonomi sekaligus memperkuat posisi tawar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Sementara itu, dunia usaha memegang peranan yang tidak kalah penting melalui pembangunan kemitraan

ekonomi yang mampu menghubungkan UMKM perempuan dengan sistem pasar yang lebih luas. Keterlibatan sektor swasta tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan investasi atau pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR), tetapi juga melalui transfer teknologi, pembinaan mutu produk, pengembangan desain kemasan, sertifikasi, serta pembukaan akses terhadap jaringan distribusi nasional maupun internasional. Melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, perempuan pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar pasar sekaligus memperluas pangsa pasar yang sebelumnya sulit dijangkau secara mandiri. Porter dan Kramer (2011) menjelaskan bahwa konsep *Creating Shared Value* (CSV) menempatkan sektor swasta sebagai aktor pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Keterlibatan dunia usaha juga berkontribusi terhadap terbentuknya rantai nilai (*value chain*) yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, perempuan pesisir tidak hanya diposisikan sebagai produsen skala kecil, tetapi menjadi bagian dari sistem produksi yang terintegrasi dengan berbagai aktor ekonomi lainnya. Hubungan kemitraan yang dibangun memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas

produk, efisiensi distribusi, kepastian pasar, serta peningkatan nilai tambah yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.

8.4 Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan UMKM

Perubahan paradigma pembangunan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral yang bekerja secara terpisah. Kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh UMKM perempuan di kawasan pesisir menuntut hadirnya pola tata kelola pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya, pengetahuan, teknologi, serta kewenangan dari berbagai lembaga dalam satu sistem kerja sama yang terkoordinasi. Pendekatan tersebut dikenal sebagai kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*), yaitu suatu mekanisme yang menempatkan seluruh aktor pembangunan sebagai mitra yang memiliki

tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penguatan UMKM perempuan pesisir, kolaborasi multipihak melibatkan pemerintah sebagai regulator dan penyedia kebijakan, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, lembaga keuangan sebagai penyedia akses pembiayaan, dunia usaha sebagai mitra pemasaran dan investasi, organisasi masyarakat sipil sebagai fasilitator pemberdayaan, media massa sebagai penyebar informasi, serta komunitas lokal sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Setiap aktor menjalankan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi sehingga menghasilkan sinergi yang lebih besar dibandingkan apabila masing-masing bekerja secara sendiri-sendiri.

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suasana dialog, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Pendekatan ini memungkinkan setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan UMKM perempuan pesisir, kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program bersama, pendampingan usaha terpadu,

pengembangan pusat inovasi produk, penyediaan akses pembiayaan, hingga pembangunan sistem pemasaran digital yang melibatkan berbagai institusi secara terintegrasi.

Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial yang diwujudkan melalui rasa saling percaya (*trust*), komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang jelas, serta komitmen seluruh aktor untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya kepercayaan, kerja sama lintas sektor sering kali mengalami berbagai hambatan berupa tumpang tindih program, konflik kepentingan, lemahnya koordinasi, bahkan pemborosan sumber daya yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pembangunan. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kepemimpinan yang inklusif, serta keberlanjutan proses komunikasi antaraktor.

Kolaborasi multipihak juga membuka ruang yang lebih luas bagi lahirnya inovasi. Pertemuan antara pengalaman praktis masyarakat, pengetahuan akademik, dukungan teknologi, serta akses pasar yang dimiliki sektor swasta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan produk baru, perbaikan proses produksi, inovasi pemasaran digital, maupun penguatan sistem manajemen usaha. Dengan demikian, kolaborasi tidak

hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan, tetapi juga mempercepat transformasi UMKM perempuan pesisir menjadi usaha yang lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

8.5 Evaluasi Efektivitas Program Pemberdayaan

Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus pembangunan karena berfungsi sebagai instrumen pembelajaran yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan menilai sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang. Dalam konteks pemberdayaan perempuan pesisir, evaluasi tidak dapat dibatasi hanya pada pengukuran aspek administratif, seperti besarnya anggaran yang diserap, jumlah pelatihan yang diselenggarakan, atau banyaknya peserta yang mengikuti program. Pendekatan tersebut hanya menggambarkan keluaran (*output*), tetapi belum mampu menjelaskan apakah program benar-benar menghasilkan perubahan yang bermakna terhadap kehidupan perempuan sebagai penerima manfaat.

Evaluasi yang lebih komprehensif harus diarahkan pada pengukuran hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang dihasilkan oleh program pemberdayaan. Indikator tersebut

mencakup peningkatan kapasitas kewirausahaan, pertumbuhan pendapatan usaha, perluasan akses pasar, peningkatan literasi keuangan, penguatan kelembagaan kelompok, bertambahnya akses terhadap pembiayaan, serta meningkatnya posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun komunitas. OECD (2021) menjelaskan bahwa evaluasi pembangunan yang berkualitas harus memperhatikan lima kriteria utama, yaitu relevansi (*relevance*), efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), dampak (*impact*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Kelima dimensi tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas suatu intervensi pembangunan dibandingkan sekadar mengukur capaian administratif.

Dalam praktiknya, tidak sedikit program pemberdayaan yang berhasil meningkatkan keterampilan teknis peserta selama proses pelatihan, tetapi mengalami penurunan keberlanjutan setelah kegiatan pendampingan selesai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelatihan, tetapi juga oleh keberadaan ekosistem yang mampu mendukung perkembangan usaha dalam jangka panjang, seperti akses terhadap modal, jaringan pemasaran, dukungan kelembagaan, pendampingan lanjutan, dan kebijakan yang kondusif. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar mampu

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberlanjutan program.

Pendekatan evaluasi partisipatif menjadi sangat relevan dalam konteks pemberdayaan perempuan karena memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian. Melalui pendekatan ini, pengalaman, persepsi, serta kebutuhan perempuan dijadikan sumber informasi utama dalam mengevaluasi efektivitas program sehingga hasil evaluasi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Cousins dan Whitmore (1998) menyatakan bahwa evaluasi partisipatif mampu meningkatkan kualitas pembelajaran organisasi karena melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses refleksi dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, efektivitas program pemberdayaan perempuan pesisir pada akhirnya ditentukan oleh kualitas perencanaan, relevansi program terhadap kebutuhan lokal, kesinambungan pendampingan, kekuatan kolaborasi antaraktor, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun proses pembelajaran yang berkelanjutan. Evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis tidak hanya menghasilkan informasi mengenai tingkat keberhasilan suatu program, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya *policy learning*, yaitu proses pembelajaran kebijakan yang memungkinkan pemerintah dan berbagai

lembaga terus memperbaiki strategi pemberdayaan sehingga lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.

BAB 9
Praktik Baik dan Model Keberhasilan UMKM Pesisir

9.1 Studi Kasus UMKM Perempuan yang Berhasil

Keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan di kawasan pesisir merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami hanya melalui indikator ekonomi yang bersifat kuantitatif, seperti peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan aset usaha, atau bertambahnya jumlah tenaga kerja, melainkan harus dianalisis sebagai suatu proses transformasi sosial-ekonomi yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi antara kapasitas individu, dukungan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta kemampuan pelaku usaha dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, keberhasilan usaha bukan hanya menunjukkan meningkatnya produktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kemampuan perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi, memperluas akses terhadap sumber daya produktif, memperkuat posisi tawar dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pembangunan wilayah pesisir. Dengan demikian, studi kasus mengenai

UMKM perempuan yang berhasil memiliki nilai strategis karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai berbagai faktor yang mendorong lahirnya usaha yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan (Yunus, 2007; FAO, 2022).

Berbagai pengalaman di sejumlah wilayah pesisir Indonesia memperlihatkan bahwa keberhasilan UMKM perempuan umumnya diawali dari aktivitas ekonomi berskala rumah tangga yang memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan baku utama. Pada tahap awal, sebagian besar pelaku usaha hanya melakukan pengolahan sederhana terhadap hasil perikanan atau sumber daya pesisir lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan, keterlibatan dalam pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan teknis, serta dukungan dari berbagai program pemberdayaan pemerintah maupun organisasi masyarakat, usaha-usaha tersebut secara perlahan berkembang menjadi unit usaha yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, memiliki jaringan pemasaran yang lebih luas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga maupun masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM bukanlah hasil dari faktor tunggal, melainkan merupakan

akumulasi dari proses pembelajaran, inovasi, dan adaptasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Salah satu karakteristik yang banyak ditemukan pada UMKM perempuan yang berhasil adalah kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added*) melalui proses pengolahan sumber daya lokal. Produk-produk yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi relatif rendah kemudian diolah menjadi berbagai produk pangan olahan, makanan siap saji, kerajinan, maupun produk kreatif yang memiliki kualitas, daya simpan, dan daya tarik pasar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, hasil tangkapan ikan yang semula dijual dalam keadaan segar dapat diolah menjadi abon ikan, bakso ikan, kerupuk ikan, nugget ikan, ikan asap, maupun berbagai produk olahan lainnya yang memberikan keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan penjualan bahan baku. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan nilai tambah tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya lokal sehingga mampu memperkuat ekonomi masyarakat tanpa meningkatkan tekanan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Porter (1985) menjelaskan bahwa penciptaan nilai tambah merupakan inti dari pembentukan keunggulan bersaing karena memungkinkan suatu usaha menghasilkan produk

yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.

Selain kemampuan menciptakan inovasi produk, keberhasilan UMKM perempuan pesisir juga sangat dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial (*social capital*) yang berkembang dalam komunitas. Modal sosial tersebut tercermin melalui tingginya tingkat kepercayaan antarpelaku usaha, budaya gotong royong, jaringan kerja sama dalam pengadaan bahan baku, pertukaran informasi pasar, kegiatan produksi bersama, hingga kolaborasi dalam pemasaran produk. Hubungan sosial yang kuat memungkinkan kelompok usaha perempuan membangun mekanisme saling mendukung ketika menghadapi keterbatasan modal, fluktuasi harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, maupun berbagai risiko usaha lainnya. Dalam perspektif Putnam (1993), modal sosial merupakan sumber daya kolektif yang mampu meningkatkan efektivitas tindakan bersama melalui keberadaan norma, jaringan sosial, dan kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan UMKM perempuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang mampu memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat

keberhasilan berbagai UMKM perempuan di kawasan pesisir. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, penggunaan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), sistem pembayaran digital, serta layanan logistik modern telah memperluas akses pasar yang sebelumnya hanya terbatas pada lingkungan lokal menjadi pasar regional, nasional, bahkan internasional. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi mengenai tren konsumen, membangun identitas merek (*branding*), memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi transaksi bisnis secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM pada era ekonomi digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnisnya. World Bank (2022) menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pendorong utama peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di negara-negara berkembang karena mampu mengurangi berbagai hambatan geografis dan memperluas akses terhadap pasar maupun layanan keuangan.

Studi kasus keberhasilan UMKM perempuan di kawasan pesisir memberikan pelajaran bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan bantuan modal atau intervensi jangka pendek, melainkan memerlukan strategi pemberdayaan

yang berorientasi pada penguatan kapasitas manusia, pengembangan inovasi, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan akses terhadap teknologi, serta penciptaan jejaring kemitraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengalaman berbagai UMKM perempuan yang berhasil dapat dijadikan model pembelajaran sekaligus referensi kebijakan dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih partisipatif, inklusif, dan mampu menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

9.2 Faktor Penentu Keberhasilan Usaha

Keberhasilan suatu usaha mikro, kecil, dan menengah pada dasarnya merupakan hasil dari proses yang kompleks, yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan serta berkembang secara dinamis mengikuti perubahan lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, keberhasilan usaha tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan besarnya modal finansial yang dimiliki, tetapi harus dipahami sebagai konsekuensi dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif, mengembangkan inovasi secara berkelanjutan, membangun jejaring kemitraan yang luas, serta menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan kebutuhan pasar. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori *resource-based view* yang dikemukakan

Barney (1991), yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan akan tercapai apabila organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan.

Dari perspektif internal, kualitas kewirausahaan merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan suatu usaha. Pelaku usaha yang memiliki motivasi tinggi, orientasi terhadap pencapaian, keberanian mengambil risiko secara terukur, kemampuan berpikir kreatif, serta komitmen untuk terus belajar akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian bisnis dibandingkan pelaku usaha yang hanya mengandalkan pengalaman praktis tanpa melakukan inovasi. Schumpeter (1934) menegaskan bahwa kewirausahaan merupakan motor utama pembangunan ekonomi karena melalui kemampuan berinovasi seorang wirausaha mampu menciptakan kombinasi-kombinasi baru yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi serta mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks UMKM perempuan pesisir, karakter kewirausahaan tersebut tercermin melalui kemampuan mengembangkan produk baru, memanfaatkan peluang pasar, mengelola keterbatasan sumber daya, serta membangun usaha secara bertahap berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang terus berkembang.

Keberhasilan usaha juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan manajerial yang diterapkan oleh pelaku UMKM. Kemampuan menyusun perencanaan usaha, mengelola proses produksi secara efisien, melakukan pencatatan keuangan yang sistematis, mengendalikan mutu produk, mengelola persediaan bahan baku, serta merancang strategi pemasaran yang tepat merupakan komponen manajemen yang menentukan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Banyak penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan, pendampingan, maupun inkubasi bisnis memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM, terutama dalam aspek efisiensi operasional, pengambilan keputusan, dan kemampuan memperluas pasar (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2020).

Di samping faktor internal, lingkungan eksternal memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan UMKM. Dukungan pemerintah melalui kebijakan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, sertifikasi produk, fasilitasi promosi, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan layanan digital merupakan bentuk intervensi yang mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, koperasi, sektor

swasta, serta lembaga keuangan juga memberikan kontribusi yang signifikan melalui transfer pengetahuan, inovasi teknologi, pengembangan produk, perluasan jaringan pemasaran, serta penyediaan akses terhadap sumber daya produktif. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut membentuk suatu ekosistem kewirausahaan (*entrepreneurial ecosystem*) yang memungkinkan UMKM berkembang secara lebih cepat, adaptif, dan berkelanjutan (Isenberg, 2011).

Dalam era transformasi digital, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi juga telah berkembang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan usaha yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan media sosial, platform *e-commerce*, sistem pembayaran digital, aplikasi pencatatan keuangan, hingga analisis perilaku konsumen berbasis data memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan metode pemasaran konvensional. Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan UMKM agar pelaku usaha mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat.

Dengan demikian, keberhasilan UMKM perempuan di kawasan pesisir pada hakikatnya merupakan hasil sinergi antara kualitas kewirausahaan, kemampuan manajerial,

pemanfaatan sumber daya lokal, dukungan modal sosial, akses terhadap pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta keberadaan kebijakan publik yang mendukung. Sinergi tersebut membentuk fondasi yang kokoh bagi terciptanya usaha yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga mampu tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi pesisir secara inklusif.

9.3 Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

Dalam perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, inovasi tidak selalu dimaknai sebagai kemampuan menghadirkan teknologi yang kompleks atau melakukan investasi berskala besar, melainkan lebih dipahami sebagai proses kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi masyarakat pesisir, inovasi sering kali tumbuh dari kemampuan mengembangkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kearifan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi produk maupun proses bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar modern tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas daerah. Dengan demikian, inovasi berbasis kearifan lokal

merupakan bentuk transformasi kreatif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, potensi sumber daya alam, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya masyarakat pesisir. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan UNESCO (2017) yang menegaskan bahwa pengetahuan tradisional merupakan aset strategis yang perlu dilestarikan dan dikembangkan karena memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penerapan inovasi berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pengembangan produk yang memanfaatkan potensi khas wilayah pesisir. Berbagai produk olahan hasil laut yang diproses menggunakan resep tradisional, pemanfaatan rempah-rempah lokal sebagai bahan pengawet alami, pengembangan makanan fungsional berbasis hasil perikanan, pemanfaatan limbah cangkang kerang dan kepiting menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi tinggi, hingga penggunaan motif-motif budaya pesisir pada desain kemasan merupakan contoh nyata inovasi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat identitas lokal. Inovasi tersebut tidak hanya menghasilkan diferensiasi produk di tengah persaingan pasar, tetapi juga

memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi konsumen melalui narasi mengenai asal-usul produk (*product storytelling*), nilai budaya, serta proses produksi yang berorientasi pada keberlanjutan. Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2021) menjelaskan bahwa konsumen pada era pemasaran modern semakin mempertimbangkan nilai emosional, autentisitas, keberlanjutan, dan identitas budaya suatu produk dalam proses pengambilan keputusan pembelian, sehingga keunikan lokal menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing.

Selain inovasi pada aspek produk, pengembangan usaha berbasis kearifan lokal juga mencakup inovasi pada proses produksi, pengelolaan usaha, serta strategi pemasaran. Pemanfaatan mesin produksi berskala kecil yang sesuai dengan karakteristik usaha rumah tangga, penerapan standar keamanan pangan dan sanitasi, sertifikasi halal, penerapan sistem jaminan mutu, pengembangan desain kemasan yang lebih modern, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk membangun identitas merek (*digital branding*) merupakan bentuk inovasi yang memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi dan daya saing tanpa menghilangkan karakter lokal yang menjadi ciri khas produknya. Digitalisasi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan cerita mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokal yang melekat pada

produk sehingga tercipta hubungan emosional yang lebih kuat dengan konsumen. Drucker (1985) menegaskan bahwa inovasi merupakan instrumen utama kewirausahaan karena memungkinkan pelaku usaha menciptakan peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia secara lebih produktif dan kreatif. Oleh sebab itu, inovasi berbasis kearifan lokal tidak hanya menjadi strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi produk, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan identitas kawasan pesisir dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

9.4 Replikasi Model Pengembangan UMKM

Keberhasilan berbagai program pemberdayaan UMKM perempuan di kawasan pesisir menunjukkan bahwa model pengembangan usaha yang efektif memiliki peluang untuk direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang relatif serupa. Namun demikian, proses replikasi tidak dapat dimaknai sebagai upaya menyalin seluruh bentuk kegiatan atau program secara identik, melainkan sebagai proses adaptasi terhadap prinsip-prinsip keberhasilan yang telah terbukti efektif dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, serta karakteristik ekologis masing-masing daerah. Setiap wilayah pesisir memiliki

struktur mata pencaharian, potensi sumber daya alam, tingkat pendidikan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda sehingga strategi pengembangan UMKM harus dirancang secara kontekstual agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan adaptif tersebut sejalan dengan konsep *place-based development* yang menekankan pentingnya pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan spesifik suatu wilayah (Barca, McCann, & Rodríguez-Pose, 2012).

Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa model pengembangan UMKM yang berhasil umumnya dibangun melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Dalam model tersebut, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator yang menyediakan kebijakan, pembiayaan, serta infrastruktur pendukung; perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, transfer teknologi, dan pendampingan; sektor swasta berfungsi sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan investasi; sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama yang mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Pendekatan kolaboratif semacam ini menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang tinggi terhadap

program pembangunan sehingga keberlanjutan kegiatan lebih mudah dipertahankan dibandingkan model pembangunan yang bersifat sentralistik atau *top-down*. Chambers (1997) menegaskan bahwa pembangunan partisipatif merupakan pendekatan yang mampu meningkatkan efektivitas program karena masyarakat memiliki pengetahuan terbaik mengenai kebutuhan dan potensi yang dimiliki lingkungannya.

Di samping pendekatan partisipatif, keberhasilan replikasi model pengembangan UMKM juga sangat bergantung pada penguatan kelembagaan ekonomi lokal sebagai wadah koordinasi, pembelajaran, dan penguatan posisi tawar pelaku usaha. Pembentukan koperasi, kelompok usaha bersama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun asosiasi pelaku usaha menjadi instrumen penting dalam memperkuat akses terhadap pembiayaan, pelatihan, inovasi teknologi, informasi pasar, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Kelembagaan yang kuat juga memungkinkan pelaku UMKM melakukan pengadaan bahan baku secara kolektif, membangun sistem pemasaran bersama, meningkatkan efisiensi biaya produksi, serta memperkuat kemampuan bernegosiasi dengan berbagai pihak. North (1990) menjelaskan bahwa institusi yang efektif mampu mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi melalui penciptaan aturan, mekanisme koordinasi, dan sistem insentif yang

mendorong efisiensi serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, replikasi model pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek teknis usaha, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan kapasitas kelembagaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

9.5 Pembelajaran bagi Wilayah Pesisir Lain

Berbagai praktik baik (*best practices*) yang berkembang pada pemberdayaan UMKM perempuan di sejumlah kawasan pesisir Indonesia memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai pentingnya membangun ekosistem ekonomi lokal yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk modal pembangunan secara simultan. Keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan pemerintah, melimpahnya sumber daya alam, ataupun tingginya investasi yang masuk ke suatu wilayah, melainkan lebih dipengaruhi oleh kemampuan mengelola dan mensinergikan modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), modal kelembagaan (*institutional capital*), serta modal budaya (*cultural capital*) dalam suatu sistem pembangunan yang saling mendukung. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi lokal memerlukan pendekatan yang holistik karena setiap komponen memiliki

hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan daya saing wilayah. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial yang ditandai oleh kepercayaan, norma, dan jejaring kerja sama merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat karena mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas tindakan kolektif.

Salah satu pembelajaran yang paling mendasar dari pengalaman pengembangan UMKM perempuan pesisir adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui inovasi, diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta penguatan identitas lokal yang menjadi pembeda di pasar. Nilai tambah tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan produk olahan, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi mutu, pemanfaatan teknologi digital, serta pembangunan merek yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *value creation* yang menempatkan inovasi sebagai sumber utama keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan pasar yang berlangsung secara cepat (Porter, 1985).

Selain aspek ekonomi, pengalaman tersebut juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas perempuan sebagai pelaku ekonomi merupakan strategi pembangunan

yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi perempuan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, perbaikan kualitas pendidikan anak, peningkatan status kesehatan keluarga, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pada saat menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya dipandang sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga merupakan investasi sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan dan kapasitas manusia (*capability expansion*), sehingga peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, pembiayaan, dan kesempatan berusaha merupakan bagian penting dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan.

Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM perempuan di kawasan pesisir memerlukan strategi yang bersifat terpadu melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas akses

terhadap teknologi dan pembiayaan, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, serta mempercepat transformasi digital yang mampu memperluas akses pasar. Dengan terciptanya ekosistem pembangunan yang kolaboratif, kawasan pesisir memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi wilayah yang produktif, inovatif, inklusif, tangguh terhadap perubahan, serta memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), pendekatan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan (United Nations, 2015).

BAB 10
Masa Depan Perekonomian Perempuan Pesisir

10.1 Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan di kawasan pesisir merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan, karena keberhasilan pembangunan pada masa depan tidak lagi hanya diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari kemampuan suatu sistem ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat pesisir, transformasi tersebut menjadi semakin penting mengingat aktivitas ekonomi lokal sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang saat ini menghadapi tekanan akibat eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem, perubahan iklim, serta meningkatnya dinamika persaingan pasar global. Oleh karena itu, transformasi UMKM perempuan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai perubahan teknis

dalam pengelolaan usaha, tetapi merupakan proses perubahan paradigma yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan teknologi ke dalam keseluruhan sistem usaha sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan (United Nations, 2015).

Transformasi tersebut mengharuskan pelaku UMKM untuk melakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap seluruh aspek aktivitas usahanya, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, pengembangan produk, pemasaran, tata kelola organisasi, hingga penguatan jejaring kemitraan. Model usaha yang sebelumnya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek perlu diarahkan menuju sistem bisnis yang mampu menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas melalui inovasi, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Elkington (1997) melalui konsep *Triple Bottom Line* menegaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur melalui pencapaian keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan keberlanjutan lingkungan (*planet*). Dengan demikian, transformasi UMKM perempuan pesisir menuju ekonomi berkelanjutan harus dibangun di atas keseimbangan ketiga dimensi tersebut agar pertumbuhan ekonomi tidak

mengorbankan daya dukung lingkungan maupun kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan wilayah pesisir, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pelaku utama dalam menciptakan nilai tambah terhadap sumber daya lokal. Berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti pengolahan hasil perikanan, budidaya skala rumah tangga, pengembangan usaha kuliner, kerajinan berbasis sumber daya pesisir, hingga jasa pendukung pariwisata bahari, merupakan bagian dari rantai nilai ekonomi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Apabila aktivitas tersebut dikelola berdasarkan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan bahan baku yang berkelanjutan, maka UMKM perempuan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap konservasi ekosistem pesisir dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/*SDGs*) (United Nations, 2015).

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi percepatan transformasi UMKM menuju ekonomi yang lebih inklusif dan kompetitif. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan *marketplace*, media sosial, sistem pembayaran digital, aplikasi

pencatatan keuangan, hingga berbagai platform berbasis komputasi awan (*cloud computing*) sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Transformasi digital juga mengubah pola interaksi antara produsen dan konsumen sehingga proses pemasaran menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis data. OECD (2021) menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing UMKM pada era ekonomi berbasis pengetahuan karena mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, mempercepat inovasi, serta memperkuat kemampuan usaha dalam merespons perubahan lingkungan bisnis secara adaptif.

Namun demikian, transformasi digital tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan kewirausahaan, literasi digital, literasi keuangan, penguasaan teknologi informasi, serta peningkatan kemampuan manajerial menjadi prasyarat penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Schumpeter (1934) menjelaskan bahwa inovasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lahirnya kombinasi-kombinasi baru dalam proses produksi, pemasaran, organisasi, maupun pemanfaatan teknologi. Dalam konteks UMKM pesisir,

inovasi tidak selalu berarti penggunaan teknologi yang canggih, tetapi dapat berupa pengembangan produk baru, penyempurnaan desain kemasan, penerapan metode pemasaran digital, pemanfaatan limbah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, maupun pembentukan model bisnis yang lebih kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih jauh lagi, transformasi menuju ekonomi berkelanjutan membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal. Pendekatan kolaboratif tersebut memungkinkan terciptanya ekosistem pemberdayaan yang menyediakan akses terhadap pembiayaan, teknologi, pelatihan, sertifikasi produk, penguatan jaringan pemasaran, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan. Keberhasilan transformasi UMKM perempuan pesisir pada akhirnya tidak hanya diukur dari meningkatnya volume penjualan atau keuntungan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas adaptif pelaku usaha, terciptanya lapangan kerja yang layak, terjaganya kualitas lingkungan pesisir, serta menguatnya ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, transformasi UMKM menuju ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan jangka panjang yang menempatkan perempuan sebagai aktor

strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi pesisir yang tangguh, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan antargenerasi.

10.2 Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pesisir

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat pesisir yang mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah berbagai bentuk ketidakpastian yang semakin kompleks akibat perubahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Bagi rumah tangga pesisir yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan, stabilitas ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga oleh kapasitas keluarga dalam mengelola risiko, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien, membangun strategi adaptasi, serta menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi sosial yang menopang kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, konsep ketahanan ekonomi harus dipahami sebagai kemampuan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek pendapatan, pengelolaan aset, modal sosial, kapasitas adaptif, dan kemampuan menghadapi berbagai guncangan eksternal yang berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah tangga (FAO, 2022).

Dalam struktur sosial masyarakat pesisir, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjalankan peran ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku ekonomi produktif. Selain berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan melalui berbagai kegiatan usaha mikro berbasis sumber daya lokal, perempuan juga bertanggung jawab dalam mengelola pengeluaran keluarga, menentukan prioritas konsumsi, mengalokasikan modal usaha, membangun tabungan, serta mengambil berbagai keputusan ekonomi yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga. Peran tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam membangun stabilitas ekonomi keluarga, terutama ketika rumah tangga menghadapi penurunan hasil tangkapan ikan, kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, ataupun gangguan ekonomi akibat bencana alam dan perubahan iklim.

Ketahanan ekonomi keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan rumah tangga dalam melakukan diversifikasi sumber penghasilan, membangun aset produktif, meningkatkan literasi keuangan, memanfaatkan jaringan sosial, serta mengembangkan strategi adaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga merupakan hasil interaksi antara kemampuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta

kapasitas keluarga dalam mengelola ketidakpastian. Ellis (2000) menjelaskan bahwa diversifikasi mata pencaharian merupakan strategi penting bagi rumah tangga pedesaan dalam mengurangi risiko ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan terhadap berbagai bentuk guncangan yang bersifat eksternal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki kemampuan adaptasi yang relatif tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis hasil laut, perdagangan skala kecil, pengolahan produk lokal, pemanfaatan jaringan sosial, hingga penggunaan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural berupa terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan dan digital, minimnya perlindungan sosial, keterbatasan pendidikan kewirausahaan, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan kemampuan perempuan dalam mengembangkan usaha produktif belum sepenuhnya berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan ekonomi keluarga memerlukan pendekatan yang bersifat holistik melalui integrasi kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan kelembagaan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif pembangunan manusia, Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses memperluas kebebasan (*expansion of capabilities*) sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan pilihan hidup yang bernilai. Konsep tersebut memberikan pemahaman bahwa penguatan ketahanan ekonomi keluarga tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pendapatan semata, tetapi juga melalui perluasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, teknologi, informasi, pembiayaan, dan kesempatan berusaha yang memungkinkan perempuan mengembangkan kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Ketika perempuan memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya tersebut, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan anak, kesehatan keluarga, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penguatan ketahanan ekonomi keluarga pesisir merupakan hasil dari sinergi antara kapasitas individu, kekuatan modal sosial masyarakat, dukungan kelembagaan, serta keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok rentan. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penguatan perempuan sebagai pelaku utama ekonomi rumah tangga akan menciptakan sistem sosial-ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan

inklusif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, investasi pada pemberdayaan perempuan pesisir tidak hanya merupakan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga merupakan investasi sosial jangka panjang yang menentukan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan kualitas kehidupan generasi mendatang.

10.3 Strategi Menghadapi Tantangan Global

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem perekonomian dunia melalui meningkatnya keterhubungan antarnegara, percepatan arus informasi, kemajuan teknologi digital, integrasi rantai pasok global, serta perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis. Perubahan tersebut menghadirkan peluang yang sangat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk perempuan yang mengembangkan usaha berbasis sumber daya pesisir, untuk memperluas jangkauan pasar hingga melampaui batas wilayah domestik. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan yang tidak kalah besar karena pelaku usaha dituntut untuk mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin terbuka, kompetitif, dan sarat dengan tuntutan terhadap kualitas, efisiensi, inovasi, serta keberlanjutan. Dengan demikian, daya saing UMKM pada era global tidak lagi hanya ditentukan oleh

kemampuan menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan nilai tambah melalui diferensiasi produk, penguasaan teknologi, penguatan merek, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berlangsung sangat cepat.

Salah satu strategi yang memiliki urgensi tinggi dalam menghadapi tantangan global adalah peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan. Produk yang dihasilkan oleh UMKM perempuan pesisir harus memenuhi berbagai standar mutu yang diakui oleh pasar nasional maupun internasional, baik yang berkaitan dengan keamanan pangan, konsistensi kualitas, ketelusuran (*traceability*), maupun aspek keberlanjutan lingkungan. Penerapan prosedur produksi yang lebih baik, penggunaan bahan baku berkualitas, inovasi desain kemasan, kepemilikan sertifikasi halal, sertifikasi keamanan pangan, serta legalitas usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi peningkatan daya saing. Produk berbasis sumber daya pesisir, seperti berbagai olahan hasil perikanan, rumput laut, maupun produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan kekayaan hayati laut, memiliki peluang yang besar untuk menembus pasar yang lebih luas apabila mampu mempertahankan kualitas secara konsisten sekaligus membangun identitas produk yang kuat. Kotler dan Keller (2022) menegaskan bahwa dalam lingkungan persaingan

modern, nilai suatu produk tidak hanya dibentuk oleh karakteristik fisiknya, tetapi juga oleh persepsi konsumen terhadap kualitas, reputasi merek, pengalaman penggunaan, dan nilai emosional yang melekat pada produk tersebut.

Selain peningkatan kualitas produk, transformasi digital merupakan strategi yang semakin menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan global. Digitalisasi telah mengubah hampir seluruh aspek kegiatan usaha, mulai dari pencarian informasi pasar, pengadaan bahan baku, komunikasi dengan pelanggan, promosi produk, transaksi pembayaran, hingga pengelolaan hubungan dengan konsumen. Penguasaan teknologi digital memungkinkan perempuan pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai tren pasar, perubahan preferensi konsumen, peluang investasi, inovasi produk, serta berbagai program pendampingan yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan aplikasi pencatatan keuangan, manajemen persediaan, pemasaran digital, dan analisis perilaku konsumen sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang lebih akurat.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap isu keberlanjutan mendorong munculnya

paradigma baru dalam praktik bisnis yang tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Konsumen global semakin memberikan perhatian terhadap produk yang diproduksi melalui proses yang ramah lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Kondisi tersebut membuka peluang baru bagi UMKM perempuan pesisir untuk mengembangkan produk yang mengangkat identitas budaya lokal, memanfaatkan bahan baku yang berasal dari praktik perikanan berkelanjutan, serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam proses produksinya.

Strategi menghadapi tantangan global juga harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Perubahan pola musim, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, serta perubahan distribusi sumber daya perikanan menyebabkan ketidakpastian pasokan bahan baku yang menjadi fondasi utama berbagai usaha pengolahan hasil laut. Oleh karena itu, pengembangan sistem produksi yang adaptif melalui diversifikasi usaha, penguatan teknologi penyimpanan hasil perikanan, penggunaan informasi iklim dalam perencanaan produksi, serta pengembangan inovasi produk berbahan baku alternatif menjadi bagian penting

dari strategi penguatan daya tahan UMKM. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim merupakan prasyarat penting bagi peningkatan resiliensi masyarakat pesisir serta keberlanjutan mata pencaharian mereka dalam jangka panjang.

Dengan demikian, strategi menghadapi tantangan global harus dipahami sebagai proses transformasi yang menyeluruh, yang mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inovasi, penerapan prinsip keberlanjutan, serta peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sinergi berbagai strategi tersebut akan memperbesar peluang UMKM perempuan pesisir untuk berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, kompetitif, dan mampu mengambil manfaat dari dinamika ekonomi global.

10.4 Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas

Pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan apabila dirancang melalui pendekatan berbasis komunitas (*community-based empowerment*), yaitu suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai

subjek utama dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil yang dicapai. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap komunitas memiliki potensi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang dapat dikembangkan secara optimal apabila masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga eksternal, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam membangun kemandirian, memperkuat kapasitas kolektif, dan mengelola sumber daya yang dimilikinya secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, model pemberdayaan berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok usaha bersama, koperasi perempuan, forum belajar kewirausahaan, kelompok pengolah hasil perikanan, komunitas pemasaran digital, maupun berbagai bentuk organisasi ekonomi lokal yang memungkinkan anggota saling berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Keberadaan organisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi melalui kerja sama antarpelaku usaha, tetapi juga memperkuat

posisi tawar perempuan dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan, pelatihan, teknologi, informasi pasar, serta berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Hubungan sosial yang berkembang di dalam komunitas menjadi fondasi terbentuknya modal sosial (*social capital*) yang berfungsi memperkuat rasa saling percaya, solidaritas, norma bersama, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang lahir dari jaringan hubungan sosial, norma, dan tingkat kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat sehingga mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan perempuan pesisir, modal sosial menjadi faktor yang sangat penting karena memungkinkan perempuan memperoleh dukungan moral, akses terhadap informasi, jaringan pemasaran, hingga peluang kemitraan yang sulit diperoleh melalui usaha individual.

Lebih jauh lagi, pemberdayaan perempuan harus dipahami sebagai proses transformasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perluasan kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan hidup secara mandiri. Kabeer (1999)

menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan individu memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan strategis yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan karena adanya berbagai bentuk keterbatasan struktural. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan pesisir mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, literasi keuangan, teknologi digital, kepemimpinan, penguasaan keterampilan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam kelembagaan masyarakat.

Model pemberdayaan berbasis komunitas juga memerlukan dukungan kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, lembaga keuangan, media, dan organisasi masyarakat sipil. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun ekosistem pemberdayaan. Pemerintah berperan melalui kebijakan, regulasi, dan penyediaan fasilitas; perguruan tinggi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat; sektor swasta melalui kemitraan usaha dan program tanggung jawab sosial perusahaan; sedangkan organisasi masyarakat sipil berperan dalam pendampingan, advokasi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut memungkinkan

terjadinya transfer pengetahuan, pengembangan inovasi, perluasan akses pembiayaan, serta pembentukan jaringan pemasaran yang lebih luas sehingga proses pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi berkembang menjadi penguatan sistem ekonomi lokal secara menyeluruh.

Dengan demikian, model pemberdayaan perempuan berbasis komunitas merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas kolektif, pengembangan modal sosial, dan penguatan kelembagaan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

10.5 Rekomendasi Kebijakan dan Agenda Pengembangan UMKM Pesisir

Keberlanjutan pengembangan UMKM perempuan di kawasan pesisir pada masa mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan struktural yang selama ini membatasi pertumbuhan usaha skala mikro dan kecil. Berbagai bentuk intervensi yang hanya berorientasi pada bantuan modal atau pelatihan yang bersifat sesaat terbukti belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang

berkelanjutan apabila tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar, serta penciptaan ekosistem usaha yang mendukung perkembangan UMKM secara menyeluruh. Oleh karena itu, agenda kebijakan pada masa mendatang perlu disusun melalui pendekatan yang lebih terpadu dengan mengintegrasikan aspek pembiayaan, pendidikan, inovasi teknologi, pemasaran, perlindungan sosial, pengelolaan sumber daya pesisir, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu agenda prioritas yang memerlukan perhatian serius adalah pengembangan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap karakteristik usaha perempuan pesisir. Hingga saat ini, banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan administratif, keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya informasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sumber pembiayaan informal yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Oleh karena itu, pengembangan skema pembiayaan yang fleksibel, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan lembaga keuangan mikro, serta peningkatan literasi keuangan perlu menjadi bagian penting dari kebijakan pemberdayaan UMKM agar perempuan memiliki

kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas skala usahanya.

Selain aspek pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi agenda strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendidikan kewirausahaan, pelatihan teknis, penguatan literasi digital, pengembangan inovasi produk, serta peningkatan kemampuan manajerial. Program pengembangan kapasitas tersebut perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat pesisir dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal, karakteristik budaya, serta dinamika perubahan pasar sehingga hasil yang dicapai benar-benar relevan dengan kondisi lapangan. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia memiliki dampak jangka panjang karena akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan inovasi, memperkuat daya saing, dan membangun kemandirian ekonomi.

Agenda kebijakan berikutnya adalah penguatan ekosistem digital sebagai fondasi bagi transformasi UMKM pada era ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah bersama sektor swasta perlu memperluas akses terhadap infrastruktur internet yang berkualitas, menyediakan program pelatihan pemasaran digital, meningkatkan literasi teknologi informasi, serta mengembangkan platform digital yang mampu menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, pemasok, lembaga pembiayaan, dan berbagai

mitra bisnis lainnya. Digitalisasi tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi usaha, serta mempercepat integrasi UMKM ke dalam rantai nilai nasional maupun global.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengembangan UMKM juga harus diintegrasikan dengan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam sehingga berbagai perubahan kondisi lingkungan akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi mereka. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan perlu mencakup penguatan sistem informasi iklim, pengembangan teknologi pascapanen, penyediaan infrastruktur penyimpanan hasil perikanan, rehabilitasi ekosistem pesisir, diversifikasi sumber mata pencaharian, serta dukungan terhadap inovasi produk berbasis sumber daya lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi pesisir.

Seluruh agenda kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan mengenai penghapusan kemiskinan, pencapaian kesetaraan gender,

penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta aksi terhadap perubahan iklim (United Nations, 2015). Dengan demikian, pengembangan UMKM perempuan pesisir tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional maupun global.

Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM perempuan pesisir harus diposisikan sebagai investasi pembangunan jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Penguatan kapasitas perempuan sebagai pelaku ekonomi lokal tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperluas kesempatan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi dinamika perubahan global. Melalui kebijakan yang inklusif, kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan, UMKM perempuan pesisir memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang sebagai kekuatan ekonomi lokal yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. New York: Free Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2022). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management, 17*(1), 99–120.

Béné, C. (2006). *Small-scale fisheries: Assessing their contribution to rural livelihoods in developing countries*. FAO Fisheries Circular No. 1008. Rome: Food and Agriculture Organization.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.

Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (9th ed.). Pearson.

Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.

Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Drucker, P. F. (1985). *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Harper & Row.

Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

FAO. (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the Sustainable Development Goals*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: Food and Agriculture Organization.

Folke, C. (2006). Resilience: The Emergence of a Perspective for Social–Ecological Systems Analyses. *Global Environmental Change, 16*(3), 253–267.

Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2020). *Entrepreneurship* (11th ed.). New York: McGraw-Hill.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: IPCC.

International Organization for Standardization. (2021). *ISO 9001:2015 Quality Management Systems—Guidance and Practice*. Geneva: ISO.

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change, 30*(3), 435–464.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! *Business Horizons, 53*(1), 59–68.

Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity* (4th ed.). Pearson.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023*. Jakarta: KKP.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Transformasi Digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023*. Jakarta.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data UMKM Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Korten, D. C. (1990). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. West Hartford: Kumarian Press.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing Management* (16th Global ed.). Pearson.

Kusnadi. (2015). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and Practice* (9th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

OECD. (2020). *OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021a). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021b). *The Digital Transformation of SMEs*. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. Jakarta: OJK.

Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society, 27*(2), 151–208.

World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. Washington, DC: World Bank.

Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. New York: PublicAffairs.

GLOSARIUM

1. Abrasi Pantai
Proses pengikisan garis pantai akibat gelombang, arus laut, atau aktivitas manusia.

2. Akses Modal
Kemampuan pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.

3. Adaptasi Ekonomi
Kemampuan individu atau kelompok menyesuaikan aktivitas ekonomi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan pasar.

4. Agroindustri Pesisir
Kegiatan pengolahan hasil perikanan dan kelautan menjadi produk bernilai tambah.

5. Akuntabilitas
Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan usaha dan penggunaan sumber daya.

6. Analisis SWOT
Metode analisis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu usaha.

7. Aset Produktif
Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, seperti peralatan, bangunan, atau modal usaha.

8. Bahan Baku
Material utama yang digunakan dalam proses produksi suatu produk.

9. Blue Economy (Ekonomi Biru)
Konsep pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

10. Branding
Proses membangun identitas dan citra suatu produk atau usaha.

11. Budaya Maritim
Nilai, tradisi, dan kebiasaan masyarakat yang berkembang karena kedekatannya dengan laut.

12. Diversifikasi Produk
Pengembangan berbagai jenis produk untuk memperluas pasar dan mengurangi risiko usaha.

13. Diversifikasi Pendapatan
Upaya memperoleh penghasilan dari lebih dari satu jenis usaha.

14. Daya Saing
Kemampuan usaha bersaing dalam kualitas, harga, inovasi, dan pelayanan.

15. Digital Marketing
Strategi pemasaran menggunakan media dan teknologi digital.

16. Ekonomi Keluarga
Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

17. Ekonomi Kreatif
Kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pengetahuan.

18. Ekonomi Lokal
Sistem ekonomi yang berkembang di suatu wilayah berdasarkan potensi daerah.

19. Ekonomi Pesisir
Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir.

20. Ekosistem Pesisir
Kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan fisik di kawasan pesisir.

21. Efisiensi Produksi
Penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produk.

22. Eksploitasi Berlebihan (Overfishing)
Penangkapan ikan melebihi kemampuan sumber daya untuk pulih.

23. Gender
Peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dibentuk secara sosial antara laki-laki dan perempuan.

24. Gotong Royong
Kerja sama masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

25. Hilirisasi
Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.

26. Inklusi Keuangan
Ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

27. Inovasi Produk
Pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada.

28. Inovasi Sosial
Pembaruan dalam cara masyarakat menyelesaikan masalah sosial.

29. Integrasi Pasar
Keterhubungan antarwilayah dalam sistem perdagangan.

30. Investasi
Penanaman modal untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan.

31. Jaringan Usaha
Hubungan kerja sama antarpelaku usaha.

32. Kapasitas Usaha
Kemampuan usaha dalam menghasilkan produk atau jasa.

33. Keberlanjutan
Prinsip pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

34. Kearifan Lokal
Pengetahuan dan nilai tradisional yang diwariskan dalam masyarakat.

35. Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Kelompok masyarakat yang bekerja sama mengembangkan usaha produktif.

36. Kemiskinan Pesisir
Kondisi keterbatasan ekonomi yang dialami masyarakat pesisir.

37. Kepemimpinan
Kemampuan memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok.

38. Ketahanan Ekonomi
Kemampuan mempertahankan stabilitas ekonomi ketika menghadapi krisis.

39. Ketahanan Keluarga
Kemampuan keluarga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

40. Kewirausahaan
Kemampuan menciptakan dan mengembangkan usaha melalui inovasi.

41. Koperasi
Badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya.

42. Kredit Usaha
Fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha.

43. Literasi Digital
Kemampuan menggunakan teknologi informasi secara efektif.

44. Literasi Keuangan
Kemampuan memahami dan mengelola keuangan secara bijaksana.

45. Manajemen Keuangan
Proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan usaha.

46. Manajemen Risiko
Proses mengidentifikasi dan mengendalikan risiko usaha.

47. Marketplace
Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli.

48. Modal Sosial
Kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang mendukung kerja sama masyarakat.

49. Nilai Tambah
Peningkatan nilai ekonomi suatu produk melalui proses pengolahan.

50. Nelayan Tradisional
Nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana.

51. Pangan Lokal
Produk pangan yang berasal dari potensi daerah setempat.

52. Pariwisata Bahari
Kegiatan wisata berbasis potensi laut dan pesisir.

53. Pemasaran
Kegiatan menciptakan, menawarkan, dan menyalurkan produk kepada konsumen.

54. Pemberdayaan
Proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mandiri.

55. Pemberdayaan Perempuan
Upaya meningkatkan kapasitas, akses, dan peran perempuan dalam pembangunan.

56. Pembiayaan Mikro
Layanan keuangan berskala kecil bagi pelaku usaha mikro.

57. Pendapatan Rumah Tangga
Total penerimaan ekonomi seluruh anggota keluarga.

58. Pengambilan Keputusan
Proses memilih tindakan berdasarkan pertimbangan tertentu.

59. Pengemasan Produk
Perancangan kemasan untuk melindungi dan meningkatkan daya tarik produk.

60. Pengolahan Hasil Laut
Proses mengubah hasil laut menjadi produk siap konsumsi atau bernilai tambah.

61. Penguatan Kapasitas
Peningkatan kemampuan individu atau organisasi.

62. Perubahan Iklim
Perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan suhu bumi.

63. Perikanan Tangkap
Kegiatan menangkap ikan di perairan alami.

64. Perikanan Budidaya
Kegiatan memelihara organisme perairan untuk tujuan produksi.

65. Permodalan
Penyediaan dana untuk menjalankan usaha.

66. Perempuan Pesisir
Perempuan yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

67. Produktivitas
Kemampuan menghasilkan output secara efisien.

68. Promosi
Upaya memperkenalkan produk kepada konsumen.

69. Resiliensi
Kemampuan bertahan dan pulih dari tekanan atau krisis.

70. Rantai Nilai (Value Chain)
Rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai tambah suatu produk.

71. Risiko Usaha
Kemungkinan terjadinya kerugian dalam kegiatan usaha.

72. Rumah Tangga Nelayan
Keluarga yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan.

73. Sertifikasi Produk
Proses pemberian pengakuan bahwa produk memenuhi standar tertentu.

74. Standarisasi
Penerapan standar mutu dalam proses produksi.

75. Strategi Bertahan
Langkah yang dilakukan pelaku usaha untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.

76. Strategi Pemasaran
Rencana sistematis untuk mencapai tujuan pemasaran.

77. Subsistensi
Kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar.

78. Sumber Daya Kelautan
Potensi alam yang terdapat di wilayah laut.

79. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kemampuan dan kompetensi individu dalam suatu organisasi atau usaha.

80. Teknologi Digital
Perangkat dan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung aktivitas ekonomi.

81. Transformasi Digital
Perubahan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital.

82. UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kriteria peraturan perundang-undangan.

83. Usaha Berkelanjutan
Usaha yang memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

84. Usaha Mikro
Usaha produktif berskala kecil yang dimiliki perorangan atau badan usaha mikro.

85. Value Proposition
Nilai utama yang ditawarkan suatu produk kepada konsumen.

86. Wirausaha Perempuan
Perempuan yang menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

87. Wilayah Pesisir
Daerah peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi proses alam dan aktivitas manusia.

88. Zero Waste
Konsep pengelolaan produksi yang meminimalkan limbah melalui penggunaan sumber daya secara efisien.

INDEKS

A

Abrasi pantai, 15, 18, 76, 142
Akses modal, 35, 58, 97, 168
Adaptasi ekonomi, 82, 85, 132, 176
Akuntabilitas usaha, 154
Analisis SWOT, 104
Aset produktif, 44, 91, 173

B

Bahan baku, 22, 68, 119
Branding produk, 121, 125, 130
Budaya maritim, 17, 126

D

Digital marketing, 109, 114, 156
Digitalisasi UMKM, 88, 111, 177
Diversifikasi produk, 84, 87, 118

E

Ekonomi berkelanjutan, 176, 182, 190
Ekonomi keluarga pesisir, 41, 178
Ekonomi lokal, 27, 64
Ekosistem pesisir, 12, 73, 141

G

Gender, 39, 45, 52
Gotong royong, 19, 34

K

Kearifan lokal, 20, 126
Keberlanjutan usaha, 175, 184
Ketahanan ekonomi keluarga, 178, 186
Kewirausahaan perempuan, 47, 92, 160
Koperasi, 63, 98

L

Literasi digital, 113, 164
Literasi keuangan, 96, 163

M

Marketplace, 114, 157
Modal sosial, 20, 36, 181
Manajemen usaha, 93, 153

P

Pemberdayaan perempuan, 38, 55, 180
Pemasaran digital, 110, 154
Pengemasan produk, 132, 137
Pengolahan hasil laut, 67, 120
Perempuan pesisir, 33, 42, 178
Perubahan iklim, 18, 74, 143

R

Rantai nilai, 69, 122
Resiliensi ekonomi, 82, 176

S

Strategi adaptasi, 80, 86
Strategi pemasaran, 105, 124
Sumber daya kelautan, 13, 72

T

Teknologi digital, 112, 165
Transformasi UMKM, 175, 183

U

UMKM pesisir, 1, 27, 88, 174
Usaha mikro, 56, 90

W

Wilayah pesisir, 10, 14, 70